

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**EVALUASI PERENCANAAN PROGRAM RESPEK PADA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG
DALAM MENGURANGI KEMISKINAN
DI KABUPATEN YAHUKIMO**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh Gelar Magister Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

ZADRAK AWAN MARADONA

NIM. 500661183

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA**

2017

ABSTRAK

EVALUASI PERENCANAAN PROGRAM RESPEK PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DALAM MENGURANGI KEMISKINAN DI KABUPATEN YAHUKIMO

Zadrak Awan Maradona
zmaradona@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Penelitian ini bertujuan menjelaskan Evaluasi input perencanaan program RESPEK, Evaluasi proses perencanaan program RESPEK, Evaluasi output perencanaan program RESPEK, dan Dampak bagi masyarakat Kampung Dalam mengurangi Kemiskinan Di Kabupaten Yahukimo.

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui teknik reduksi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan, dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi input perencanaan program respek dalam mengurangi kemiskinan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Yahukimo dilihat dari dana planning, dana training, dana transport, dana respek berjalan baik dengan anggaran seratus juta rupiah per setiap kampung, dana training belum berjalan dengan baik disebabkan masyarakat penerima dana program RESPEK belum bisa membuat perencanaan anggaran training dengan baik, dana transport belum berjalan sebagaimana mestinya disebabkan jalanan bervariasi ada jalan yang baik tetapi sebaliknya ada yang rusak dan sulit dilewati kendaraan roda empat maupun roda dua.

Evaluasi proses perencanaan program RESPEK menunjukkan bahwa evaluasi proses perencanaan program RESPEK dalam mengurangi kemiskinan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Yahukimo dilihat dari tiga aspek *pertama*, masyarakat kampung belum mampu untuk merencanakan penggunaan dana RESPEK tersebut. *Kedua*, fasilitator tidak memahami persoalan yang dihadapi oleh kampung-kampung yang ada di Kabupaten Yahukimo. *Ketiga*, pendampingan sangat urgen dalam membantu masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan RESPEK belum memadai. Hal ini mengakibatkan Respek belum jalan optimal, padahal dalam tataran konsep sudah sangat baik, namun dalam tataran implementasi masih bermasalah.

Evaluasi output perencanaan program RESPEK dalam mengurangi kemiskinan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Yahukimo dilihat dari Program RESPEK yang dilaksanakan di Kabupaten

Yahukimo belum dapat dikatakan berhasil diakibatkan pemahaman masyarakat kampung belum siap menerima dana RESPEK dengan merinci program yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat kampung lebih baik. Hal ini terjadi karena sumber daya manusia masyarakat kampung rata-rata tergolong rendah, dibandingkan dengan daerah lain di luar Papua secara umum.

Kata Kunci: Evaluasi, Perencanaan, Program Respek, Kemiskinan



ABSTRACT**EVALUATION OF RESPEK PROGRAM PLANNING BY COMMUNITY DEVELOPMENT AGENCY TO DIMINISH POVERTY IN GOVERNMENT OF YAHUKIMO**

Zadrak Awan Maradona
zmaradona@gmail.com

Graduate Studies Program
Indonesia Open University

This research aims to explain the evaluation of input strategy, the evaluation of process of planning, and the evaluation of output strategy of RESPEK program as well as the impact to diminish poverty in Government of Yahukimo.

The writer undertakes descriptive qualitative approach for this research through field study and collects data from observations, interviews, and documentation. In analyzing the data, the writer uses data reduction technique, data presentation, drawing conclusion and data verification.

The result of the research shows that the evaluation of input strategy RESPEK to diminish poverty in Yahukimo by the Community Development Agency is seen from planning fund, training fund, and transportation fund. The writer finds out that the implementation of RESPEK is appropriate with the budget allocation, as much as of Rp. 100.000.000,- for each village. However, it does not apply in both training fund and transportation fund. It is mainly caused by the condition of damaged roads which make it hard for people to reach the village.

The evaluation of planning process of RESPEK program, that aim to decrease poverty by the Community Development Agency of Yahukimo district, is reviewed by the three aspects. Firstly, people in the villages have not been able to plan the use of the funding that the get from RESPEK program properly. Secondly, the facilitators do not really comprehend the problem faced by the people in Yahukimo. Thirdly, cooperation between the facilitators and the villagers, which is extremely important to help them in producing better planning, has not worked really well. As consequence, the program can not reach its maximum benefit, even though it is conceptually well planned.

The evaluation of output strategy from RESPEK to diminish poverty in the Community Development Agency in Yahukimo, which has been reviewed from the programs that takes place in the district, can not be considered successful. The lack of understanding from the local people to plan sustainable and beneficial programs to upgrade their wellbeing by using the fund from

RESPEK, is considered to be one of the main cause that contribute to the failure of this program. The lack of human resources in the villages, compared to people from other areas outside Papua, is another problem found in this research.

Keywords: Evaluation, Planning, RESPEK Program, Poverty.



UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Evaluasi Perencanaan Program Respek
Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung
Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Kabupaten Yahukimo
adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun
dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.
Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan
adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia
menerima sanksi akademik.

Dekai, 02 September 2017

Yang Menyatakan



(Zadrak Awan Maradona)

NIM . 500661183

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Evaluasi Perencanaan Program Respek Pada Badan
Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dalam Mengurangi
Kemiskinan Di Kabupaten Yahukimo

Penyusun TAPM : Zadrak Awan Maradona
NIM : 500661183
Program Studi : Administrasi Publik
Hari/Tanggal : Jumat, 18 Agustus 2017

Menyetujui :

Pembimbing II



Made Yudhi Setiani, S.IP.,M.Si.,Ph.D
NIP. 19710219 199802 2 001

Pembimbing I



Dr. Muhamad Sawir, M.Si
NIDN. 0909076801

Penguji Ahli



Dr. Liestyodono B. Irianto, M.Si
NIP. 195812151986011009

Mengetahui :

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Magister Administrasi Publik



Dr. Darmanto, M.Ed
NIP.195910271986031003

Direktur
Program Pascasarjana



UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : Zadrak Awan Maradona
 NIM : 500661183
 Program Studi : Administrasi Publik
 Judul TAPM : Evaluasi Perencanaan Program Respek Pada Badan
 Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dalam Mengurangi
 Kemiskinan Di Kabupaten Yahukimo

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister
 (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 18 Agustus 2017
 Waktu : Pukul 15.00 WIT

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji
 Nama : Dr. Sardjijo, M.Si

Tanda Tangan

Penguji Ahli
 Nama : Dr. Liestyodono B. Irianto, M.Si

Pembimbing I
 Nama : Dr. Muhamad Sawir, M.Si

Pembimbing II
 Nama : Made Yudhi Setiani, S.IP.,M.Si.,Ph.D

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan anugerah-Nya yang penulis rasakan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister pada Program Pascasarjana Program Studi Administrasi Publik Universitas Terbuka yang berjudul : Evaluasi Perencanaan Program Respek pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dalam Mengurangi Kemiskinan di Kabupaten Yahukimo.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir Program Magister ini masih jauh dari sempurna, terlebih kebatasan penulis dalam wawasan dan pengalaman terkait obyek yang diteliti. Namun demikian harapan kami semoga Tugas Akhir Program Magister ini bermanfaat bagi pembaca yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut.

Dalam penyusunan Tugas Akhir Program Magister ini berbagai kendala dihadapi penulis, namun demikian rasanya menjadi ringan ketika ketulusan-ketulusan hadir dari berbagai pihak yang mengulurkan bantuan kepada penulis. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Abock Busup, MA. Bupati Yahukimo yang telah memberikan dukungan dan ijin belajar bagi penulis.
2. Bapak Frangky G. Lilihata, ST.,M.Si, selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Yahukimo yang telah memberikan ijin dan dukungan dalam proses perkuliahan.
3. Dr. Sardjijo, M.Si selaku Kepala UPBJ Universitas Terbuka Jayapura beserta Staf Pengelola.
4. Bapak Dr. Liestyodono B. Irianto, M.Si, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
5. Ibu Nining Suherni, M,Si selaku Pengelola Universitas Terbuka di Kabupaten Yahukimo.
6. Bapak Dr. Muhammad Sawir, S.Sos.,M.Si selaku Pembimbing I dengan penuh perhatian dan kesabaran senantiasa memberi dorongan, motivasi, bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga Tugas Akhir Program Magister ini dapat diselesaikan.

7. Ibu Made Yudhi Setiani, S.IP.,M.Si.,Ph.D selaku Pembimbing II yang dengan penuh perhatian dan kesabaran senantiasa membimbing dan mengarahkan, sehingga Tugas Akhir Program Magister ini dapat diselesaikan.
8. Segenap Dosen Program Pascasarjana Program Studi Administrasi Publik Universitas Terbuka.
9. Segenap Karyawan dan Karyawati Program Pascasarjana Program Studi Administrasi Publik Universitas Terbuka.
10. Istriku tercinta yang telah menyemangati, memberikan perhatian dan kasih sayang yang tulus untuk penulis.
11. Anak-anakku, Christo dan Ken yang selalu sabar dan mendukung doa.
12. Orang Tua terkasih yang selalu sabar dan membantu memberikan semangat dan dorongan untuk tetap berusaha.
13. Teman-teman satu kelompok yang selalu menyemangati, meskipun sering telat, tetapi kalianlah yang menjadi semangatku untuk maju.

Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu, yang telah membantu keberhasilan penyusunan Tugas Akhir Program Magister ini.

Dekai, 02 September 2017

Penulis

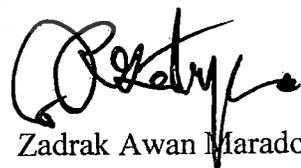
Riwayat Hidup

Nama : Zadrak Awan Maradona
NIM : 500661183
Program Studi : Pascasarjana Program Studi Administrasi Publik
Tempat / Tanggal Lahir : Wamena, 02 September 1985

Riwayat Pendidikan : - Lulus SD di SD Negeri Wamena pada tahun 1997;
- Lulus SMP di SMP Negeri 1 Wamena pada tahun 2000;
- Lulus SMA di SMA Negeri 3 Makale pada tahun 2003;
- Lulus S1 di Universitas Udayana pada tahun 2007.

Riwayat Pekerjaan : - Tahun 2008 s/d 2009 sebagai staff Pemasaran pada PT. Filyani Dewata, Denpasar - Bali;
- Tahun 2010 s/d 2017 sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua.

Dekai, 02 September 2017



Zadrak Awan Maradona

NIM . 500661183

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	i
Form Pernyataan Bebas Plagiasi	v
Lembar Persetujuan TAPM	vi
Lembar Pengesahan	vii
Kata Pengantar	viii
Riwayat Hidup	x
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar	xiv
Daftar Lampiran	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian	14
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Kajian Teori	15
1. Kajian Teori Evaluasi	15
2. Kajian Teori Perencanaan	21
3. Kajian Program Respek	31
4. Kajian Konsep Pembangunan	35
B. Penelitian Terdahulu	39
C. Kerangka Berpikir	52
D. Konsep Operasional Variabel	52
BAB III. METODE PENELITIAN.....	54
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian	54
B. Jenis Dan Desain Penelitian	54
C. Informan Penelitian	56
D. Jenis Dan Sumber Data	57
E. Teknik Pengumpulan Data	57

F. Teknik Analisis Data	58
G. Pengecekan Validitas Temuan	60
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Deskripsi Objek Penelitian Secara Umum	62
B. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Yahukimo	87
C. Pembahasan	97
1. Evaluasi Input Perencanaan Program Respek Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Yahukimo	97
2. Evaluasi Proses Perencanaan Program Respek Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Yahukimo	105
3. Evaluasi Output Perencanaan Program Respek Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Yahukimo	114
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN	121
A. Simpulan	121
B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	124
DAFTAR LAMPIRAN	129

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Distribusi Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2010	9
Tabel 4. 1 Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Yahukimo Tahun 2014	73
Tabel 4. 2 PDRB Perkapita Kabupaten Yahukimo Tahun 2010-2014 (Rupiah)	74
Tabel 4. 3 Rasio Gini Kabupaten Yahukimo Tahun 2013.....	75



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. 1 Perkembangan Jumlah dan Presentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan 1999-2010	9
Gambar 1. 2 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2010	11
Gambar 2.1 Kerangka Fikir Penelitian	52
Gambar 3. 1 Analisis Data Model Interaktif, Miles dan Huberman (Rohidi, 1992)	59
Gambar 4. 1 Peta Administratif Kabupaten Yahukimo	64
Gambar 4. 2 Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Yahukimo, Tahun 2014	66
Gambar 4. 3 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Yahukimo, Tahun 2010-2014 (Juta Rupiah)	68
Gambar 4. 4 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Yahukimo, Tahun 2010-2014 (Juta Rupiah)	69
Gambar 4. 5 Struktur Ekonomi Terbesar Kabupaten Yahukimo Tahun 2014 (%)	71
Gambar 4. 6 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Yahukimo Tahun 2014 (%)	72
Gambar 4. 7 Persentase Pengeluaran rata-rata per Kapita Sebulan Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Jayawijaya, dan Provinsi Papua (%)	76
Gambar 4. 8 Salah satu usaha mikro yang berjalan di Kabupaten Yahukimo	77
Gambar 4. 9 Potensi bisnis yang berbasis sumber daya lokal di Kabupaten Yahukimo	81
Gambar 4. 10 Lembaga Keuangan Perbankan (Bank Papua di Yahukimo)	84
Gambar 4. 11 Aktivitas masyarakat di Pasar Tradisional yang merupakan hasil (<i>output</i>) program respek	120

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Lembar Persetujuan Proposal Penelitian	130
Lampiran 2 Lembar Layak Uji	132
Lampiran 3 Lembar Persetujuan Artikel	133
Lampiran 4 Surat Keterangan Ijin Penelitian	134



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu pembangunan utama sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah mengatasi masalah rendahnya kesejahteraan rakyat dengan pengertian lain bahwa masalah penanggulangan kemiskinan masih menjadi perhatian utama program-program pembangunan disaat ini dan masa yang akan datang (Winarno, 2015).

Masalah kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh masyarakat yang tinggal di kota-kota besar, tetapi juga dihadapi oleh masyarakat yang tinggal di perkampungan di pelosok-pelosok negara Indonesia. Perbandingan masyarakat miskin antara kota dan perkampungan, di kampung jumlah masyarakat miskin lebih besar dari pada di kota. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain bahwa daerah perkampungan merupakan daerah terisolir berbagai aktivitas ekonomi maupun sosial. Agar dapat membantu masyarakat miskin dari keterbelakangan ekonomi, pemerintah mengeluarkan Dana Respek. Di Papua upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan Rencana Strategi Pembangunan Kampung (RESPEK) yang merupakan pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional. Selain itu mendukung masyarakat untuk membangun kemampuan dirinya dimana, Rencana strategi pembangunan kampung dilakukan sendiri oleh instansi masyarakat yang ada di kampung tersebut (Pemerintah Provinsi Papua, 2008).

Pembangunan ekonomi daerah di era desentralisasi sedang menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal, seperti masalah kesenjangan dan iklim globalisasi. Hal ini menuntut tiap daerah untuk mampu bersaing di dalam dan luar negeri. Kesenjangan dan globalisasi berimplikasi kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk melaksanakan percepatan pembangunan ekonomi daerah secara terfokus melalui pengembangan produk/komoditi unggulan sesuai potensi bawaan maupun potensi yang merupakan hasil rekayasa manusia.

Percepatan pembangunan ekonomi secara terfokus ini bertujuan agar daerah tidak tertinggal dalam persaingan antara daerah baik secara ekonomi maupun sosial. Karena itu seluruh pelaku memiliki peran mengisi pembangunan ekonomi daerah dan harus mampu bekerjasama melalui bentuk pengelolaan keterkaitan antar sektor, antar program, antar pelaku, dan antar daerah, guna mendorong kemandirian ekonomi daerah.

Kemandirian ekonomi adalah suatu keadaan ekonomi rakyat yang semakin terpenuhi kebutuhannya secara lebih baik dan memadai seperti kebutuhan konsumsi dan gizi, pakaian yang cukup, perumahan yang sehat, kebutuhan biaya kesehatan dan pendidikan yang terpenuhi guna mencapai kesejahteraan kehidupan sesuai dengan cita-cita otonomi daerah. Kesejahteraan rakyat tersebut akan dapat tercapai dan terus ditingkatkan secara berkesinambungan oleh masyarakat itu sendiri dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimilikinya melalui peningkatan produksi setiap orang atau kelompok, yang dapat menciptakan peningkatan pendapatan.

Oleh karena itu guna terwujudnya program pemberdayaan ekonomi daerah maka diperlukan komitmen nyata dan sungguh-sungguh dengan suasana hati yang

berpihak dari pengambil keputusan dan pembina ekonomi daerah yang terfokus. Untuk mencapai “*kemandirian*” dari rakyat itu sendiri, maka rakyat harus didorong kearah *help for self help* yakni menolong dirinya sendiri, melalui peningkatan produksi, kelancaran pemasaran yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Peningkatan produksi tersebut akan memaksimumkan produksi (output/PDRB) dari berbagai sektor usaha ekonomi dan pada akhirnya akan tercipta pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan bertumbuhnya ekonomi melalui diversifikasi produk baik untuk konsumsi masyarakat setempat maupun untuk pasar regional, nasional dan global melalui pengembangan usaha agrobisnis dan agroindustri. Hal ini berarti akan terciptanya “*kemandirian ekonomi lokal*”.

Produk unggulan, dalam pengembangan ekonomi daerah adalah suatu komoditi yang dikembangkan berdasarkan sumberdaya yang tersedia di wilayah tersebut sehingga akan meningkatkan efisiensi biaya produksi dan pemasaran yang akan meningkatkan daya saing yang kompetitif dengan produk-produk impor. Dan diharapkan komoditi unggulan ini dikembangkan sebagai motor penggerak pengembangan ekonomi wilayah. Komoditi unggulan diharapkan mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan di sekitarnya.

Kemampuan bersaing ini lahir melalui pengembangan produk unggulan yang kompetitif di pasar domestik maupun global, yang didukung sumber daya manusia (*SDM*) unggul, riset dan teknologi, informasi, serta keunggulan pemasaran. Sementara itu dalam pelaksanaan di daerah khususnya di Kabupaten Yahukimo yang merupakan daerah pemekaran baru, konsep pengembangan komoditi unggulan belum secara efektif dikembangkan, sehingga dalam waktu

singkat kurang dapat diukur keberhasilannya. Maka dibutuhkan model-model pengembangan ekonomi daerah dengan pendekatan komoditi unggulan, yang memiliki konsep pengembangan yang terfokus dan terpadu, terutama berorientasi pada karakteristik potensi lokal.

Kabupaten Yahukimo yang merupakan salah satu kabupaten di kawasan pegunungan yang memiliki beberapa keunggulan baik letaknya yang strategis maupun komoditas unggulan dalam pelaksanaannya belum secara efektif dikembangkan. Hal ini terjadi dikarenakan oleh belum dilakukan identifikasi keunggulan yang ada, terutama komoditas unggulan, serta belum dilakukan kajian tentang keterkaitan berbagai komponen/variabel (*SDM, Aksesibilitas, kelembagaan*) yang mendukung pengembangan komoditas unggulan yang dimaksud. Program pengembangan wilayah telah banyak dikembangkan, namun kurang optimal, karena menekankan pada sisi pengelolaan *project oriented*, kurang terfokus pada kesinambungan program jangka panjang, serta terhadap masalah-masalah lainnya.

Kondisi tersebut di atas tentunya bukan tercipta dan berlangsung begitu saja akan tetapi melalui dimensi waktu serta melalui berbagai proses transformasi, adaptasi bahkan ada juga yang terjadi secara revolusi. Tercetusnya berbagai pandangan, ide, teori serta penafsiran terhadap perencanaan menjadikan perencanaan sebuah konsep yang kaya dan semakin fungsional. Sejalan dengan hal tersebut, tingginya perhatian maupun kajian orang-orang terhadap perencanaan tersebut memberikan efek positif terhadap penerimaan masyarakat tentang esensi dari sebuah perencanaan. Fenomena ini merupakan suatu dialektika yang meningkat dari keberadaan konsep perencanaan tersebut.

Hakekat yang terkandung dalam perencanaan lahir dan dibangun dengan nilai-nilai efisiensi dan dijadikan arah bagi yang membutuhkan serta memergunakannya dalam pencapaian suatu tujuan yang diinginkan. Akan tetapi seiring perjalanan waktu, perencanaan mengalami perkembangan-perkembangan baik secara teoritis maupun implikatifnya. Saat ini perencanaan dapat dikatakan menjadi salah satu nadi dalam perjalanan hidup manusia, sebab fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan kecenderungan bahwa dalam pergerakan sekecil apapun saat ini manusia (terutama aktivitas yang berhubungan dengan efek peningkatan atau perolehandan mencari keuntungan) tidak akan memiliki kepercayaan diri tanpa memiliki perencanaan terlebih dahulu. Manusia saat ini sudah mulai realistis dan objektif dimana hal ini ditunjukkan dengan semakin menurunnya praktek-praktek aktivitas yang hanya bersandar dan mengandalkan insting atau feeling. Hal ini tentunya merupakan suatu kecenderungan yang positif yang memberikan nilai positif bagi peningkatan kualitas hidup dan kehidupan manusia.

Untuk tercapainya tujuan penyusunan konsep pemberdayaan ekonomi kerakyatan yaitu peningkatan efisiensi dan daya saing yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidup dan permintaan pasar (*market driven*), maka sumberdaya yang dialokasikan pada sentra meliputi dukungan kebijakan untuk menciptakan iklim yang kondusif, dukungan finansial dalam bentuk modal awal pendanaan, dan dukungan non finansial berupa layanan pengembangan usaha serta pendidikan dan latihan serta pendampingan berkelanjutan. Dengan berbagai dukungan yang diberikan, terutama pengembangan usaha dan lembaga keuangan mikro yang terkait dengan lembaga keuangan modern yang saling bersinergi

dengan penguatan ekonomi lokal, maka diharapkan dapat langsung meningkatkan dinamika bisnis mereka. Terlebih lagi, secara kultural tidak akan mengalami perubahan budaya, karena sentra usaha mereka tetap berada di tempat semula.

Papua belakangan ini kembali mencuri perhatian publik nasional maupun internasional, karena terjadinya kelaparan massal di Yahukimo maupun karena terjadi penembakan terhadap warga sipil oleh anggota TNI di Paniai atau permintaan suaka politik ke Australia oleh 43 warga Papua. Peristiwa itu memperlihatkan bahwa agenda perbaikan nasib rakyat Papua seperti pemenuhan dan penegakan hak azasi manusia dan hukum melalui pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua belum dirasakan oleh masyarakat melalui penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan ekonomi sebagaimana yang diamanatkan dalam UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Untuk mencapai tujuan itu, maka ada bidang-bidang yang diberikan prioritas utama karena dengan tercapainya pembangunan dalam bidang-bidang tersebut akan mempercepat pembangunan dalam bidang-bidang lain sehingga akan meningkatkan kehidupan masyarakat di provinsi ini dapat hidup layak dan sejajar dengan masyarakat di daerah-daerah lain dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Masyarakat di Kabupaten Yahukimo yang merupakan bagian dari masyarakat di Provinsi Papua belum merasakan pelayanan pemerintah melalui pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.

Pemenuhan kebutuhan komunikasi dan transportasi membuka peluang usaha baru dalam bidang perdagangan dan jasa. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna *handphone* dan kendaraan bermotor, pusat-pusat penjualan *handphone* serta kendaraan bermotor pun dibuka. Jasa perbaikan *handphone* dan

kendaraan bermotor juga menjadi salah satu bidang usaha yang bukan hanya sebatas untuk memperoleh pendapatan, tetapi juga meningkatkan sumber daya manusianya. Hal ini disebabkan bidang usaha yang dikerjakan memerlukan keahlian khusus yang sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin modern ini. Sektor perdagangan di Kabupaten Yahukimo ini dapat berjalan dengan lebih lancar dengan kehadiran Bank Papua. Bank ini menjadi bagian dari sirkulasi keuangan sektor perdagangan dan sektor-sektor yang lainnya.

Respek (Rencana Strategis Pembangunan Kampung) bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat melalui pemberian modal usaha untuk pengembangan usaha ekonomi produktif yang mendukung kegiatan ekonomi pedesaan. Secara khusus sasaran respek adalah kelompok penduduk miskin melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, kemampuan permodalan, pengembangan usaha dan menanggulangi situasi dan kondisi yang menyebabkan timbulnya kemiskinan.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Khususnya pasal 15 dan pasal 34 memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat untuk menetapkan dan mengedalikan/mengarahkan pengelolaan dana penerimaan khusus dalam rangka Otsus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat, sehingga pemanfaatannya berdaya guna dan berhasil sesuai dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Papua.

Dengan memperoleh bantuan dana respek ini dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha masyarakat melalui usaha ekonomi produktif sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan tingkat kemiskinan

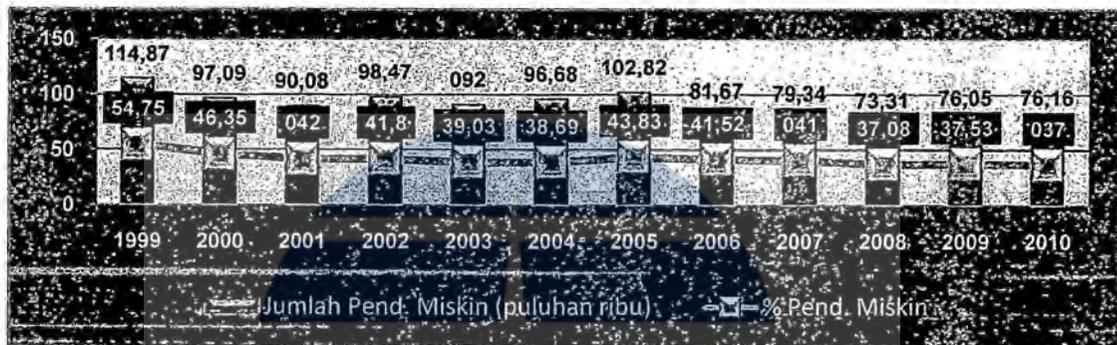
penduduk semakin berkurang. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui usaha-usaha ekonomi produktif, yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat kampung, sehingga kebutuhan dasar yaitu pangan, sedang, rumah, pendidikan, dan kesehatan dapat terpenuhi.

Masyarakat Kampung di lingkup Kabupaten Yahukimo salah satu yang menerima program Respek di Distrik Ubalih Kabupaten Yahukimo. Masyarakat kampung ini aktif dalam kegiatan Respek. Keaktifan masyarakat tampak terkait dengan program pemberdayaan ekonomi lokal, masyarakat Kampung yang telah berpartisipasi dengan cara mengembangkan kegiatan ekonomi, diantaranya bertani, beternak dan berdagang. Partisipasi masyarakat sejalan dengan tujuan pemberdayaan melalui Respek. Tentu saja pelaksanaan Respek tidak hanya melibatkan internal masyarakat tetapi juga adanya peran aktif dari pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Yahukimo.

Program pemerintah untuk menangani masalah kemiskinan telah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin meski mengalami naik turun, persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan selama 10 Tahun (1999-2009) cenderung menurun 17,95%, yaitu dari 54,75% di Tahun 1999 menjadi 36,80% di Tahun 2010. Ini berarti tujuan mengurangi proporsi penduduk miskin setengahnya dari Tahun 1990 atau sekitar 22% pada Tahun 2015 merupakan tantangan yang berat. Namun demikian jika dilihat capaian selama 10 Tahun terakhir dimana tingkat kemiskinan menurun hingga 17,95%. Pada Tahun 2010 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi sebanyak 36,80%. Namun demikian persentase penduduk miskin di Provinsi Papua masih lebih tinggi dari rata-rata Nasional, yaitu sebesar 14,15%. Kondisi tersebut menempatkan Papua pada

peringkat ke-33 dari 33 Provinsi di Indonesia. Khusus di Kabupaten Yahukimo berada pada urutan 13 tingkat kemiskinannya, garis kemiskinan 198.511, jumlah penduduk miskin (ribu org) 74,49, dengan persentase 49,61%. Berikut persentase penduduk miskin kabupaten/kota provinsi Papua.

Gambar 1.1.
Perkembangan Jumlah dan Presentase
Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan 1999-2010



Sumber : Papua Dalam Angka, 2010; Indikator Penting Provinsi Papua, September. 2011

Ket. : Data Tahun 2005 sudah dipisahkan antara Provinsi Papua dan Papua Barat.

Gambaran distribusi penduduk miskin pada Tahun 2009 di Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Distribusi Penduduk Miskin
Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2010

No.	Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin (ribu org)	% (Persen)
1	Merauke	212.148	26,51	15,44
2	Jayawijaya	223.114	45,41	46,39
3	Jayapura	290.401	20,42	20,77
4	Nabire	307.757	36,27	35,69
5	Kepulauan Yapen	307.044	27,90	36,13
6	Biak Numfor	317.590	39,49	36,51
7	Paniai	260.417	57,85	47,68
8	Puncak Jaya	305.754	34,37	46,92

9	Mimika	354.241	35,65	24,74
10	Boven Digoel	234.964	9,35	27,01
11	Mappi	184.264	24,41	34,94
12	Asmat	203.821	26,05	38,69
13	Yahukimo	198.511	74,49	49,61
14	Pegunungan Bintang	284.051	41,82	43,77
15	Tolikara	155.394	21,95	44,63
16	Sarmi	237.225	5,23	22,63
17	Keerom	298.989	11,53	25,57
18	Waropen	309.954	6,73	44,00
19	Supiori	229.260	6,23	50,66
20	Mamberamo Raya	323.282	8,79	44,43
21	Nduga	194.643	13,19	47,28
22	Lanny Jaya	233.929	27,39	47,73
23	Mamberamo Tengah	219.167	11,16	47,07
24	Yalimo	185.425	8,73	47,76
25	Puncak	315.061	23,99	49,20
26	Dogiyai	278.520	25,45	36,57
27	Deiyai			
28	Intan Jaya			
29	Kota Jayapura	463.629	39,05	17,87
	Provinsi Papua	282.776	709,39	34,77

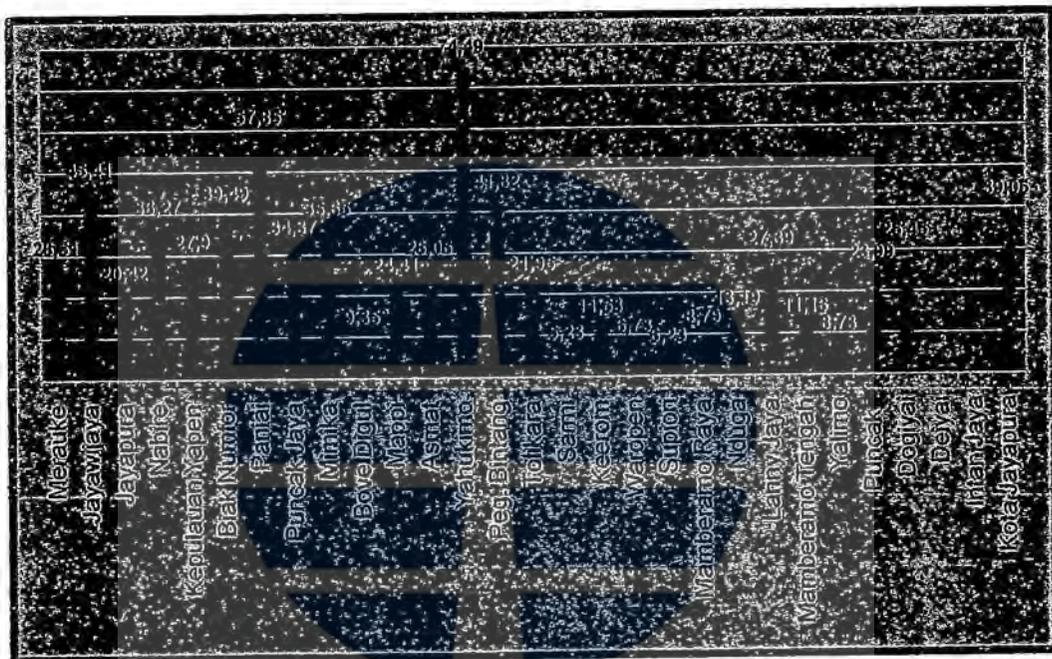
Sumber : Papua Dalam Angka, 2010.

Berdasarkan data kemiskinan Tahun 2010, tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota dikelompokkan menjadi Tiga kategori, yaitu:

1. Kabupaten/Kota yang tingkat kemiskinannya lebih rendah dibanding Provinsi sejumlah 15 Kabupaten, yaitu: Dogiyai, Yalimo, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Nduga, Supiori, Sarmi, Tolikara, Yahukimo, Asmat, Mappi, Boven Digoel, Paniai, Jayawijaya dan Merauke.
2. Kabupaten/Kota yang tingkat kemiskinannya di atas angka Provinsi sejumlah 12 Kabupaten/Kota, yaitu: Kota Jayapura, Puncak, Mamberamo Raya, Waropen, Keerom, Pegunungan Bintang, Mimika, Puncak Jaya, Biak Numfor, Kepulauan Yapen dan Nabire. Sedangkan Kabupaten Deiyai dan Intan Jaya data masih gabung dengan Kabupaten Induk.

Untuk memudahkan membandingkan penyebaran penduduk miskin antar Kabupaten/Kota berdasarkan tiga kategorisasi tersebut, ditampilkan dalam bentuk grafik berikut:

Gambar 1.2
Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Papua Tahun 2010



Sumber : Papua Dalam Angka, 2010.

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa konsentrasi kemiskinan lebih banyak di daerah pegunungan tengah dan wilayah kota. Tingginya kemiskinan di wilayah pegunungan tengah tidak terlepas dari rendahnya ketersediaan infrastruktur dan rendahnya akses pasar di wilayah-wilayah tersebut. Sedangkan kemiskinan di wilayah perkotaan disebabkan oleh tingginya arus migrasi yang tidak diikuti oleh ketersediaan lapangan kerja di daerah perkotaan di daerah perkotaan yang disebabkan masih terkonsentrasinya pertumbuhan ekonomi di wilayah perkotaan.

Kabupaten Yahukimo sebagai salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Papua jika dilihat dari data yang ada memiliki jumlah penduduk miskin yang paling tinggi di antara Kabupaten-kabupaten lainnya. Kemiskinan merupakan hal yang kompleks karena menyangkut berbagai macam aspek seperti hak untuk terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Agar kemiskinan di Kabupaten Yahukimo dapat menurun diperlukan keterlibatan semua unsur karena kunci utama dari upaya penanggulangan kemiskinan di daerah adalah terbangunnya serta melembaganya jaringan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dari tiga pilar yang ada di daerah. Pemerintah daerah (Pemda), masyarakat, dan kelompok peduli (LSM, swasta, perguruan tinggi, ulama/tokoh masyarakat, dan pers). Pemerintah Kabupaten Yahukimo dalam pengentasan kemiskinan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dijalankan oleh SKPD sebagai pelaksana dilapangan, penulis tertarik untuk meneliti evaluasi perencanaan program respect dalam mengurangi kemiskinan di Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Yahukimo.

Program dan kegiatan yang dijalankan, apakah sesuai dengan rencana awal dengan hasil kenyataan yang didapat. Perencanaan Program dan Kegiatan semakin efektif jika tingkat kekeliruan atau kesalahan yang terjadi rendah. Begitu pula sebaliknya semakin tinggi tingkat kesalahan dari pada rencana awal, maka semakin tidak efektif. Efektifitas adalah suatu ukuran tentang bagaimana suatu target atau sasaran yang telah ditentukan tercapai yang mengacu pada hasil akhir. Hasil akhir adalah tujuan utama. Semakin mencapai target yang ditentukan maka Efektifitasnya semakin baik. Melihat kondisi Kabupaten Yahukimo yang masih memiliki angka kemiskinan tinggi, penulis tertarik untuk mengangkat masalah

kemiskinan di Kabupaten Yahukimo dan penanggulangannya dengan pendekatan mengevaluasi perencanaan yang tepat sasaran bagi masyarakat miskin.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, rumusan masalah akan mendeskripsikan Evaluasi Perencanaan Program Respek pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dalam Mengurangi Kemiskinan di Kabupaten Yahukimo.

1. Bagaimanakah evaluasi input perencanaan program respek dalam mengurangi kemiskinan di Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Yahukimo?
2. Bagaimanakah evaluasi proses perencanaan program respek dalam mengurangi kemiskinan di Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Yahukimo?
3. Bagaimanakah evaluasi output perencanaan program respek dalam mengurangi kemiskinan di Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Yahukimo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis evaluasi input perencanaan program respek dalam mengurangi kemiskinan di Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Yahukimo.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis evaluasi proses perencanaan program respect dalam mengurangi kemiskinan di Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Yahukimo.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis evaluasi output perencanaan program respect dalam mengurangi kemiskinan di Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Yahukimo.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan baik secara teoritis dan praktis, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam evaluasi perencanaan program respect dilihat dari input, proses, dan output dalam mengurangi kemiskinan di Kabupaten Yahukimo.

2. Kegunaan Praktis

Aspek praktis, kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk memberikan kontribusi dalam menganalisis evaluasi perencanaan program respect pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung di Kabupaten Yahukimo.
- b. Sebagai bahan referensi pemerintah daerah dan penelitian selanjutnya yang ingin mengetahui dan menganalisis evaluasi perencanaan program respect pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung di Kabupaten Yahukimo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kajian Teori Evaluasi

Evaluasi merupakan proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan, atau program. Evaluasi adalah sebuah penilaian yang seobyektif dan sesistematis mungkin terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung atau pun yang telah diselesaikan. Evaluasi menurut PP 39/2006, adalah Rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan. Masukan untuk perencanaan yang akan datang. evaluasi menunjukkan kepada atau mengandung pengertian suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu.

Menurut PP 39/2006, disebutkan bahwa Monitoring merupakan kegiatan rutin, sedang berjalan dan internal, dipergunakan untuk mengumpulkan informasi terhadap keluaran, hasil dan indikator yang akan dipergunakan untuk Mengevaluasi kinerja program. Evaluasi dilakukan secara periodik dan berkala, menganalisis data yang telah diperoleh dari monitoring untuk memberikan penilaian atas pelaksanaan rencana, dan sebagai umpan balik periodik kepada pemangku kepentingan utama.

Sedangkan menurut Daryanto (2008:1) *evaluation is the process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives*. Evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan.

Arikunto (2004:1) memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Evaluasi adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektifitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penetapan keputusan itu didasarkan atas perbandingan secara hati-hati terhadap data yang diobservasi dengan menggunakan standar tertentu yang telah dibakukan. Arikunto (2004:16) mendefinisikan bahwa evaluasi adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan program sudah dapat terealisasi.

Pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, melalui tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan (*ex ante*). Tahapan dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan, tahapan ini untuk melihat rasionalitas pilihan, target dan kesuaian antar dokumen perencanaan.
2. Tahap Pelaksanaan (*on going*). Tahapan dilakukan saat pelaksanaan Kegiatan, tahapan ini untuk menjamin kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Tahap Pasca Pelaksanaan (*ex post*). Tahapan dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir. Bertujuan untuk menilai pencapaian (keluaran/ hasil/ dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan, serta untuk menilai efisiensi, efektivitas dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat dari suatu program.

Evaluator adalah pihak (perseorangan/kelompok) yang melakukan evaluasi pelaksanaan suatu kegiatan. Jenis evaluator yaitu :

1. Evaluatur Internal : biasanya mengetahui lebih banyak mengenai Sejarah, organisasi, budaya, problem, keberhasilan dan mungkin berada terlalu dekat dengan yang dievaluasi.
2. Evaluatur Eksternal : Punya kredibilitas yang lebih tinggi dan keahlian yang lebih spesifik, dan tidak terikat dengan keputusan-keputusan administratif dan keuangan.
3. Evaluatur Independen: terbebas dari pengaruh apapun, tidak Fokus dan Politis.
4. Evaluatur Partisipatif : sebuah langkah lebih radikal keluar dari model evaluasi mandiri, wakil dari pemangku kepentingan (termasuk penerima manfaat) bekerjasama merancang, melaksanakan dan menerjemahkan sebuah evaluasi, evaluatur eksternal bertindak sebagai fasilitator dan instruktur, tidak ada Sub-ordinasi (Atasan – Bawahan), evaluatur eksternal lebih fokus pada membuat penilaian.

Yang dilakukan oleh Evaluatur antara lain: merencanakan evaluasi, melaksanakan atau menjalankan evaluasi (atau mempekerjakan staf untuk melaksanakan evaluasi), berkonsultasi dan berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan (Tidak ada sub-ordinasi), mengidentifikasi standar efektifitas, mencari, mengumpulkan, menganalisa, menginterpretasikan dan melaporkan data serta temuan, memberikan rekomendasi, mengelola anggaran evaluasi dan mengembangkan teori perubahan/Evaluasi.

Evaluasi berdasar SPPN Pasal 29 UU No 25/2004 Tentang SPPN: Pimpinan Kementerian/Lembaga melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Kementerian/Lembaga periode sebelumnya dan Pimpinan Satuan

Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya. Adapun proses Evaluasi Pasal 29 UU No 25/2004 Tentang SPPN: Menteri/ Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan Kementerian/ Lembaga dan evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Manfaat Evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Nasional/ Daerah untuk periode berikutnya.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauhmana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sejauhmana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

a. Tujuan Evaluasi Kebijakan

Tujuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, antara lain:

1. Untuk menjamin terlaksananya kebijakan, program dan proyek sesuai dengan target dan rencana yang telah ditetapkan;
2. Agar ada umpan balik terhadap kebijakan, program dan proyek, untuk diteruskan dilanjutkan dengan perbaikan atau dihentikan;
3. Untuk membantu pemangku kepentingan belajar lebih banyak mengenai kebijakan, program dan proyek.
4. Agar kebijakan, program dan proyek mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik (akuntabilitas).

Menurut Sudjana (2006:48), tujuan dilaksanakan evaluasi adalah untuk:

1. Memberikan masukan bagi perencanaan program;
2. Menyajikan masukan bagi pengambil keputusan yang berkaitan dengan tindak lanjut, perluasan atau penghentian program;
3. Memberikan masukan bagi pengambilan keputusan tentang modifikasi atau perbaikan program
4. Memberikan masukan yang berkenaan dengan faktor pendukung dan penghambat program;
 - a. Memberi masukan untuk kegiatan motivasi dan pembinaan (pengawasan, supervisi dan monitoring) bagi penyelenggara, pengelola dan pelaksana program dan.
 - b. Menyajikan data tentang landasan keilmuan bagi evaluasi program pendidikan luar sekolah.

Lebih khusus lagi, Badjuri dan Yuwono (2002:132) mengatakan evaluasi kebijakan setidaknya ada tiga tujuan utama, yaitu:

1. Untuk menguji apakah kebijakan yang diimplementasikan telah mencapai tujuan?
2. Untuk menunjukkan akuntabilitas pelaksana publik terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan;
3. Untuk memberikan masukan pada kebijakan-kebijakan publik yang akan datang.

Tidak hanya itu, menurut Nugroho (2009:535-536), tujuan pokok evaluasi bukanlah untuk menyalah-nyalahkan, melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya bagaimana mengurangi atau menutup

kesenjangan tersebut. Jadi evaluasi kebijakan publik harus dipahami sebagai sesuatu yang bersifat positif

b. Indikator Evaluasi

Menurut Badjuri dan Yuwono (2002: 138) mengacu pada empat indikator pokok yaitu *input*, *process*, *outputs* dan *outcomes*. Masing-masing indikator tersebut akan dijelaskan berikut ini:

1. Indikator *input* (masukan)

Indikator input menfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator ini terdiri atas sumber daya manusia, uang, atau infrastruktur pendukung lainnya.

2. Indikator *process* (proses)

Indikator proses menfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini terdiri atas aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu.

3. Indikator *outputs* (hasil)

Indikator hasil, menfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu.

4. Indikator *outcomes* (dampak)

Indikator dampak menfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan. Apakah kerusakan lingkungan dapat diminimalisasi dalam jangka lama.

B. Kajian Teori Perencanaan

Usaha pencapaian tujuan program dalam sebuah organisasi harus selalu diupayakan oleh pihak manajemen. Upaya tersebut dimulai dari menyusun rencana strategis jangka panjang 5 tahunan yang memuat penetapan visi, misi dan tujuan organisasi. Visi, misi dan tujuan strategis organisasi merupakan komitmen bersama seluruh warga di dalam organisasi untuk mewujudkannya. Rencana strategis selanjutnya dijabarkan dalam rencana operasional satu tahunan yaitu dengan menjabarkan Visi, misi dan tujuan menjadi sasaran jangka pendek dan program-program kegiatan.

Berbagai program yang telah dan akan dilaksanakan memerlukan peningkatan kinerja pimpinan dan staf organisasi baik dalam sistem perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasinya. Keberhasilan suatu program dapat dilihat dari kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaannya, terukur atau akuntabel hasilnya, serta ada keberlanjutan aktivitas yang merupakan dampak dari program itu sendiri. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) maka keberhasilan, dampak dan kendala pelaksanaan suatu program dapat diketahui. Ditinjau dari aspek pelaksanaan, monev memerlukan keterampilan petugas. Petugas adalah seorang evaluator yang terampil untuk mengumpulkan berbagai data yang sesuai dengan tujuan monitoring dan evaluasi. Selain itu, kejujuran, keuletan, dan penguasaan pengetahuan tentang monitoring dan evaluasi menjadi tutuan

kualifikasi petugas. Bila ditinjau dari aspek sistem monitoring dan evaluasi, maka staf yang terlibat dalam kegiatan ini harus mampu merencanakan, menyiapkan, melaksanakan dan melaporkan seluruh kegiatan monitoring dan evaluasi.

Monev yang dilakukan oleh petugas yang profesional, dan didukung dengan instrumen yang baku akan dapat diperoleh data obyektif. Data obyektif yang dianalisis dengan teknik yang tepat akan didapatkan informasi yang terpercaya untuk dasar pengambilan keputusan manajemen. Sehingga keputusan yang diambil tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berbagai hal tentang pengetahuan monev, perencanaan dan persiapan, serta pelaporan. Ruang lingkup dan sistematika pembahasan ini dimulai dari pertama, pendahuluan yaitu latar belakang, tujuan dan manfaat. Kedua, membicarakan tentang pengetahuan monev yang membahas dari hakekat, prinsip, dan model-model monev. Ketiga, memandu bagaimana merencanakan kegiatan monev, yaitu membahas desain, ruang lingkup, penentuan model, instrumen, analisis data, sampai dengan membuat kesimpulan dan rekomendasi. Sedangkan keempat, membahas bagaimana membuat pelaporan dan desiminasi dari suatu kegiatan monev.

Perencanaan tidak lain merupakan kegiatan untuk menetapkan tujuan yang akan dicapai beserta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh Louise E. Boone dan David L. Kurtz (1984) bahwa: *planning may be defined as the proses by which manager set objective, asses the future, and develop course of action designed to accomplish these objective*. Sedangkan Handoko (1995) mengemukakan bahwa :

“Perencanaan (*planning*) adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan”.

Pembuatan keputusan banyak terlibat dalam fungsi ini.” Arti penting perencanaan terutama adalah memberikan kejelasan arah bagi setiap kegiatan, sehingga setiap kegiatan dapat diusahakan dan dilaksanakan seefisien dan seefektif mungkin. T. Hani Handoko (2000) mengemukakan sembilan manfaat perencanaan bahwa perencanaan: (a) membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan; (b) membantu dalam kristalisasi persesuaian pada masalah-masalah utama; (c) memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran; (d) membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat; (e) memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi; (f) memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi; (g) membuat tujuan lebih khusus, terperinci dan lebih mudah dipahami; (h) meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti; dan (i) menghemat waktu, usaha dan dana.

Sudarmo dan Mulyono (1996) mengemukakan langkah-langkah pokok dalam perencanaan, yaitu :

1. Penentuan tujuan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut : (a) menggunakan kata-kata yang sederhana, (b) mempunyai sifat fleksibel, (c) mempunyai sifat stabilitas, (d) ada dalam pertimbangan sumber daya, dan (e) meliputi semua tindakan yang diperlukan.
2. Pendefinisian gabungan situasi secara baik, yang meliputi unsur sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya modal.
3. Merumuskan kegiatan yang akan dilaksanakan secara jelas dan tegas.

Hal senada dikemukakan Handoko (1995) bahwa terdapat empat tahap dalam perencanaan, yaitu : (a) menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan; (b) merumuskan keadaan saat ini; (c) mengidentifikasi segala kemudahan dan

hambatan; (d) mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan.

Pada bagian lain, Sudarmo dan Mulyono (1996) mengemukakan bahwa atas dasar luasnya cakupan masalah serta jangkauan yang terkandung dalam suatu perencanaan, maka perencanaan dapat dibedakan dalam tiga bentuk, yaitu : (1) rencana global yang merupakan penentuan tujuan secara menyeluruh dan jangka panjang, (2) rencana strategis merupakan rencana yang disusun guna menentukan tujuan-tujuan kegiatan atau tugas yang mempunyai arti strategis dan mempunyai dimensi jangka panjang, dan (3) rencana operasional yang merupakan rencana kegiatan-kegiatan yang berjangka pendek guna menopang pencapaian tujuan jangka panjang, baik dalam perencanaan global maupun perencanaan strategis.

Perencanaan strategik akhir-akhir ini menjadi sangat penting sejalan dengan perkembangan lingkungan yang sangat pesat dan sangat sulit diprediksikan, seperti perkembangan teknologi yang sangat pesat, pekerjaan manajerial yang semakin kompleks, dan percepatan perubahan lingkungan eksternal lainnya.

Pada bagian lain, Handoko (2000) memaparkan secara ringkas tentang langkah-langkah dalam penyusunan perencanaan strategik, sebagai berikut:

1. Penentuan misi dan tujuan, yang mencakup pernyataan umum tentang misi, falsafah dan tujuan. Perumusan misi dan tujuan ini merupakan tanggung jawab kunci manajer puncak. Perumusan ini dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dibawakan manajer. Nilai-nilai ini dapat mencakup masalah-masalah sosial dan etika, atau masalah-masalah umum seperti macam produk atau jasa yang akan diproduksi atau cara pengoperasian organisasi.

2. Pengembangan profil organisasi, yang mencerminkan kondisi internal dan kemampuan organisasi dan merupakan hasil analisis internal untuk mengidentifikasi tujuan dan strategi sekarang, serta memerinci kuantitas dan kualitas sumber daya -sumber daya organisasi yang tersedia. Profil organisasi menunjukkan kesuksesan organisasi di masa lalu dan kemampuannya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagai implementasi strategi dalam pencapaian tujuan di masa yang akan datang.
3. Analisa lingkungan eksternal, dengan maksud untuk mengidentifikasi cara-cara dan dalam apa perubahan-perubahan lingkungan dapat mempengaruhi organisasi. Disamping itu, organisasi perlu mengidentifikasi lingkungan lebih khusus, seperti para penyedia, pasar organisasi, para pesaing, pasar tenaga kerja dan lembaga-lembaga keuangan, di mana kekuatan-kekuatan ini akan mempengaruhi secara langsung operasi organisasi.

Meski pendapat di atas lebih menggambarkan perencanaan strategik dalam konteks bisnis, namun secara esensial konsep perencanaan strategik ini dapat diterapkan pula dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, khususnya pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Yahukimo, karena program respek yang dilaksanakan di kabupten Yahukimo sedang menghadapi berbagai tantangan internal maupun eksternal, sehingga membutuhkan perencanaan yang benar-benar dapat menjamin pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Kegiatan perencanaan memiliki ruang lingkup yang sangat luas terkait demensi waktu, spasial, dan tingkatan dan teknis perencanaannya. Namun

demikian ketiga dimensi tersebut saling kait-terkait dan beriteraksi. Masing-masing dimensi tersebut adalah sebagai berikut;

1. Perencanaan dari dimensi waktu

Dari dimensi waktu perencanaan mencakup; (a) Perencanaan jangka panjang (*long term planning*) berjangka 10 tahun keatas, bersifat prospektif, idealis dan belum ditampilkan sasaran-sarana yang bersifat kualitatif. (b) Perencanaan jangka menengah (*medium term planning*) berjangka 3 sampai 8 tahun, merupakan penjabaran dan uraian rencana jangka panjang. Sudah ditampilkan sasaran-sasaran yang diproyksikan secara kuantitatif, meski masih bersifat umum. (c) Perencanaan jangka pendek (*sort term planning*) berjangka 1 tahunan disebut juga perencanaan jangka pendek tahunan (*annual plan*) atau perencanaan operasional tahunan (*annual opperasional planning*)

2. Perencanaan dari dimensi spasial

Perencanaan ini terkait dengan ruang dan batas wilayah yang dikenal dengan perencanaan nasional (berskala nasional), regional (berskala daerah atau wilayah), perencanaan tata ruang dan tata tanah (pemanfaatan fungsi kawasan tertentu).

3. Perencanaan dari dimensi tingkatan teknis perencanaan

Dalam dimensi ini kita mengenal istilah (a) perencanaan makro (b) perencanaan mikro (c) perencanaan sektoral (d) perencanaan kawasan dan (e) perencanaan proyek. Perencanaan makro meliputi peningkatan pendapatan nasional, tingkat konsumsi, investasi pemerintah dan masyarakat, ekspor impor, pajak, perbankan dsb. Perencanaan mikro disusun dan disesuaikan dengan kondisi daerah. Perencanaan kawasan memperhatikan keadaan lingkungan kawasan

tertentu sebagai pusat kegiatan dengan keunggulan komparatif dan kompetitif. Perencanaan proyek adalah perencanaan operasional kebijakan yang dapat menjawab siapa melakukan apa, dimana, bagaimana dan mengapa.

4. Perencanaan demensi jenis

Menurut Anen (2000) sebagaimana dikutip Syaiful sagala meliputi ; (a) Perencanaan dari atas ke bawah (*top down planning*), (b) perencanaan dari bawah ke atas (*botton up planning*), (c) perencanaan menyerong kesamping (*diagonal planning*), dibuat oleh pejabat bersama dengan pejabat bawah diluar struktur (d) perencanaan mendatar (*horizontal planning*), yaitu perencanaan lintas sektoral oleh pejabat selevel (e) perencanaan menggelinding (*rolling planning*) berkelanjutan mulai rencana jangka pendek, menengah dan panjang (f) perencanaan gabungan atas ke bawah dan bawah ke atas (*top down and button up planning*), untuk mengakomodasi kepentingan pusat dengan wilayah/daerah.

Konsep perencanaan pembangunan seperti yang telah dikemukakan terdahulu bahwa pembangunan bertujuan untuk mewujudkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas baik dalam bentuk materi maupun non-materi. Jadi pembangunan adalah suatu hal yang kompleks, dimana pembangunan meliputi perubahan-perubahan sosial yang besar. Hal tersebut seringkali mengakibatkan adanya frustrasi, alienasi, kegoncangan dalam identitas dan lain-lain. Dengan demikian perencanaan pembangunan itu menjadi penting. Sebuah perencanaan dalam pembangunan adalah untuk dilihat dari berbagai pengertian dan defenisi dari perencanaan yang dikemukakan oleh beberapa ahli perencanaan. Seperti yang dikemukakan oleh Kuncoro (2010), bahwa perencanaan

pembangunan merupakan perencanaan yang bertujuan untuk memperbaiki penggunaan berbagai sumber daya publik yang tersedia dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber-sumber daya swasta secara bertanggung jawab demi kepentingan pembangunan masyarakat secara menyeluruh.

Riant Nugroho (2010), mengatakan bahwa dalam pembangunan, perencanaan pembangunan menjadi kunci, karena sesungguhnya ini adalah pekerjaan yang maha rumit. Seperti diketahui, istilah “pembangunan” adalah istilah khas dari proses rekayasa sosial (dalam arti luas, termasuk ekonomi, politik, kebudayaan, dan sebagainya) yang dilaksanakan oleh negara-negara berkembang. Perencanaan ini dikemukakan oleh Ginandjar Kartasasmita (2011) yang mengatakan bahwa perencanaan pembangunan merupakan tugas pokok dalam administrasi atau manajemen pembangunan. Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada.

Berdasarkan asas dan tujuan pembangunan maka diperlukan suatu proses perencanaan yang mampu mengakomodasikannya. Pengertian proses perencanaan pembangunan secara umum adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara rasional yang menghasilkan suatu atau beberapa kebijakan yang dapat dijadikan pedoman dalam pembangunan yang akan dilakukan. Sebuah perencanaan dalam pembangunan dikemukakan oleh T. Hani Handoko (2011) mengatakan ada dua alasan dasar perlunya perencanaan.

1. Perencanaan dilakukan untuk mencapai "*protective benefits*" yang dihasilkan dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan,
2. Perencanaan dilakukan untuk mencapai "*positive benefits*" dalam bentuk meningkatnya sukses pencapaian tujuan organisasi.

Perencanaan memerlukan pendalaman dari berbagai aspek dan dimensi serta unsur yang terkait dalam sistem perencanaan yang ada. Hal ini sangat berguna demi menghindari timbulnya pragmatisme dalam memandang suatu perencanaan dan juga untuk meminimalisir pertentangan, kesalahpahaman atau kontradiksi pandangan terhadap keberadaan dan perkembangan perencanaan yang ada saat ini. Akan tetapi dalam hal ini juga bukan untuk membenarkan atau mengupayakan adanya penyeragaman unsur-unsur yang terkandung dalam perencanaan yang ada saat ini. Sebab keberadaan dan perkembangan dan hakikat perencanaan yang ada saat ini merupakan suatu hasil proses dialektika pemikiran-pemikiran manusia, serta merupakan aktualisasi dan apresiasi ide-ide manusia yang memiliki daya pikir dan daya respon serta penghargaan yang tinggi terhadap suatu hal/fenomena dimana dalam konteks ini objeknya adalah perencanaan.

Dalam pembahasan konsep perencanaan pembangunan, berikut akan dipaparkan konsep perencanaan pembangunan menurut ilmu politik, ilmu ekonomi, dan ilmu administrasi.

Salah satu domain ilmu politik adalah membicarakan konsep pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan publik, yang menyangkut proses menentukan dan sekaligus melaksanakan tujuan-tujuan Negara serta penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih tersebut.

Dalam ilmu politik, perencanaan merupakan proses konsensus antara kelompok-kelompok warga Negara dan juga konsensus antara negara yang diperankan oleh pemerintah dan warga negaranya. Pembangunan diperlukan oleh warga Negara (publik) karena publik membutuhkan keputusan publik dalam bentuk intervensi pembangunan dari elemen negara, yang dalam hal ini adalah kepala pemerintah. Peran negara, menurut paham negara kesejahteraan (*welfare state*), sesungguhnya adalah menjamin kemakmurn warga negaranya.

Perencanaan pembangunan diperlukan agar kesejahteraan dinikmati oleh seluruh warga negara. Berdasarkan analisis sistem politik dapat dinyatakan bahwa ketika kebutuhan publik untuk memenuhi kesejahteraannya tidak tercapai, warga negara dapat mengajukan keberatan (tuntutan). Dengan demikian, negara dapat mengulang kembali perencanaannya.

Perencanaan Pembangunan dalam Konsep administrasi pembangunan menawarkan pendekatan pilihan publik, yang merupakan instrument pokok dalam administrasi pembangunan yang dikonstruksikan dari pendekatan administrasi negara yang diterapkan di negara berkembang. Dalam ilmu administrasi, fokus perhatian perencanaan pembangunan diletakkan pada cara yang paling efektif untuk menyalurkan manfaat pembangunan, yang telah ditentukan secara terukur melalui pendekatan ilmu politik dan ilmu ekonomi. Konsep ini dikenal sebagai mekanisme penyaluran (*delivery mechanism*).

Menurut sudut pandang Ilmu Adminstrasi, terdapat tiga asumsi agar perencanaan pembangunan dapat berlangsung dengan baik, yaitu:

a. **Kepemimpinan Pembangunan**

Kepemimpinan merupakan faktor penentu munculnya pengambilan keputusan yang baik, yang akan menentukan mutu perencanaan pembangunan, sebagai syarat untuk mencapai keberhasilan pencapaian tujuan perencanaan.

b. **Manajemen Sumber Daya Pembangunan**

Sumber daya pembangunan merupakan aspek utama untuk menentukan perencanaan pembangunan. Hal ini berangkat dari keyakinan bahwa sistem dari peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman dirancang untuk menjamin adanya keseragaman dalam setiap pelaksanaan tugas - terlepas dari berapa pun banyaknya pegawai yang terlibat di dalamnya dan untuk mengoordinasikan tugas-tugas yang beraneka ragam.

c. **Prosedur Perencanaan**

Prosedur Perencanaan merupakan langkah-langkah terstruktur yang dimulai dari langkah pengumpulan data, penyusunan informasi, perumusan kebutuhan, penilaian anggaran, pengambilan keputusan, pelaksanaan keputusan, pengendalian pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi hasil, pelaporan, analisis dampak, hingga diawali lagi dari pengumpulan data dan seterusnya sebagai suatu siklus. Langkah-langkah ini merupakan faktor penentu keberhasilan pencapaian tujuan perencanaan pembangunan.

C. Kajian Program Respek

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam

rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Subarsono, 2005).

Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas (Supriatna, 1997).

Makna implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang

mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Subarsono, 2005).

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplmentasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.

Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

Tujuan Rencana Strategi Pembangunan Kampung (Respek) yaitu :

a. Tujuan Umum

Mempercepat penanggulangan kemiskinan secara berkesinambungan menuju kemandirian masyarakat dengan cara meningkatkan potensi dan kapasitas masyarakat serta kemampuan kelembagaan milik masyarakat untuk mewujudkan program pokok dari konsep pembangunan yang berpusatkan kepada manusia yaitu: Pangan dan Gizi, Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi rakyat, dan infrastruktur dasar.

b. Tujuan Khusus

1. Mewujudkan keberadaan manusia baik individu, keluarga maupun masyarakat adat serta kaum perempuan Papua yang berada/menetap di

wilayah Distrik dan Kampung, terutama kapasitas pengetahuan, sikap mental dan keterampilan.

2. Mewujudkan kondisi kehidupan sosial, ekonomi, politik, hukum, serta budaya masyarakat Papua di wilayah Distrik dan Kampung yang berkembang maju kearah kondisi kehidupan yang lebih baik dan mandiri.
3. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Papua serta kaum perempuan Papua meliputi makanan dan gizi, kesehatan, ekonomi lokal maupun sarana dan prasarana dasar.
4. Meningkatkan potensi dan kapasitas masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian.
5. Meningkatkan kemampuan kelembagaan milik rakyat di kampung untuk memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat dalam program pembangunan.
6. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat kampung melalui kegiatan Makanan dan Gizi, Ekonomi lokal, Kesehatan, Pendidikan dan infrastruktur dasar.

Sasaran dan Lokasi Program Respek yaitu :

1. Sasaran utama penerima program adalah penduduk kurang mampu menurut pendapat rakyat di kampung sendiri. Keputusannya ditetapkan melalui proses Perencanaan Bersama Masyarakat (PBM).
2. Sasaran lokasi penerima program adalah seluruh Kampung, yaitu Kampung yang telah teregistrasi atau disahkan melalui ketetapan peraturan/perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan pada jumlah penduduk

yang ada. Kampung yang belum ditetapkan secara resmi dan jumlah penduduknya sedikit harus bergabung dengan Kampung induk.

D. Kajian Konsep Pembangunan

Dalam pemahaman sederhana pembangunan diartikan sebagai proses perubahan kearah yang lebih baik, melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan dalam sebuah negara sering dikaitkan dengan pembangunan ekonomi (*economic development*). Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya peningkatan jumlah dan produktifitas sumber daya, termasuk penambahan penduduk, disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara serta pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sumitro (2016:89), bahwa proses pembangunan ekonomi harus merupakan proses pembebasan, yaitu pembebasan rakyat banyak dari belenggu kekuatan-kekuatan ekonomi, dan pembebasan negara-negara berkembang dari belenggu tata kekuatan ekonomi dunia.

Menelaah pembangunan dalam masyarakat sebagai proses pertumbuhan dan perubahan, yaitu suatu proses yang menggambarkan dinamika dalam masyarakat adalah hal yang baru dalam sejarah. Seperti yang diketahui bahwa pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya, dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar dan pedomannya. Pembangunan nasional dilaksanakan secara merata diseluruh tanah air diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai upaya perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial sesuai dengan tujuan dan cita-cita dari kemerdekaan

bangsa Indonesia, seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia IV. Pelaksanaan pembangunan nasional merupakan usaha kegiatan yang dilakukan secara sadar, terencana dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan kearah perubahan-perubahan yang lebih baik yakni kesejahteraan dan kemakmuran yang merata bagi rakyat yang adil.

Sebagaimana sebuah teori, Modernisasi memiliki asumsi dasar yang menjadi pangkal hipotesisnya dalam menawarkan rekayasa pembangunan yaitu:

1. Kemiskinan dipandang oleh Modernisasi sebagai masalah internal dalam sebuah negara. Kemiskinan dan problem pembangunan yang ada lebih merupakan akibat dari keterbelakangan dan kebodohan internal yang berada dalam sebuah negara, bukan merupakan problem yang dibawa oleh faktor dari luar negara. Jika ada seorang warga yang miskin sehingga ia tidak mampu mencukupi kebutuhan gizinya, maka penyebab utama dari fakta tersebut adalah orang itu sendiri dan negara dimana orang tersebut berada, bukan disebabkan orang atau negara lain. Artinya, yang paling pantas dan layak melakukan penyelesaian masalah atas kasus tersebut adalah orang dan negara dimana orang itu berada, bukan negara lain.
2. Muara segala problem adalah kemiskinan, pembangunan berarti perang terhadap kemiskinan. Jika pembangunan ingin berhasil, maka yang kali pertama harus dilakukan adalah menghilangkan kemiskinan dari sebuah negara. Cara paling tepat menurut Modernisasi untuk menghilangkan kemiskinan adalah dengan ketersediaan modal untuk melakukan investasi. Semakin tinggi tingkat investasi di sebuah negara, maka secara otomatis, pembangunan telah berhasil, (Mansour Fakh, 2012:44-47).

Dari beberapa definisi tersebut, modernisasi dapat dipahami sebagai sebuah upaya tindakan menuju perbaikan dari kondisi sebelumnya. Selain upaya, modernisasi juga berarti proses yang memiliki tahapan dan waktu tertentu dan terukur.

Motivasi teori modernisasi untuk merubah cara produksi masyarakat berkembang sesungguhnya adalah usaha merubah cara produksi pra-kapitalis ke kapitalis, sebagaimana negara-negara maju sudah menerapkannya untuk ditiru. Selanjutnya dalam teori dependensi yang bertolak dari analisa Marxis, dapat dikatakan hanyalah mengangkat kritik terhadap kapitalisme dari skala pabrik (majikan dan buruh) ke tingkat antar negara (sentral dan pinggiran), dengan analisis utama yang sama yaitu eksploitasi. Demikian halnya dengan teori sistem dunia yang didasari teori dependensi, menganalisis persoalan kapitalisme dengan satuan analisis dunia sebagai hanya satu sistem, yaitu sistem ekonomi kapitalis.

a. Pengertian pembangunan non fisik

Pembangunan fisik dan non fisik, adalah Keduanya berhubungan dan tidak bisa saling dipisahkan. Ibarat mata uang, keduanya merupakan sisi-sisi mata uang yang tidak bisa dilepas dan saling berhubungan. Aspek fisik berhubungan dengan wadah (*container*) yang terdiri dari alam di sekitar kita (*nature*) dan rumah (*shell*) yang didiami makhluk hidup, kemudian aspek non fisik merupakan isi (*content*) yang terdiri dari manusia (*man*), jaringan (*network*), dan masyarakat (*society*) (Doxiadis, 1968 dalam Soetomo, 2009). Selanjutnya jika kita lihat karakter kota menurut Kostof (Soetomo, 2009) maka salah satu karakter kota terbentuk dari bangunan dan manusia (*cities are made up of buildings and people*).

Selanjutnya, apa hakekat pembangunan sebenarnya? Hakekat itu dapat kita turunkan dari definisi pembangunan itu sendiri. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat dengan lebih baik. Merujuk pada definisi tersebut, hakekat pembangunan sebenarnya adalah pemenuhan kebutuhan dan dalam konteks yang lebih riil adalah peningkatan kesejahteraan yang baik. Kesejahteraan menjadi inti dari pembangunan yang selama ini didengung-dengungkan, karena pada dasarnya objek pembangunan itu sendiri adalah manusia yang berperan sebagai penikmat sekaligus pelaksana pembangunan. Jika kesejahteraan manusia terjamin maka besar kemungkinan keberlanjutan lingkungan hidup akan terjamin begitupula sebaliknya.

Pembangunan nonfisik seperti pengembangan koperasi, home industri, UKM, pasar tradisional, pariwisata dan mendirikan sekolah dan lain-lain. "Saya menilai, pembangunan fisik seperti pengaspalan jalan, drainase dan pembangunan pemukiman rumah penduduk di Kampung .

b. Pembangunan Fisik

Pembangunan adalah segenap proses penyelenggaraan kegiatan kehidupan masyarakat yang sedang berkembang dan diarahkan kepada tercapainya tujuan-tujuan pembangunan terutama bidang sosial dan ekonomi. Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai "Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)".

Dari pengertian ini jelas bahwa pembangunan harus terus dikembangkan dengan dukungan sumber-sumber daya yang tersedia, dan dari pendapat-pendapat diatas jelas bahwa masyarakat bertindak sebagai subjek dari suatu pembangunan dan dapat dipastikan bahwa partisipasi masyarakat memiliki peranan penting bagi suksesnya sebuah pembangunan, baik pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan pusat maupun lingkup daerah. Dari pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan adalah suatu usaha atau proses yang dilakukan baik dalam dalam bentuk pembangunan fisik maupun pembangunan nonfisik, dalam mengadakan perubahan-perubahan atau perkembangan menuju kearah yang lebih baik dari sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan harus dapat memberikan perubahan hidup bagi masyarakat menuju suatu kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat.

B. Penelitian Terdahulu

Dady Permadi (2009). "Efektivitas Pembangunan Jalan Kampung Dalam Program "Respek" Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Distrik Musatfak Kabupaten Jayawijaya". Pogram Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota Universitas Diponegoro Semarang. Latar belakang yang mendasari penelitian ini adalah isu ketertinggalan dan kesenjangan wilayah yang secara umum terjadi di Propinsi Papua. Keterbelakangan dan kesenjangan wilayah salah satunya diakibatkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana jalan. Keadaan sarana dan prasarana jalan Di Distrik Musatfak sangat kurang memadai.

Melalui dana “RESPEK” dilakukan pembangunan sarana jalan kampung. Pembangunan jalan kampung mengedepankan pemberdayaan masyarakat setempat. Kondisi masyarakat setempat mempengaruhi efektivitas pembangunan jalan kampung untuk pemberdayaan masyarakat. Tujuan penelitian adalah menganalisis efektivitas pembangunan jalan kampung dalam program “RESPEK” untuk pemberdayaan masyarakat di Distrik Musatfak Kabupaten Jayawijaya. Untuk mencapai tujuan penelitian, maka sasaran penelitian dilakukan dengan menganalisis tahapan pembangunan jalan kampung dan menganalisis elemen pemberdayaan masyarakat. Digunakan Metode Penelitian campuran antara kuantitatif dan kualitatif dalam proses pengambilan data dan analisa. Pengambilan sampel menggunakan teknik Disproportionate Stratified Random Sampling yang didasarkan pada peran dan pelaku pada tingkat kampung dan tingkat distrik. Untuk tingkat kampung besarnya sampel dibagi menjadi dua kelompok yaitu masyarakat yang berada pada lokasi kegiatan dan masyarakat yang tidak berada pada lokasi kegiatan pembangunan jalan kampung. Analisis data yang digunakan adalah pembobotan dengan skala linkert dan pengelompokan dengan kategori.

Secara umum efektifitas pembangunan jalan kampung dalam program “RESPEK” untuk pemberdayaan masyarakat pada kampung Anegera dan Kampung Elabukama di Distrik Musatfak Kabupaten Jayawijaya efektif, namun terdapat beberapa faktor yang perlu ditingkatkan. Peningkatan tersebut dilakukan melalui upaya pembentukan kelompok, negosiasi, mediasi, dan advokasi. Mengikutsertakan masyarakat dalam kelompok kerja diperlukan untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan dan merangsang aspirasi

masyarakat, keberlanjutan program perlu melibatkan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, mengadakan lomba hasil kegiatan program RESPEK, dan penetapan sanksi adat, negosiasi pendamping dan pengelola kepada masyarakat diperlukan memepererat hubungan kerja, mediasi diperlukan untuk meningkatkan kemauan mendahulukan kepentingan umum, kepercayaan, organisasi dan keselarasan pada Kampung Elabukama, penyebaran informasi di Kampung Elabukama perlu dilakukan melalui media cetak/tertulis dengan cara menempelkan informasi program pada lokasi strategis, advokasi diperlukan untuk merangsang masyarakat membuat kesepakatan pemberian sumbangan sukarela.

*Fransiskus Krimadi (2015). "Evaluasi Pelaksanaan Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung (RESPEK) DI Kabupaten Sorong Selatan". Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung (RESPEK) di Kabupaten Sorong Selatan. Program RESPEK dibiayai dengan sumber dana otonomi khusus Papua, yang dianggarkan melalui APBD Provinsi Papua Barat setiap tahun anggaran, sejak tahun 2007. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengevaluasi situasi dan kondisi pelaksanaan program RESPEK adalah analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats*). Dengan mengkuantitatifkan jawaban kuesioner dari responden terhadap faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (Peluang dan ancaman). Selain itu juga, melakukan analisis deskriptif kualitatif terhadap jawaban wawancara responden, serta data dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa*

pelaksanaan Program RESPEK di Kabupaten Sorong Selatan berada pada Kuadran II artinya bahwa program RESPEK telah dilaksanakan, meskipun menghadapi berbagai ancaman namun demikian masih memiliki kekuatan dari internal program, yang jika di diversifikasikan dengan cara-cara yang strategis akan mengurangi bahkan menghilangkan ancaman tersebut. Adapun ancaman dimaksud adalah penambahan penduduk yang cenderung meningkat, pemahaman masyarakat terhadap kegiatan RESPEK yang bersifat proyek, regulasi RESPEK yang cenderung melenceng dari amanat UU Otonomi Khusus Papua, belum sepenuhnya penyerahan kewenangan kepada pemerintah distrik dan kampung, serta program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah atau lembaga lain yang memiliki regulasi dan fasilitas memadai dilaksanakan oleh masyarakat di kampung Pemerintah Provinsi Papua, 2007. Rencana Strategis Pembangunan Kampung (RESPEK).

Yulinda, Riska (2014). "Evaluasi Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) TAHUN 2014 (Evaluasi pada Desa Sruni, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember) Universitas Jember. Tujuan program Raskin mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras. Sasaran Program Raskin Tahun 2014 adalah berkurangnya beban pengeluaran 15.530.897 RTS (Rumah Tangga Sasaran) dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg RTS/bulan. Penelitian ini mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin tahun 2014 di Desa Sruni Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, Tujuan dalam penelitian ini yaitu mengevaluasi pelaksanaan Program Beras untuk Keluarga

Miskin di Desa Sruni dengan melihat pelaksanaan program Raskin tahun 2014, dan menjelaskan faktor penghambat pelaksanaan program Raskin pada tahun '2014 di Desa Sruni. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian evaluatif. Model evaluasi yang digunakan adalah model evaluasi diskrepansi yaitu menggambarkan ketimpangan antara standar kinerja dengan kinerja yang terjadi dengan menggunakan Best Practice Standarts dalam menentukan kriteria evaluasi dengan memfokuskan penelitian ini pada aspek proses pelaksanaan program. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data dilakukan melalui pengumpulan data mentah, traskip data, pembuatan koding, kategorisasi data, penyimpulan sementara, triangulasi dan penyimpulan akhir. Dalam menguji keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi.

Annisa Farida H. (2014). "Evaluasi Kesiapan Infrastruktur Data Spasial Di Pemerintah Kabupaten/Kota Menggunakan Kuesioner Evaluasi Diri Dan Technology Acceptance Model". Program studi pascasarjana teknik geomatika Jurusan teknik geodesi fakultas teknik Universitas Gadjah Mada. Infrastruktur Data Spasial (IDS) dibangun untuk memfasilitasi berbagi pakai data geospasial. Pada pembangunan IDS, pemerintah daerah berperan penting dalam membangun IDS dari tingkat dasar. Peran pemerintah daerah antara lain memproduksi data geospasial tematik dalam skala besar dan menjalankan rencana strategis dan menjalin hubungan kerjasama dengan swasta, komunitas daerah, instansi di provinsi, dan instansi di daerah. Indonesia telah membangun IDS lebih dari dua dekade. Namun, perkembangan pembangunan

IDS di daerah belum diketahui, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap kesiapan IDS di daerah. Penelitian ini fokus pada evaluasi kesiapan IDS di daerah. Untuk mendapatkan informasi kesiapan IDS dilakukan pengambilan data menggunakan kuesioner dan wawancara. Sebanyak 150 kuesioner dikirimkan ke BAPPEDA yang tersebar di Indonesia. Wawancara dilakukan pada tujuh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kegiatan wawancara dilakukan untuk mengetahui informasi tentang pemahaman daerah tentang IDS. Kuesioner yang kembali sebanyak 40 direkapitulasi menggunakan dua bobot, yaitu bobot 1 untuk jawaban sudah dan bobot 0 untuk jawaban belum. Data rekapitulasi kuesioner digunakan untuk mengevaluasi penerimaan IDS yang dilihat dari praktek komponen data menggunakan *Technology Acceptance Model (TAM)*. Pengolahan datanya menggunakan metode *Partially Least Square Structural Equation Model (PLS-SEM)* dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS 2.0. Prediksi TAM diperoleh hasil bahwa adopsi IDS dianggap berguna, tetapi kegunaan IDS untuk memfasilitasi berbagi data geospasial melalui geoportal belum menjadi agenda prioritas. Indeks kesiapan IDS menghasilkan bahwa sebanyak 13 kabupaten dan kota belum siap, 21 kabupaten dan kota agak siap, dan 6 kabupaten dan kota cukup siap. Visualisasi Parallel Coordinate Plot (PCP) menunjukkan pola yang menyebar karena setiap daerah menjalankan prioritas praktek komponen IDS yang berbeda-beda.

Erwin, Erwin (2013). "Pelaksanaan Program Desa Mandiri Di Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Kasus Di Desa Pulau Cawan Tahun 2007-2010)". Masters thesis, Universitas Terbuka. Penelitian tentang "Implementasi

Program Desa Mandiri di Kabupaten Indragiri Hilir studi kasus di Desa Pulau Cawan tahun 2007-2010”, karena program ini telah dilaksanakan selama 4 (empat) tahun dan perubahan pembangunan di tingkat desa. Penelitian yang dilaksanakan dibatasi pada Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah dimana implementasi kebijakannya tidak berjalan dengan efektif atau kurang berhasil. Penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif, tentang penyampaian informasi antara dua orang atau lebih yang juga meliputi pertukaran informasi antara manusia dalam kapasitas sebagai pribadi atau atas nama organisasi, kemampuan sumberdaya manusia dan fasilitas-fasilitas yang mendukung pelaksanaan kebijakan, karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis, koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi melalui hierarki otoritas dan tanggung jawab. Subjek penelitian ini adalah pemeritahan Kabupaten Indragiri Hilir, Bupati, Kepala BPPMPD Kabupaten Indragiri Hilir, Kepala Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir, Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Indragiri Hilir, Kepala Desa Pulau Cawan, Ketua BPD, LPM, Masyarakat, dan objek penelitian ini adalah Implementasi Program Desa Mandiri di Kabupaten Indragiri Hilir studi kasus di Desa Pulau Cawan tahun 2007-2010. Hasil analisis program ini Secara keseluruhan implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dari aspek sikap aparatur desa dan aspek sosial, ekonomi dan budaya telah dilakukan dengan cukup baik karena semua indikator menunjukkan implementasi kebijakan Pemeritahan

terlaksana dengan cukup baik dilapangan. Namun manfaat dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sangat diharapkan oleh Masyarakat Desa Pulau Cawan karena secara ekonomi dan sosial kebudayaan mendatangkan dampak yang positif dari pembangunan inprastruktur di Desa Pulau Cawa, program PNPM Mandiri ini. Kebijakan Pemerintah untuk menjelankan Program PNPM Mandiri Pedesaan sudah tepat, dengan melibatkan semua elemen untuk membangun Indragiri Hilir dari keterbelakangan pembangunan mengingat potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Indragiri Hilir baik dari sektor perkebunan, pertanian, dan perikanan.

Hidayah, Nur (2017). "Evaluasi Pelaksanaan Program Ibu Mandiri (Prima) Dalam Pemberdayaan Perekonomian Kaum Perempuan Di Yayasan Sahabat Ibu Yogyakarta Periode 2014". thesis, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Evaluasi pelaksanaan PRIMA pada tahap antecedent (masukan) di Yayasan Sahabat Ibu Yogyakarta periode 2014. 2) Evaluasi pelaksanaan PRIMA pada tahap transaction (proses) di Yayasan Sahabat Ibu Yogyakarta periode 2014. 3) Evaluasi pelaksanaan PRIMA pada tahap outcomes (hasil) di Yayasan Sahabat Ibu Yogyakarta periode 2014. 3) Faktor pendukung dan penghambat PRIMA. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Subjek penelitian ketua yayasan, manajer pemberdayaan, pendamping komunitas, dan 25 anggota yang mewakili 705 anggota PRIMA. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan

kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Evaluasi pelaksanaan program pada tahap *antecedent* (masukan) menunjukkan sudah sesuai dengan panduan sosialisasi, pembentukan komunitas dan kelompok, hanya saja media yang digunakan dalam sosialisasi berupa brosur masih kurang menarik. (2) Evaluasi pelaksanaan program pada tahap *transaction* (proses) menunjukkan sudah sesuai dengan panduan pengusulan pengajuan, penilaian pengajuan, pengguliran dana, akan tetapi pada pertemuan edukasi dan pendampingan usaha belum dihadiri seluruh anggota, rata-rata kehadiran hanya 68%. (3) Evaluasi pelaksanaan program pada tahap *outcomes* (hasil) hasil program ini meningkatkan keterjangkauan akses modal, meningkatnya pengetahuan, kemampuan dalam berorganisasi, meningkatnya akses terhadap kepemilikan asset dan pendapatan terlihat dari meningkatnya variasi produk 60%, asset 90% dan omset 92,2%, dalam pengelolaan usaha anggota masih sulit untuk memperbaiki catatan keuangan usaha dan tidak ulet dalam menekuni usahanya. (4) Faktor yang mendukung program adalah antusiasme peserta, fasilitator yang selalu memonitoring dan mendampingi perkembangan usaha. Faktor penghambat program yaitu faktor internal adalah kurangnya komitmen dari beberapa anggota untuk berwirausaha dan faktor eksternal kurangnya monitoring dari pengurus PRIMA dan kurangnya modal pada usaha besar. Kata kunci: evaluasi program, PRIMA, pemberdayaan perempuan.

Alfiyah Alngulya, Dwi (2016). "Pengaruh Persepsi Penerima Manfaat Tentang Pnpm-Mandiri Perkotaan Terhadap Keberhasilan Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Klaten Tengah Kota Klaten".

thesis, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi penerima manfaat tentang pinjaman bergulir, program pelatihan dan pembangunan infrastruktur PNPM Mandiri Perkotaan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama terhadap keberhasilan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Klaten Tengah Kota Klaten. Penelitian ini merupakan penelitian *Ex-post facto*. Penelitian ini termasuk penelitian populasi dengan subyek berjumlah 35 orang penerima manfaat PNPM-Mandiri Perkotaan. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis regresi ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Persepsi penerima manfaat tentang pinjaman bergulir PNPM Mandiri Perkotaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan penanggulangan kemiskinan Kecamatan Klaten Tengah Kota Klaten. (2) Persepsi penerima manfaat tentang program pelatihan PNPM Mandiri Perkotaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan penanggulangan kemiskinan Kecamatan Klaten Tengah Kota Klaten. (3) Persepsi penerima manfaat tentang pembangunan infrastruktur PNPM Mandiri Perkotaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan penanggulangan kemiskinan Kecamatan Klaten Tengah Kota Klaten. (4) Persepsi penerima manfaat tentang pinjaman bergulir, program pelatihan dan pembangunan infrastruktur PNPM Mandiri Perkotaan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan penanggulangan kemiskinan Kecamatan Klaten Tengah Kota Klaten.

Haryati Roebyantho, dkk (2011). "Dampak Sosial Ekonomi Program Penanganan Kemiskinan melalui KUBE, Jakarta; P3KS Press. Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks karena menyangkut berbagai macam aspek seperti hak untuk terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Kementerian Sosial Republik Indonesia melaksanakan Program Penanganan Fakir Miskin P2FMKUBE. Sasaran P2FM melalui KUBE adalah keluarga miskin kluster pertama (kriteria Kementerian Sosial Republik Indonesia). Tujuan P2FMKUBE adalah mempercepat penurunan angka kemiskinan di Indonesia.

Namun sejak tahun 1983 hingga 2003 belum pernah ada kajian atau penelitian yang menganalisis keberhasilan KUBE dengan fokus pada manfaat KUBE bagi anggota dan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang "Dampak Sosial Ekonomi Penanganan Kemiskinan Melalui KUBE" di empat provinsi yaitu: Kota Banjarmasin, Kota Banda Aceh, Kota Tomohon dan Kabupaten Nganjuk.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUBE yang dijadikan responden adalah KUBE yang dibentuk tahun 2004 sampai 2008. Setiap lokasi menggunakan Pedoman berbeda-beda, dimana setiap Pedoman memiliki karakteristik dan visi berbeda. Akibatnya dalam mengimplementasikan banyak mengalami kendala. Keanekaragaman acuan berkaitan dengan kebijakan pembangunan Kesejahteraan Sosial pada masing-masing Kota/Kabupaten, sistim nilai masyarakat dan kearifan lokal. KUBE merupakan program alternatif Kementerian Sosial Republik Indonesia yang mampu mempercepat penghapusan kemiskinan. Misal: kasus Kondisi KUBE

Kota Banjarmasin, pada tahun 2009 terdapat 54,67% KUBE maju dan berkembang, sedang 45,33% KUBE gagal. Kota Tomohon 52,73% KUBE tumbuh dan berkembang dan 47,27% KUBE gagal atau KUBE tidak memiliki kegiatan usaha lagi. Kriteria sasaran belum mengacu pada kriteria BPS dan PKPD, akibatnya kriteria miskin setiap daerah berbeda. Gambaran riil pencapaian target KUBE dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan secara kuantitas belum dapat diperoleh, disebabkan sampai kini belum pernah tersusun pemetaan jumlah dan status KUBE di 33 provinsi.

Evaluasi Program P2FM-KUBE meliputi empat item yaitu: Input, Pembentukan KUBE masih bersifat bottom up, belum berpedoman pada konsep pemberdayaan kelompok artinya pembentukan KUBE belum sesuai dengan: kebutuhan masyarakat, keterampilan masyarakat, potensi kearifan lokal dan melibatkan partisipasi masyarakat. Legalitas KUBE masih terbatas pada hasil musyawarah kelompok, SK lurah, SK Bupati dan belum melibatkan kerjasama dengan instansi terkait, seperti dinas perdagangan, perindustrian dan koperasi. Legalitas KUBE dengan instansi terakit diperlukan untuk pengembangan usaha, dan mempermudah jaringan kerja. Secara Kelembagaan, hampir seluruh KUBE belum memiliki administrasi sesuai Pedoman P2FM-KUBE. Keterbatasan pendidikan formal dan informal khusus mengenai manajemen usaha menyebabkan kendala dalam mengembangkan usaha dan memasarkan hasil usaha, oleh karena itu untuk mengembangkan KUBE perlu pendamping sesuai panduan (belum ada panduan yang standar dan berkelanjutan). Konsep Pemberdayaan (khususnya membangun daya, membangun motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang

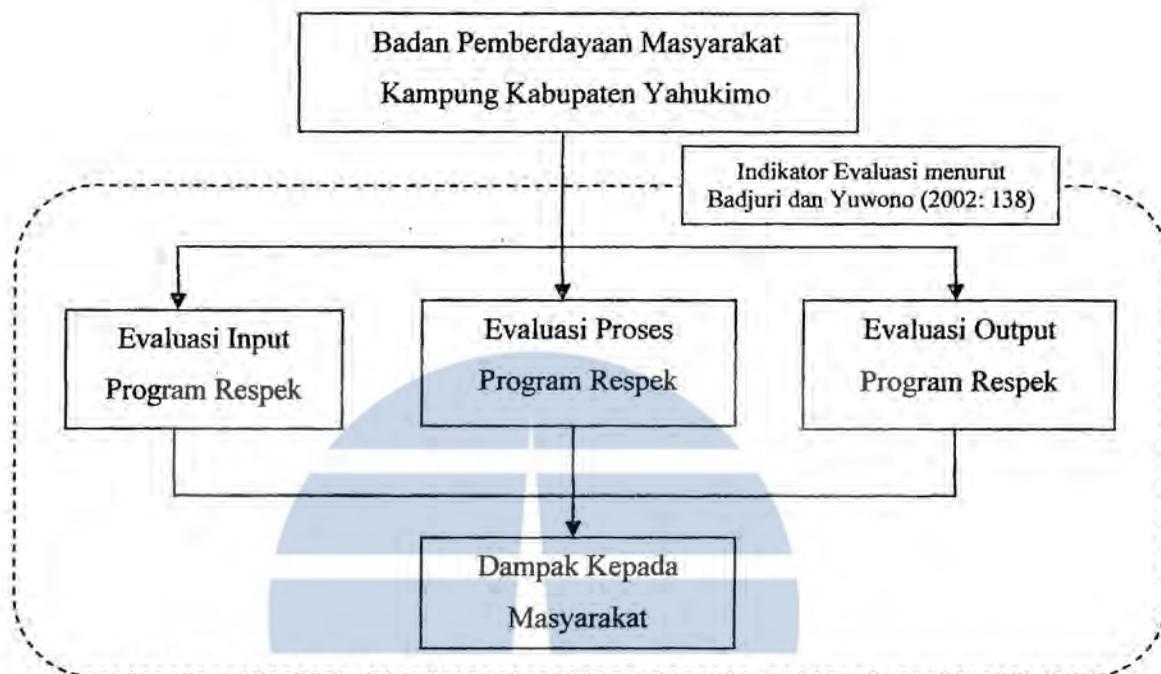
dimiliki dalam upaya untuk mengembangkan) belum dijadikan materi dalam pelatihan dan bimbingan pada sasaran binaan maupun pada pendamping dan pelaksana program.

Output atau Hasil KUBE sudah mampu meningkatkan pendapatan anggota. Mampu menjalin hubungan kerjasama dalam kelompok serta meningkatnya kemampuan dan pengetahuan dalam memecahkan masalah kesejahteraan sosial. *Out come* atau dampak sosial menunjukkan bahwa keberadaan KUBE mampu meningkatkan rasa kebersamaan dalam berusaha, mampu meningkatkan kepedulian dalam penanganan permasalahan sosial di masyarakat, mampu mengelola dana IKS untuk kesejahteraan masyarakat. Dampak ekonomi dapat Meningkatkan kesejahteraan anggota (mampu membiayai sekolah) dapat memberikan pinjaman modal usaha bagi masyarakat non anggota KUBE, memberikan peluang kerja bagi anggota non KUBE untuk bekerja di usaha KUBE (katering).

Upaya mengoptimalkan pencapaian tujuan P2FM-KUBE, direkomendasikan beberapa alternatif kebijakan melibatkan masyarakat dalam pemetaan masyarakat miskin pada tahap persiapan pembentukan KUBE, peningkatan profesionalisme pendamping, dan mempertegas pembagian tugas dan wewenang antara pusat dan daerah, serta menyusun perencanaan untuk pendidikan dan pelatihan bagi pendamping dan pelaksana P2FM-KUBE di tingkat Kabupaten/Kota, serta mengkoordinasikan sharing dana dalam sosialisasi program dan pemberian insentif bagi pendamping.

C. Kerangka Berpikir

Gambar 2. 1
Kerangka Pikir Penelitian



D. Konsep Operasional Variabel

Konsep operasional adalah penjelasan kerangka pemikiran penelitian tentang indikator variabel penelitian. Defenisi operasional dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan pengukuran variabel yang di teliti. Maka dari itu, peneliti memberikan batasan-batasan defenisi operasional variabel penelitian sebagai berikut :

1. Evaluasi input perencanaan program respek menfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator ini terdiri atas sumber daya manusia, uang, atau infrastruktur pendukung lainnya.
2. Evaluasi proses perencanaan program respek menfokuskan pada sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada

masyarakat. Indikator ini terdiri atas aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu.

3. Evaluasi output perencanaan program respek menfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program respek.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Desember 2016 sampai dengan Maret 2017. Sedangkan lokasi penelitian dilaksanakan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Yahukimo dengan judul Evaluasi Perencanaan Program Respek pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dalam Mengurangi Kemiskinan di Kabupaten Yahukimo.

B. Jenis Dan Desain Penelitian

Jenis penelitian menggunakan Survey Deskriptif Kualitatif yaitu, penelitian di arahkan untuk mendeskripsikan atau menguraikan keadaan Pelayanan Publik. Sedangkan desain penelitian memberikan gambaran faktual mengenai asas input perencanaan program respek, proses perencanaan respek, dan output program respek pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Di Kabupaten Yahukimo. Jadi, desain penelitian adalah rencana dan struktur dalam penelitian ini yang disusun sedemikian rupa sehingga peneliti akan dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagaimana dikemukakan oleh Ulber Silalahi (2012:180-181) menyatakan bahwa “istilah desain penelitian dapat bermakna umum dan spesifik. Makna umum dari desain penelitian menunjuk pada persentase rencana untuk studi metodologi. Rancangan harus mengindikasikan maksud dan tujuan studi dan memperlihatkan bahwa rencana adalah konsisten dengan tujuan studi. Jadi desain penelitian dalam arti umum atau luas meliputi rencana penelitian atau keseluruhan proses penelitian. Desain

penelitian dalam arti spesifik, menunjuk pada tipe studi atau tipe penelitian. Ini berhubungan dengan dimana studi dilakukan, bagaimana variabel diukur, dan bagaimana menentukan kelompok yang dipelajari. Dalam pengertian ini, desain penelitian merupakan bagian dari rencana penelitian. Desain penelitian dibuat agar memungkinkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dengan valid, obyektif, tepat dan hemat. Desain penelitian disusun dan dilaksanakan dengan penuh perhitungan agar dapat menghasilkan petunjuk empiris yang relevansinya kuat dengan masalah penelitian". Menurut Sukmadinata (2015) dasar penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Penelitian kualitatif percaya bahwa kebenaran adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka (Danim, 2012). Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan (Sugiyono, 2015).

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau menganalisis secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Metode deskriptif juga ingin mempelajari norma-norma atau standar-standar, sehingga penelitian deskriptif ini disebut juga survei normatif. Dalam

metode deskriptif dapat diteliti masalah normatif bersama-sama dengan masalah status dan sekaligus membuat perbandingan-perbandingan antar fenomena. Studi demikian dinamakan secara umumnya sebagai studi atau penelitian deskriptif.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian adalah pegawai yang dianggap terbaik dalam memberikan informasi yang dibutuhkan kepada peneliti. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pegawai Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Di Kabupaten Yahukimo. Informan dalam penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung
2. Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung
3. Sub Bagian Umum
4. Sub Bagian Keuangan
5. Sub Bagian Penyusunan Program
6. Bidang Pemerintahan
7. Bidang Penataan dan Kerjasama Kampung
8. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan
9. Seksi Pembinaan Masyarakat
10. Seksi Pengawasan
11. Seksi Penataan Kampung
12. Seksi Kerjasama Kampung
13. Seksi Pengembangan Ekonomi
14. Seksi Kelembagaan Kampung
15. Seksi Kelembagaan Adat

D. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya (informan) yang memiliki informasi atau data yang terkait dengan masalah penelitian melalui observasi dan wawancara dengan subjek penelitian.
2. Data Sekunder, adalah data yang di peroleh langsung dari sumber kedua objek penelitian (bukan aslinya) dan berupa dokumen–dokumen, laporan–laporan yang terkait dengan masalah penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Teknik Observasi, adalah pengamatan yang di lakukan secara langsung terhadap objek penelitian yang terkait dengan masalah penelitian. Tehnik observasi yang dilakukan dengan cara, pertama; Mencari informasi selengkap – lengkapnya tentang apa yang hendak diobservasi, kedua ; Memahami tujuan khusus dan tujuan umum dari penelitian yang sedang di laksanakan, ketiga; Menentukan materi atau objek yang hendak di observasi , keempat ; Membatasi ruang lingkup materi atau objek yang ingin di observasi, kelima ; mencatat hasil observasi sedetail-detailnya.
2. Teknik Wawancara, adalah salah satu teknik dapat digunakan dalam mengumpulkan data. Wawancara juga merupakan teknik yang dapat digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam serta dapat digunanakan dalam jumlah responden yang terbatas. Untuk mendapatkan data yang mendalam, maka seorang peneliti harus meyakini bahwa responden yang akan diwawancarai adalah informan yang; a) dapat

dipercaya, b) mengerti pertanyaan yang dimaksudkan oleh peneliti, dan c) paling tahu hal yang ditanyakan kepadanya (Syamsir Torang, 2019:29). Sedangkan wawancara langsung dengan objek penelitian terkait dengan masalah penelitian. Menurut koentjaraningrat, 1986; (Danandjaja, 1988) dalam bukunya Muhammad Idrus (2017:137-140) mengemukakan bahwa ada beberapa jenis wawancara yang dapat dilakukan di lokasi penelitian diantaranya wawancara terstruktur, wawancara tak terstruktur, wawancara kelompok, wawancara bergender, wawancara bingkai, wawancara interpreting. Dari beberapa jenis wawancara yang dikemukakan di atas, maka jenis wawancara yang di gunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara terstruktur yaitu, melakukan wawancara dengan informan dengan terlebih dahulu mempersiapkan bahan pertanyaan yang akan di ajukan dalam wawancara nantinya.
 - b. Wawancara tak terstruktur yaitu, melakukan wawancara dengan dengan informan dengan mengembangkan pertanyaan – pertanyaan penelitian sesuai dengan fokus pembicaraan yang ingin ditanyakan.
3. Dokumentasi, adalah mempelajari dan mencatat buku – buku, dokumen – dokumen, laporan – laporan, yang terkait dengan masalah penelitian.

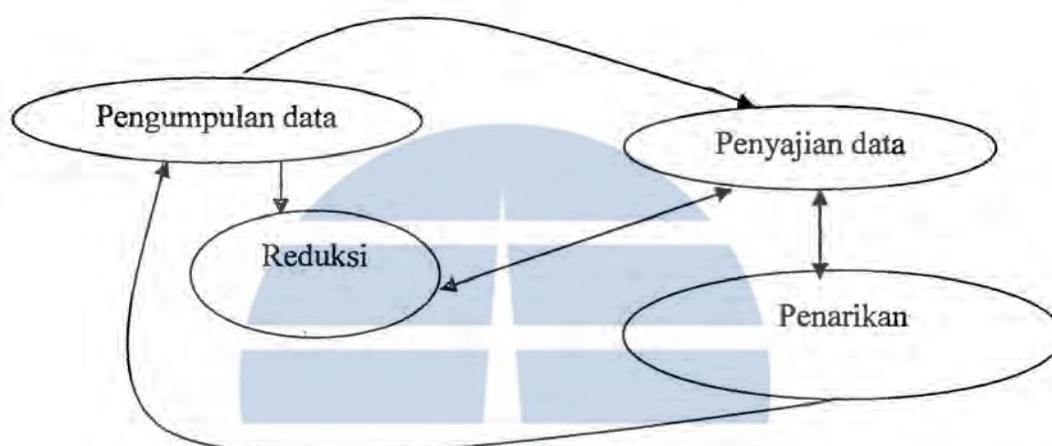
F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yakni analisis yang dilakukan dengan menggunakan model interaktif. Dalam model ini terdapat tiga komponen analisis, yaitu reduksi, sajian data,

penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992:20). Selanjutnya analisis dilakukan dengan memadukan (secara interaktif) ketiga komponen tersebut.

Alur pikir analisis interaktif dapat divisualisasikan dalam bentuk diagram, yaitu :

Gambar 3.1
Analisis Data Model Interaktif, Miles dan Huberman (Rohidi, 1992)



Reduksi data berkaitan dengan proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari hasil penelitian di lapangan. Reduksi data ini merupakan suatu analisis data untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasikan. Reduksi data dilakukan dengan diawali mengelompokkan data yang relevan dengan aktivitas birokrasi dalam peyelenggaraan pendidikan gratis yang berupa information, action, dan respon. Kemudian, dilanjutkan dengan mengelompokkan data yang relevan dengan indikator aktivitas birokrasi, yaitu asas pelayanan publik, standar pelayanan publik, unsur pelayanan publik. Setelah pengelompokan data dilakukan, kemudian dicarikan substansi (isi) utama dari data yang diperoleh tersebut.

Penyajian data merupakan alur penting kedua dari kegiatan analisis. Peneliti membatasi suatu “penyajian” sebagai deskripsi atas kumpulan informasi yang tersusun secara sistematis yang mendukung keperluan bagi penarikan kesimpulan. Penyajian data diawali dengan mendeskripsikan bagaimana prosedur, proses, dan pelayanan serta siapa yang terlibat.

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan yang diambil didasarkan atas hasil reduksi dan penyajian atas data yang diperoleh pada setiap tahapan input perencanaan program respect, proses program respect, dan output program respect Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Di Kabupaten Yahukimo.

G. Pengecekan Validitas Temuan

Pengujian kredibilitas data penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Trianggulasi data dilakukan dengan cara, yaitu trianggulasi teknik, trianggulasi sumber data dan trianggulasi waktu adalah :
 - a. Trianggulasi teknik dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu dengan wawancara, obsevasi, dan dokumentasi.
 - b. Trianggulasi sumber dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber yang berbeda, dalam hal ini sumber datanya adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Di Kabupaten Yahukimo.
 - c. Trianggulasi waktu dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda pada satu sumber sehingga dapat diketahui bahwa sumber data konsisten atau tidak konsisten dalam memberikan data.

Mengumpulkan bahan referensi sebagai bahan pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan dalam penelitian yang berupa peta, data statistik, maupun dokumen kebijakan atau sumber referensi dari internet.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian Secara Umum

Kabupaten Yahukimo merupakan salah satu kabupaten di bagian timur Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada dalam wilayah administrasi Provinsi Papua. Kabupaten yang pusat pemerintahannya di Distrik Dekai ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Undang- Undang Nomor 26 tahun 2002 dan diresmikan pada tanggal 11 Desember 2002.

Sebagai salah satu wilayah yang memiliki cukup banyak daerah dengan aksesibilitas yang terbatas menjadi tantangan pembangunan tersendiri bagi pemerintah daerah. Minimnya sarana dan prasarana serta infrastruktur penunjang menjadi penghambat utama dalam pengembangan potensi daerah dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Hal ini diperparah dengan domisili penduduk Yahukimo yang menyebar di berbagai titik wilayah dimana sebagian besar penduduknya tinggal di daerah dataran tinggi yang tentu saja membutuhkan biaya yang relatif sangat besar untuk.

Gambaran Umum kondisi Kabupaten Yahukimo memberikan gambaran awal tentang kondisi daerah dan capaian pembangunan Kabupaten Yahukimo secara umum saat ini.

1. Aspek Geografi Dan Demografi

a. Kondisi Geografi Daerah

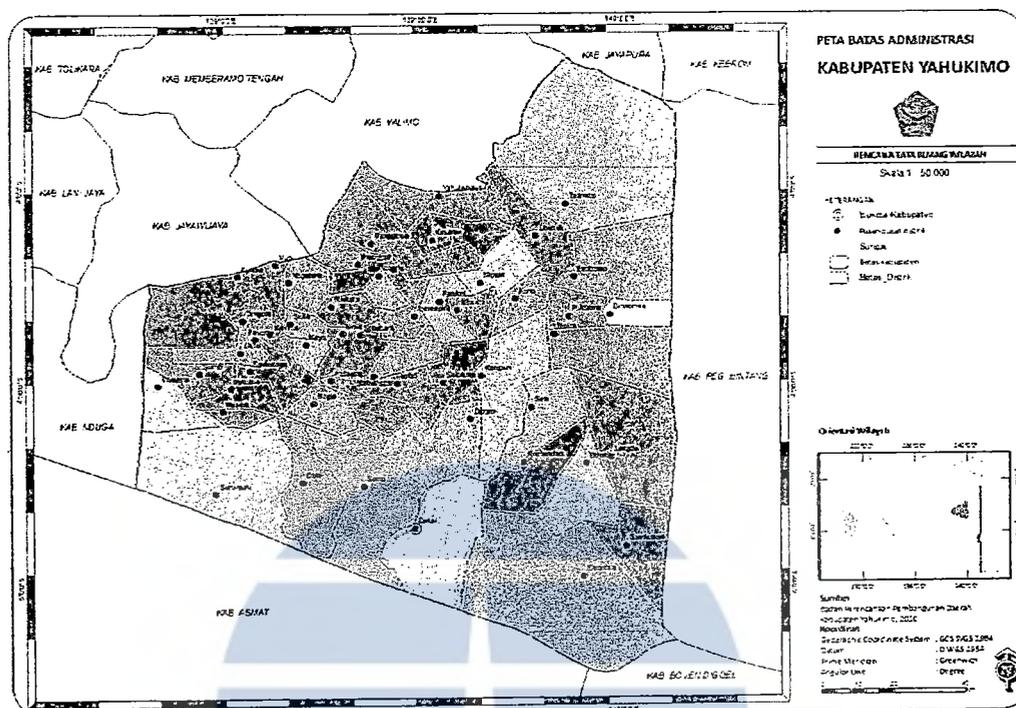
Wilayah Kabupaten Yahukimo terletak $138^{\circ}45'$ - $140^{\circ}14'$ bujur timur dan $3^{\circ}39'$ - $5^{\circ}02'$ lintang selatan serta terletak pada ketinggian 100 – 3.000 meter diatas permukaan laut.

Kabupaten Yahukimo memiliki luas wilayah 17.152 km². Ibu Kota Kabupaten Yahukimo adalah Sumohai, Distrik Dekai. Distrik Kurina merupakan daerah terluas, yaitu 605 km² atau 3,53 dari luas wilayah Kabupaten Yahukimo. Sedangkan Distrik Duram merupakan distrik dengan wilayah terkecil, yakni 100 km² atau 0,58 persen dari Kabupaten Yahukimo. Sedangkan jarak terjauh yang harus ditempuh dari ibu kota kecamatan ke ibu kota Kabupaten Yahukimo yaitu Kota Dekai adalah Distrik Talambo (230 km).

Kabupaten Yahukimo berbatasan langsung dengan kabupaten-kabupaten di sekitarnya, yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Jayawijaya, kabupaten Yalimo, Kabupaten Keerom, Kabupaten Tolikara.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pegunungan Bintang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Nduga, kabupaten Mimika.

Gambar 4.1
Peta Administratif Kabupaten Yahukimo



Sumber : RTRW Kabupaten Yahukimo 2010 - 2030

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002, Kabupaten Yahukimo ditetapkan sebagai daerah otonomi baru dengan ibukota Kabupaten berada di Sumohai. Namun karena kondisi infrastruktur dan fasilitas fisik Distrik Sumohai belum memungkinkan, maka pusat pemerintahan untuk sementara dipindahkan ke Distrik Dekai yang direncanakan memiliki luas 8 km x 7 km.

Luas Wilayah

Kabupaten Yahukimo memiliki 51 Distrik yang terdiri dari 1 kelurahan dan 517 kampung. Jika dilihat dari jumlah komposisi kampung/kelurahan, Distrik Kurima memiliki jumlah kampung/kelurahan terbanyak yakni 22 desa. Sedangkan distrik yang memiliki jumlah desa paling sedikit adalah Distrik Yahuliambut, Kona, dan Dirwemna

dengan masing-masing terdiri dari lima desa. Selain itu, Distrik Kurima memiliki luas wilayah paling besar yakni seluas 605 km² dengan persentase sebesar 3,53 persen dari total wilayah. Sedangkan distrik yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Distrik Duram dengan luas wilayah sebesar 100 km² (0,58%).

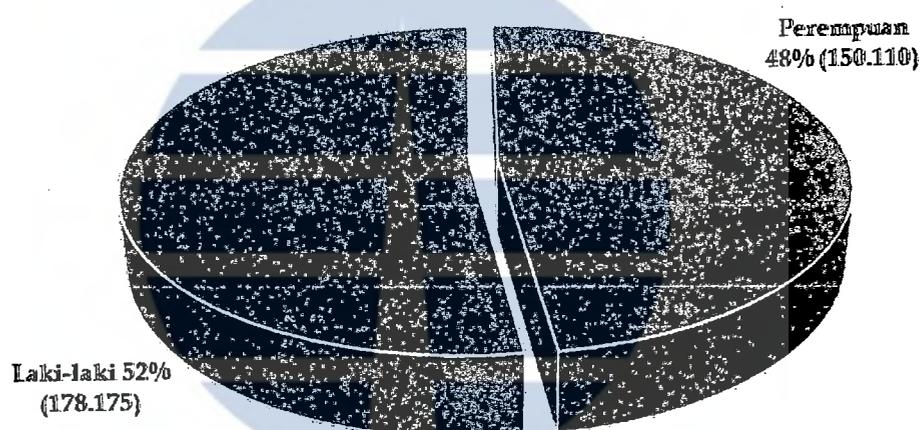
b. Demografi

Berdasarkan hasil pendataan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Yahukimo yang dilakukan dengan metode pengumpulan data dari kepala desa atau yang lebih dikenal dengan metode pengumpulan buku induk, penduduk Kabupaten Yahukimo pada tahun 2014 tercatat sebanyak 328.285 jiwa yang terdiri dari 178.175 penduduk laki-laki dan 150.110 penduduk perempuan. Nilai rasio jenis kelamin Kabupaten Yahukimo sebesar 111.70, artinya bahwa setiap 100 orang penduduk perempuan di Kabupaten Yahukimo terdapat 112 penduduk laki-laki.

Jika jumlah penduduk di rinci berdasarkan kecamatan, maka jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Kurima yaitu sebesar 16.701 jiwa (5.09%) sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Kona yaitu sebanyak 1.258 jiwa (0.38%). Jumlah rumah tangga di Kabupaten Yahukimo mencapai 71.118 rumah tangga, sehingga rata-rata penduduk per rumah tangga mencapai 5 jiwa. Angka ketergantungan penduduk (dependency ratio) Kabupaten Yahukimo tahun 2013 tercatat 15,29 persen, artinya bahwa setiap 100 penduduk produktif menanggung 16 orang yang tidak produktif.

Menurut data Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Yahukimo, jumlah pencari kerja yang terdaftar menurut jenis kelamin hingga tahun 2013 berjumlah 1398 orang, yang terdiri dari pencari kerja laki-laki sebanyak 536 orang dan pencari kerja perempuan sebanyak 862 orang. Dengan pencari kerja terbanyak merupakan lulusan S1/S2/S3 sebanyak 680 orang.

Gambar 4.2
Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Kabupaten Yahukimo, Tahun 2014



Sumber : Yahukimo Dalam Angka Tahun 2014

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan Kabupaten Yahukimo yang ditinjau dari sisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta kesejahteraan sosial.

a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator dasar dalam melakukan evaluasi, monitoring, sekaligus dasar perencanaan perekonomian dalam pembangunan daerah. Dalam hal ini,

PDRB dapat diartikan sebagai nilai tambah dari barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen-produsen suatu wilayah pada jangka waktu tertentu. Sebagai salah satu indikator analisis perekonomian, maka fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi akan menguraikan data pencapaian perkembangan PDRB, pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan fluktuasi inflasi Kabupaten Yahukimo.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

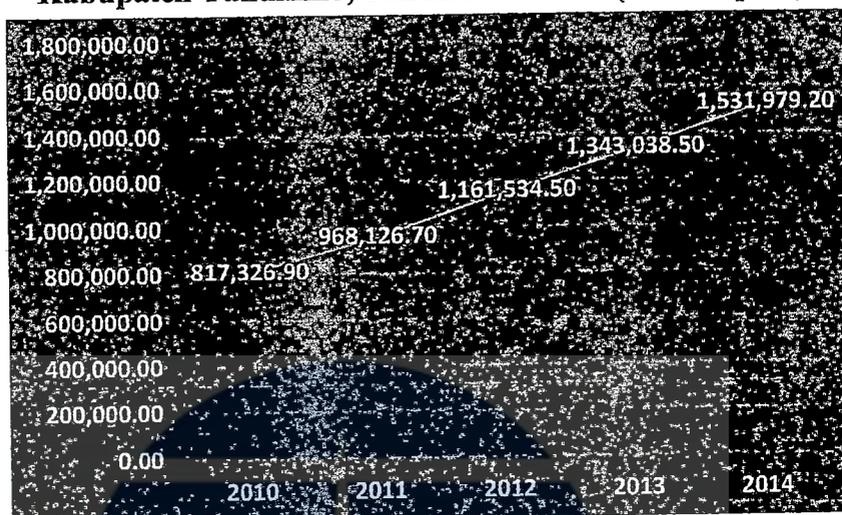
Produk Domestik Regional Bruto suatu daerah menggambarkan bagaimana posisi perekonomian daerah tersebut dalam menata pembangunan daerah. Kemampuan, potensi, dan kinerja sumber daya alam maupun sumber daya manusia dalam mengembangkan perekonomian daerah sangat penting untuk dianalisis guna evaluasi, monitoring, hingga perencanaan pembangunan berbasis ekonomi.

PDRB atas harga berlaku (ADHB) merupakan nilai tambah yang dihasilkan sektor-sektor ekonomi yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada tahun berjalan. Selain menggunakan harga yang berlaku pada tahun berjalan, PDRB atas harga berlaku juga dipengaruhi oleh perubahan kuantitas produksi. Oleh sebab itu, perubahan angka ke arah yang lebih besar selalu berarti ke arah yang lebih baik, artinya adalah tidak selalu mengindikasikan sebuah peningkatan.

Nilai Produk Domestik Bruto (PDRB) atas harga berlaku tahun dasar 2010 Kabupaten Yahukimo pada tahun 2014 adalah sebesar 1.531.979,2 juta rupiah. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar 14,07

persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2013.

Gambar 4.3
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Yahukimo, Tahun 2010-2014 (Juta Rupiah)

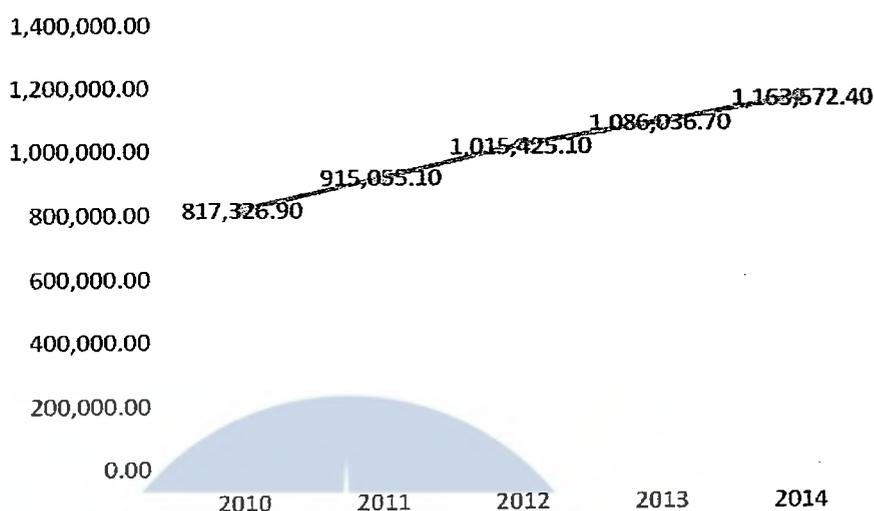


Sumber : PDRB Kabupaten Yahukimo Menurut Lapangan Usaha 2010-2014

PDRB atas harga konstan (ADHK) merupakan nilai tambah yang dihasilkan sektor-sektor ekonomi yang dihitung dengan menggunakan satu harga dimana harga yang digunakan pada tahun tertentu yakni harga pada tahun 2010 dimana sebelumnya tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2000. Jadi setiap perhitungan dianggap sejak tahun 2010 karena telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun dan pada tahun 2010 perekonomian Indonesia relatif stabil. Maka setiap nilai tambah PDRB dihitung dengan menggunakan harga-harga tahun 2010.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan Kabupaten Yahukimo pada tahun 2014 adalah sebesar 1.086.036,7 jutaan rupiah. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 7,14 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2013.

Gambar 4.4
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Yahukimo, Tahun 2010-2014 (Juta Rupiah)



Sumber : PDRB Kabupaten Yahukimo Menurut Lapangan Usaha 2010-2014

Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi adalah peranan sektor-sektor lapangan usaha terhadap total dari seluruh sektor. Struktur ekonomi suatu wilayah biasanya disajikan dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB). PDRB ADHB merupakan nilai tambah yang dihasilkan sektor lapangan usaha dan dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada tahun berjalan. Selain menggunakan harga yang berlaku pada tahun berjalan, PDRB ADHB juga dipengaruhi oleh perubahan kuantitas produksi. Sehingga nilai yang besar tidak selalu berarti ada peningkatan.

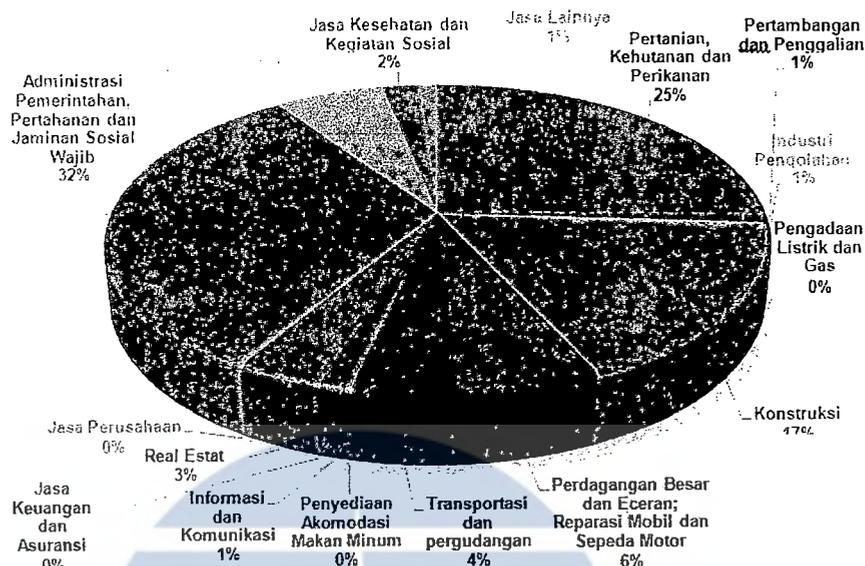
Struktur lapangan usaha Kabupaten Yahukimo tahun 2014 masih sama seperti tahun sebelumnya yakni masih didominasi oleh lapangan usaha Jasa- Jasa. Hanya saja setelah ada perubahan tahun dasar 2010 yang baru ini lapangan usaha Jasa-Jasa dipecah menjadi

lima sektor lapangan usaha yaitu lapangan usaha Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, serta Jasa Lainnya.

Sumbangan terbesar pada tahun 2014 diberikan oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (31,77 persen), lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (25,32 persen), lapangan usaha Konstruksi (16,51 persen), lapangan usaha Jasa Pendidikan (6,26 persen), dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor (5,95). Sementara peranan lapangan usaha lainnya dibawah lima persen.

Kontribusi lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial dari tahun ke tahun kontribusinya selalu meningkat. Hingga pada tahun 2013 menjadi kontributor terbesar bagi PDRB Kabupaten Yahukimo menggantikan posisi lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Gambar 4.5
Struktur Ekonomi Terbesar Kabupaten Yahukimo
Tahun 2014 (%)

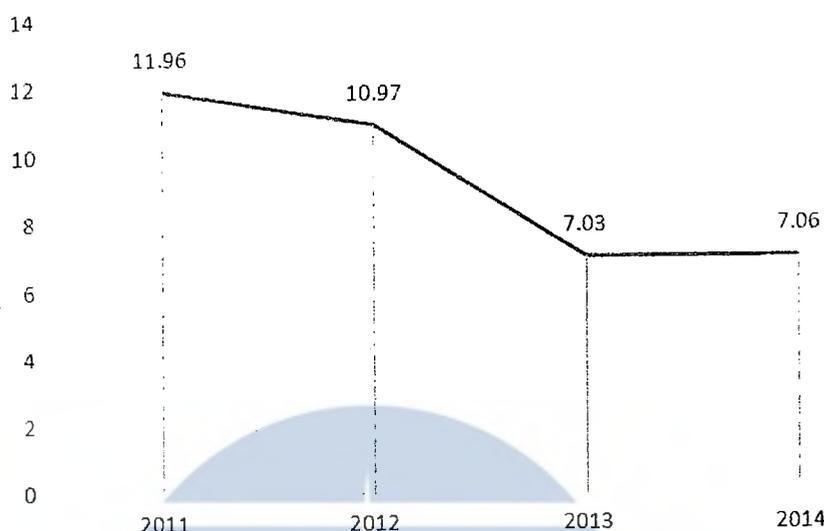


Sumber : PDRB Kabupaten Yahukimo Menurut Lapangan Usaha 2010-2014

Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Yahukimo dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Namun, puncak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Yahukimo terjadi pada tahun 2011, dimana laju pertumbuhan ekonomi pada saat itu mencapai 11,96. Kemudian menurun pada tahun 2012 menjadi 10,97 persen dan melambat lagi menjadi 7,03 persen di tahun 2013. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Yahukimo mengalami peningkatan sebesar 0,03 persen pada tahun 2014 menjadi 7,06 persen.

Gambar 4.6
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Yahukimo
Tahun 2014 (%)



Sumber : Yahukimo Dalam Angka Tahun 2014

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Yahukimo tahun 2014 dibangun oleh pertumbuhan positif dari masing-masing lapangan usaha ekonomi di Kabupaten Yahukimo. Namun, tidak semua lapangan usaha berkontribusi besar dalam pembentukan PDRB juga menyumbang angka pertumbuhan yang besar pada total pertumbuhan PDRB Kabupaten Yahukimo tahun 2014. Seperti, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial sebagai kontributor terbesar hanya memberikan andil hanya sebesar 0,44 persen. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai kontributor kedua hanya memberikan andil sebesar 0,26 persen. Lapangan usaha Konstruksi sebagai kontributor ketiga hanya memberikan andil sebesar 0,46 persen.

Tabel 4.1
Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Yahukimo
Tahun 2014 (%)

No	Lapangan Usaha	Pertumbuhan Ekonomi Sektoral (%)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,26
2	Pertambangan dan Penggalian	0,5
3	Industri Pengolahan	0,39
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	
6	Konstruksi	0,46
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	0,27
8	Transportasi dan pergudangan	0,37
9	Penyediaan Akomodasi Makan Minum	0,39
10	Informasi dan Komunikasi	1,06
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,55
12	Real Estate	0,42
13	Jasa Perusahaan	0,53
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan	0,44
15	Jasa Pendidikan	0,5
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,41
17	Jasa Lainnya	0,46
Jumlah		7,06

Sumber : PDRB Kabupaten Yahukimo Menurut Lapangan Usaha 2010-2014

PDRB Perkapita

Jika PDRB suatu wilayah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di wilayah tersebut, maka akan dihasilkan suatu PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB nominal per kepala atau per satu orang penduduk.

Dalam kurun waktu lima tahun (2010-2014), pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 dengan pertumbuhan 10,10 persen dari nilai PDRB 4,93 juta rupiah menjadi 5,74 juta rupiah. Kemudian tahun 2012-2013, pertumbuhannya mulai melambat menjadi 9,09 persen dan 4,91 persen, dengan jumlah nominal masing-masing sebesar 6,78 dan 7,67 juta rupiah. Baru pada tahun 2014, PDRB per kapita mulai menguat lagi dengan naik 5,19 persen dari tahun sebelumnya, hingga mencapai 8,60 juta rupiah.

Tabel 4.2
PDRB Perkapita Kabupaten Yahukimo Tahun 2010-2014 (Rupiah)

No	Tahun	PDRB Perkapita	
		Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan
1	2010	4.926.267,43	4.926.267,43
2	2011	5.738.543,66	5.423.963,16
3	2012	6.768.533,30	5.917.119,81
4	2013*)	7.670.736,12	6.207.444,84
5	2014**)	8.597.303,10	6.529.843,44

Sumber : PDRB Kabupaten Yahukimo Menurut Lapangan Usaha 2010-2014

Rasio Gini

Pada tahun 2012 dapat dikatakan bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten Yahukimo masuk kategori ketidakmerataan rendah, kesimpulan ini berdasarkan hasil pengukuran distribusi pendapatan baik menurut Bank Dunia maupun rasio gini.

Berdasarkan kriteria Bank Dunia, pada tahun 2013, 40 persen rumah tangga berpendapatan rendah dapat menikmati 22,63 persen

pendapatan. Angka ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten yahukimo memiliki ketimpangan rendah.

Tabel 4.3
Rasio Gini Kabupaten Yahukimo Tahun 2013

Distribusi Pendapatan Penduduk	Kreteria Bank Dunia	Gini rasio
40% berpendapatan rendah	22,663	
40% berpendapatan sedang	37,635	0,20
20% berpendapatan tinggi	39,732	
Total	100	

Sumber : IPM Kabupaten Yahukimo 2013

Pola Pengeluaran Rumah Tangga

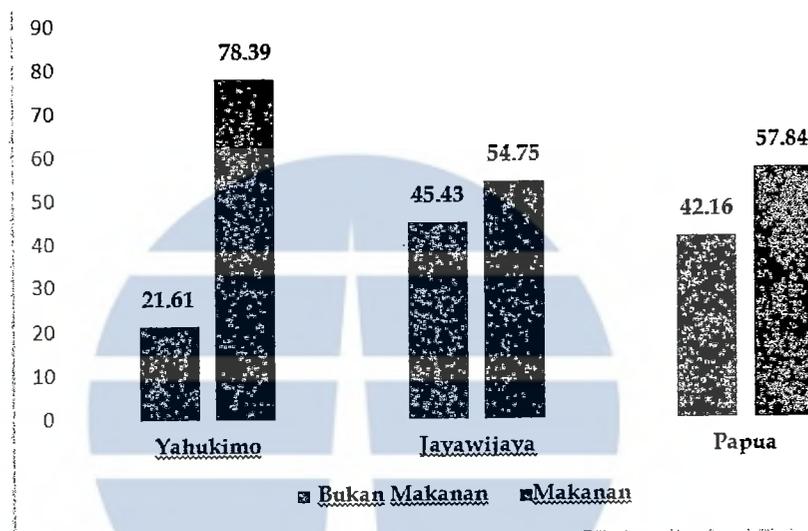
Rata-rata pengeluaran per kapita di Kabupaten Yahukimo tahun 2014 sebesar Rp. 4.080,73 ribu rupiah dari total pengeluaran tersebut sekitar 78,39 persen (Rp.498.551) digunakan untuk pengeluaran konsumsi makanan dan sisanya sekitar 21,61 persen (Rp. 137.441) digunakan untuk pengeluaran konsumsi non makanan.

Dibandingkan dengan Kabupaten Jayawijaya sebagai kabupaten induknya, rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di Kabupaten Jayawijaya lebih tinggi yakni sekitar Rp. 665.312. persentase pengeluaran untuk konsumsi makanan hanya sekitar 54,57 persen dan pengeluaran untuk konsumsi non makanan sekitar 45,43 persen.

Pada tahun 2013 rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita perbulan di Kabupaten Yahukimo, dan daerah sekitarnya dan bahkan Provinsi Papua masih didominasi oleh pengeluaran kelompok makanan.

Inilah salah satu ciri dari karakteristik penduduk negara berkembang dimana pengeluaran untuk kelompok makanan akan lebih diutamakan dibandingkan pengeluaran non makanan.

Gambar 4.7
Persentase Pengeluaran rata-rata per Kapita Sebulan
Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Jayawijaya,
dan Provinsi Papua (%)



Sumber : IPM Kabupaten Yahukimo 2013

Potensi Usaha

Potensi usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha mikro sangat besar. Sebagai pengusaha yang berwirausaha pada sektor pertanian dan sub sektor pertanian (sektor peternakan) sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Yahukimo sangat melimpah. Lahan yang luas dan subur tersedia bagi masyarakat sebagai pelaku usaha yang nota bene adalah pemegang hak ulayat.

Gambar 4.8
Salah satu usaha mikro yang berjalan di Kabupaten Yahukimo



Pengembangan koperasi dan UKM ditempuh untuk mengembangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di Kabupaten Yahukimo. Pada tahun 2008, jumlah koperasi di kabupaten ini sebanyak 62 koperasi. Jumlah koperasi ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2007 yang berjumlah 24 unit koperasi. Jumlah 62 koperasi itu terbagi menjadi dua jenis yaitu berupa Koperasi Unit Desa sebanyak 51 koperasi, dan 11 unit koperasi lainnya berupa koperasi non-KUD. Upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM disusun secara terencana dan sistematis yang meliputi:

1. Penciptaan iklim usaha dalam rangka membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya, serta menjamin kepastian usaha disertai adanya efisiensi ekonomi.
2. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM untuk meningkatkan akses pada sumber daya produktif sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia dan sumber daya modal.

3. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah (UKM).
4. Pemberdayaan usaha skala mikro untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di di sektor informal yang berskala usaha mikro.

Selain melalui koperasi, upaya lain yang ditempuh pemerintah untuk mengembangkan sektor ekonomi di daerah ini yaitu melalui pembangunan pusat-pusat perdagangan. Pembangunan ruko-ruko dan los pasar terus berkembang seiring dengan berkembangnya sektor perdangan dan meningkatnya kebutuhan masyarakat.

Berkembangnya perekonomian masyarakat dengan pemberian subsidi memperlancar juga arus perkembangan sektor industri dan perdagangan. Barang-barang yang diperjualbelikan semakin bervariasi, seperti misalnya produk-produk kecantikan, meubel, alat-alat tulis, berbagai jenis makanan pokok dan makanan bukan pokok, dan lain-lain. Pemenuhan kebutuhan komunikasi dan transportasi membuka peluang usaha baru dalam bidang perdagangan dan jasa. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna handphone dan kendaraan bermotor, pusat-pusat penjualan handphone serta kendaraan bermotor pun dibuka. Jasa perbaikan handphone dan kendaraan bermotor juga menjadi salah satu bidang usaha yang bukan hanya sebatas untuk memperoleh pendapatan, tetapi juga meningkatkan sumber daya manusianya. Hal ini disebabkan bidang usaha yang dikerjakan

memerlukan keahlian khusus yang sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin modern ini.

Sektor perdagangan di kabupaten ini dapat berjalan dengan lebih lancar dengan kehadiran Bank Papua. Bank ini menjadi bagian dari sirkulasi keuangan sektor perdagangan dan sektor-sektor yang lainnya. Jenis usaha yang telah ditekuni oleh pengusaha mikro di Kabupaten Yahukimo bermacam-macam. Pada umumnya, usaha yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Yahukimo adalah bertani dan beternak babi. Sebagian lagi menjalankan usaha sebagai peternak babi saja.

Dalam menjalankan usaha, ada pengusaha yang selain bertani dan beternak babi, mampu menyisihkan sebagian uangnya untuk ditabung, dan dipinjamkan kepada orang lain. Diakui bahwa pemberian pinjaman kepada pihak lain, lebih bersifat pada rentenir. Karena meminjamkan uangnya sekaligus dengan memberikan bunga pinjaman seperti praktik-praktik rentenir pada umumnya. Namun uniknya, kreditur-kreditur mereka tidak hanya pelaku-pelaku usaha dan masyarakat biasa saja, tetapi beberapa oknum-oknum pejabat di lingkungan pemerintah daerah juga menjadi kreditur mereka.

Kesan positif yang dapat diperoleh dari praktik rentenir di atas, adalah bahwa ada kesadaran untuk menyisihkan sebagian uang hasil usaha di benak pelaku usaha ini. Ini juga merupakan salah satu potensi yang dapat di kembangkan dalam berusaha.

Kendala Usaha

Sumber daya alam yang melimpah dan semangat berusaha yang tinggi tidak serta merta dapat meningkatkan usaha seseorang. Masih ada sejumlah kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro di Kabupaten Yahukimo.

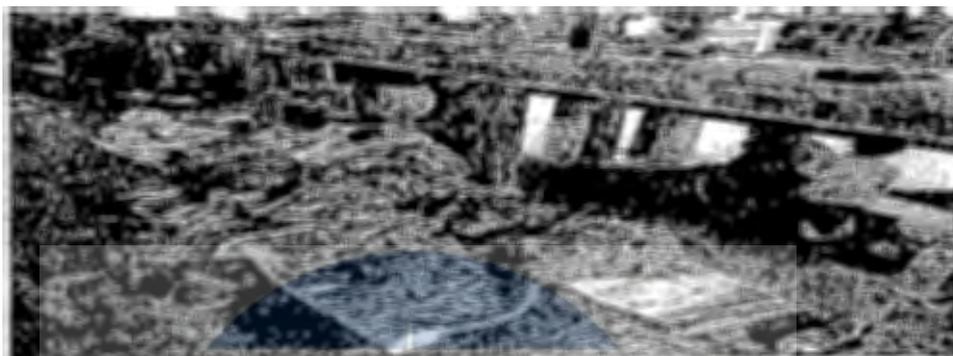
Kendala-kendala tersebut antara lain:

- a. Rendahnya Produktivitas. Rendahnya produktivitas di Kabupaten Yahukimo, disebabkan karena lemahnya manajemen usaha, penguasaan teknologi dan pemasaran serta rendahnya kompetensi usaha.
- b. Terbatasnya akses kepada sumber daya produktif. Terutama akses permodalan, dan akses pasar.
- c. Lemahnya koordinasi lintas instansi untuk mengembangkan usaha mikro.

Kabupaten Yahukimo ini juga didukung oleh sumber daya alam yang melimpah. Potensi bisnis daerah ini sangat besar karena selain memiliki sumber daya alam dari sektor kehutanan, hasil produksi sayur-sayuran pun selalu ada dan tak pernah berhenti. Potensi bisnis ini juga dilengkapi oleh adanya pabrik tahu dan tempe. Namun ironisnya, sebagian besar penduduk asli Kabupaten Yahukimo masih hidup di bawah kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Yahukimo saat ini menempati ranking tertinggi kedua di antara sepuluh kabupaten di wilayah pegunungan tengah yaitu sebesar 46,22 %. Seharusnya, dengan luas wilayah yang dilengkapi dengan sumber daya

alam yang melimpah, masyarakat asli Kabupaten Yahukimo, tidak berlama-lama hidup dalam kemiskinan.

Gambar 4.9
Potensi bisnis yang berbasis sumber daya lokal
di Kabupaten Yahukimo



Semangat berbisnis telah dimiliki oleh hampir sebagian besar penduduk. Dalam konteks ini berarti potensi bisnis telah dimiliki dan menyatu dalam relung hati masyarakat asli Kabupaten Yahukimo. Namun sayangnya, hanya semangat yang dimiliki. Kurangnya motivasi, rendahnya pemahaman manajemen usaha dalam berbisnis juga penguasaan teknologi serta terbatasnya akses untuk mendapatkan modal menjadi penyebab utama tingginya tingkat persentase angka kemiskinan. Profit yang dihasilkan oleh setiap pebisnis yang notabene adalah masyarakat asli Yahukimo, hanya dapat digunakan untuk konsumsi sehari atau dua hari saja. Lemahnya daya bisnis yang disebabkan oleh faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, menyebabkan masyarakat tidak dapat mewujudkan potensi bisnis yang berbasis sumber daya lokal.

Strategi yang perlu dilakukan dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan masyarakat Yahukimo adalah dengan

mendukung pengembangan usaha lokal dengan cara memfasilitasi kelompok usaha lokal untuk memperoleh akses ke keuangan dan membentuk pusat pengembangan usaha mikro atau inkubasi bisnis. Dengan tujuan, agar bukan hanya akses permodalan saja yang diperoleh, tetapi pengetahuan dan sikap berbisnis, serta kemampuan menyusun rencana usaha, dimiliki setiap kelompok usaha sehingga mampu menjadi pengusaha mikro Papua yang mandiri, berdaya guna memberikan kontribusi positif dalam pembangunan Kabupaten Yahukimo.

Pemetaan Lembaga Keuangan Mikro, proyek “Pelebagaan Pembangunan Mata pencaharian yang Berkelanjutan” ILO – PCdP2 UNDP Pemetaan Lembaga Keuangan Mikro & Kajian Situasi Terkini tentang Akses ke Keuangan dan Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Yahukimo, Sarmi & Boven Digoel :

1) Lembaga Keuangan Perbankan (Bank Papua di Yahukimo)

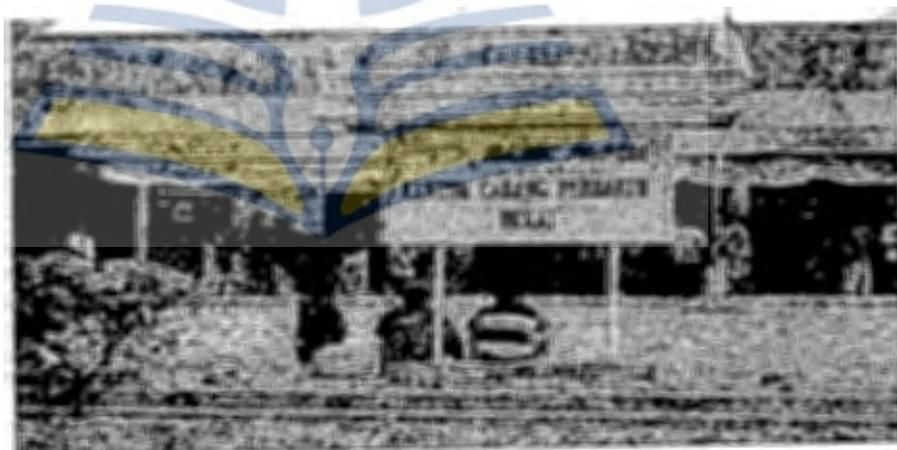
Bank merupakan lembaga keuangan formal. Namun jika bank tersebut dalam aktivitasnya menyediakan jasa keuangan bagi usaha mikro maka bank itu dapat disebut juga dengan lembaga keuangan mikro (LKM). Bank Papua, adalah salah satu bank umum dengan prinsip konvensional yang saham terbesarnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Papua.

Bank Papua di Kabupaten Yahukimo telah beroperasi sejak tahun 2005. Secara umum, produk-produk yang ditawarkan oleh Bank Papua kepada usaha mikro adalah tabungan dan kredit.

Namun, dalam penyelenggaraan jasa keuangan di Kabupaten Yahukimo, Bank Papua hanya menawarkan produk tabungan dan kredit konsumtif saja. Sedangkan akses terhadap kredit produktif yang bersifat modal kerja belum dibuka kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo.

Faktor yang menyebabkan belum dibukanya akses kredit produktif adalah karena belum adanya penguatan kapasitas kelembagaan terkait kredit produktif terutama kredit mikro di Bank Papua Yahukimo selain alasan kehati-hatian. Alasan lain belum dibukanya akses keuangan mikro pada Bank Papua Yahukimo adalah karena alasan legalitas agunan. Yaitu bahwa tidak semua pelaku usaha mikro memiliki bukti kepemilikan agunan dan usaha yang tetap.

Gambar 4.10
Lembaga Keuangan Perbankan (Bank Papua di Yahukimo)



2) Lembaga Keuangan bukan Bank (Koperasi Simpan Pinjam)

Dalam mengembangkan ekonomi rakyat, lembaga keuangan lain yang lebih dekat dan berperan dalam peningkatan usaha

produktif masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan akan modal, adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam memberikan pelayanan kepada masyarakat, berupa layanan menyimpan dan meminjamkan uang bagi masyarakat. Di seluruh Kabupaten Yahukimo, terdapat 50 koperasi (terlampir) yang tersebar di beberapa distrik di Yahukimo. Di Distrik Dekai sendiri ibu kota Kabupaten Yahukimo terdapat dua koperasi. Namun kedua koperasi tersebut tidak menjalankan fungsinya sebagai koperasi simpan pinjam, yang memberikan layanan atau akses keuangan kepada pelaku usaha mikro di Kabupaten Yahukimo. Jenis koperasi tersebut adalah koperasi unit desa (KUD) namun layanan atau jenis usaha yang disediakan adalah jasa foto kopi dan kios. Empat puluh delapan koperasi yang tersebar di distrik lain di Kabupaten Yahukimo, menurut staf Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (disperindagkop) sudah tidak aktif lagi. Karena kurangnya modal dalam mengembangkan koperasi-koperasi tersebut.

Sayangnya, data mengenai jumlah koperasi yang masih aktif dan tidak aktif, tidak tersedia). Kopwan Nunu, satu di antara dua lembaga koperasi di Distrik Dekai adalah koperasi pegawai negeri. Dalam aktivitas sehari-harinya, Kopwan Nunu hanya berfungsi sebagai kantin dan kios saja. Pasar utama yang dituju oleh Kopwan Nunu ini adalah para PNS di lingkungan Disperindagkop. Koperasi inipun tidak menyediakan layanan keuangan berupa simpan pinjam. Demikian pula dengan KUD Kuntre. KUD tersebut pun

menjalankan usaha perdagangan atau kios yang berbadan hukum koperasi.

3) Dinamika Lembaga Keuangan Mikro di Kabupaten Yahukimo

Kehadiran lembaga keuangan mikro baik bank, maupun koperasi pada suatu daerah seharusnya mampu memberdayakan usaha mikro di daerah tersebut. Pada kenyataannya, perkembangan Bank Papua dan koperasi di Kabupaten Yahukimo belum cukup menggembirakan, jika dilihat dari perkembangan layanan keuangan mikro yang diberikan. Fenomena kelesuan perkembangan lembaga keuangan ini, menjadi sebuah persoalan dan rambu-rambu bagi pemerintah daerah Kabupaten Yahukimo. Pemerintah seharusnya lebih tanggap dengan kondisi ini dan segera membuat kebijakan untuk menjawab persoalan tersebut. Jika dibiarkan, maka akan berdampak pada tidak berdayanya usaha-usaha mikro di Kabupten Yahukimo yang salah satu dampaknya adalah menurunnya tingkat produktivitas. Mengapa demikian? Karena saat ini, sebagian besar usaha mikro masih mengandalkan modal sendiri yang berasal dari aset dan pendapatan pelaku usaha mikro yang lebih banyak berasal dari sektor pertanian.

Padahal, kadangkala pendapatan dan aset tersebut harus digunakan untuk berbagai keperluan rumah tangga mulai dari konsumsi pangan, pakaian, sekolah anak, kesehatan, dan biaya sosial lainnya. Dalam konteks jumlah, pendapatan dan aset yang dimiliki relatif sedikit, tidak heran jika urusan modal petani

akhirnya dikaitkan dengan tengkulak atau rentenir dengan tingkat bunga yang tinggi. Persoalan modal untuk pembiayaan pertanian skala kecil menjadi kompleks karena akses ke lembaga pembiayaan formal sulit dipenuhi petani. Seperti kelengkapan administrasi usaha yang sulit dipenuhi sehingga dinilai tidak layak oleh bank (*unbankable*).

Fakta ini merupakan fenomena yang telah dan sedang terjadi dikalangan pelaku usaha mikro. Dan ini memberikan petunjuk kepada pemerintah daerah bahwa adanya kebutuhan model pembiayaan yang mampu memberi alternatif pembiayaan. Tantangan saat ini adalah lembaga keuangan bank atau non bank manakah yang relevan dan cepat serta tepat dengan sasaran pembiayaan. Tantangan tersebut, hal utama yang perlu dilakukan adalah pemberdayaan LKM lebih dulu, baik dalam bentuk bank maupun non bank. Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan usaha mikro ini, pemberdayaan LKM menjadi fokus utama. Pemberdayaan LKM dimaksud adalah bagaimana pemerintah dalam kebijakannya dapat menghadirkan LKM-LKM baru dan meminta kepada Lembaga Keuangan Bank yang sudah ada dalam hal ini Bank Papua untuk membuka akses keuangan mikro di Kabupaten Yahukimo. Dengan diberdayakannya LKM maka secara tidak langsung melalui layanan keuangan mikro yang disalurkan, usaha-usaha mikro akan mengalami peningkatan dalam hal kemandirian berusaha yang berujung pada peningkatan produktivitas.

Untuk menjawab persoalan LKM di Kabupaten Yahukimo dan agar diperoleh pelayanan perbankan kepada masyarakat yang lebih berkualitas, maka pemerintah Kabupaten Yahukimo perlu membuka diri untuk menghadirkan lembaga perbankan lainnya terutama yang memiliki akses sampai ke wilayah terpencil sekalipun. Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu contoh LKM formal yang berbentuk bank umum, yang sangat berpengalaman dalam berhubungan dengan usaha kecil maupun mikro di seluruh Indonesia. BRI dinilai sebagai LKM yang sukses melayani pengusaha mikro, bahkan bisa dijadikan contoh dalam meningkatkan kesejahteraan maupun kemampuan aksesibilitas keuangan masyarakat terhadap perbankan. Saat ini jumlah pinjaman yang disalurkan BRI pada sektor mikro merupakan yang terbesar dibanding lembaga keuangan mikro lainnya.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Yahukimo

Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Yahukimo mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat kampung berdasarkan asas otonomi khusus yang menjadi kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penyiapan teknis pelaksanaan di bidang pemerintah kampung/kelurahan;
- b. Perumusan dan penyiapan teknis pelaksanaan di bidang ketahanan dan sosial budaya masyarakat;
- c. Rumusan dan penyiapan teknis pelaksanaan di bidang usaha ekonomi masyarakat teknologi tepat guna dan pemanfaatan sumber daya alam;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung/kelurahan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung/kelurahan;
- f. Pengelolaan urusan ketatausahaan badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung/kelurahan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Kepala Badan

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung kabupaten Yahukimo mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas badan pemberdayaan masyarakat kampung dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan kabupaten (desentralisasi) bidang cipta pemberdayaan masyarakat kampung yang menjadi kewenangannya serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan penetapan program serta rencana kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
- b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian di pemberdayaan masyarakat kampung;
- c. Pengkoordinasian, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan satuan kerja maupun instansi-instansi di luar sesuai bidang tugasnya masing-masing;
- d. Pengendalian, pembagian tugas, pemberian petunjuk, pembinaan, pengembangan, pengawasan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas dan menyampaikan laporan kinerja;
- e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada bupati sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan penunjang teknis dan administratif, koordinasi, pembinaan, pemantauan dan pengendalian dalam bidang perencanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hukum, hubungan masyarakat, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit di lingkungan badan pemberdayaan masyarakat kampung kabupaten Yahukimo. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyusunan program kerja dengan seluruh bidang-bidang di badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung, penyusunan dan penyajian data statistik dan analisis serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program;
- b. Penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hukum, hubungan masyarakat, rumah tangga dinas, perlengkapan serta peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada sekretariat; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Sekretariat, membawahi:

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Penusunan Program; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

Masing-masing Sub Bagian pada Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

3. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan surat menyurat, tata naskah dan kearsipan, administrasi perlengkapan dan urusan rumah

tangga, inventarisasi aset di lingkungan satuan kerja, pengelolaan administrasi kepegawaian serta memberikan layanan administrasi umum lainnya.

Rincian tugas Sub Bagian Umum adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan dan melaksanakan urusan surat yang masuk dan keluar, pengembalian, pengiriman, pencatatan, penarikan dan pengendalian serta penyusunan arsip;
- b. Menyiapkan dan mengatur penyediaan alat tulis kantor;
- c. Menyiapkan dan mengatur operator telepon, faximile, perpustakaan, tamu serta pengemudi kendaraan dinas;
- d. Melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan aset/kekayaan milik daerah di lingkungan satuan kerja mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, penggunaan, perawatan serta inventaris ruangan;
- e. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dinas, keamanan, kebersihan dan perawatan kantor, pengaturan penggunaan ruang rapat, rumah dinas, kendaraan dinas termasuk dokumen dan perpanjangan stnk;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan formasi pegawai, meliputi formasi kebutuhan, kenaikan pangkat, perbantuan/perpindahan wilayah pembayaran gaji;
- g. Menyiapkan bahan penyelesaian mutasi pegawai, meliputi peningkatan status, pengangkatan dalam pangkat, pengangkatan dalam jabatan, penyesuaian ijazah, peninjauan masa kerja, pemberhentian sementara, pemberhentian dan pensiun;
- h. Melaksanakan pelayanan penyelesaian kartu pegawai, kartu istri, kartu suami, askes, taspen, cuti, kenaikan gaji berkala, penyelesaian angka kredit jabatan fungsional dan pemberian penghargaan;

- i. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kinerja pegawai;
- j. Menyiapkan bahan penyelenggaraan urusan keprotokolan, humas, dokumentasi dan perpustakaan;
- k. Menyiapkan dan menyusun laporan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian penyusunan program mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan rencana dan program pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat kampung serta evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan rutin dan program pembangunan.

Rincian tugas Sub Bagian penyusunan program adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengumpulan data rutin dan program bidang pemberdayaan masyarakat kampung;
- b. Mengolah, menganalisis dan menyajikan data rutin dan program bidang pemberdayaan masyarakat kampung;
- c. Menyusun data statistik bidang pemberdayaan masyarakat kampung;
- d. Menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan rencana kegiatan rutin dan program bidang pemberdayaan masyarakat kampung;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen pelaksana anggaran (dpa) lingkup badan pemberdayaan masyarakat kampung;
- f. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program bidang pemberdayaan masyarakat kampung;

- g. Menyusun laporan-laporan pelaksanaan rencana dan program rutin dan program bidang pemberdayaan masyarakat kampung;
- h. Melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja badan pemberdayaan masyarakat kampung;
- i. Menghimpun dan menyusun laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan badan pemberdayaan masyarakat kampung;
- j. Menyiapkan dan menyusun laporan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian perencanaan dan pelaporan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan.

Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung;
- b. Memproses usul pengangkatan atau pemberhentian bendaharawan di lingkup badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung;
- c. Menganalisis data bahan penyusunan anggaran keuangan;
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pertanggung jawaban pembukuan;
- e. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan perbendaharaan;

- f. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan pembayaran gaji pegawai;
- g. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data keuangan untuk bahan penyusunan laporan pengelolaan keuangan;
- h. Menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- i. Menyiapkan dan menyusun laporan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian keuangan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6. Bidang Pemerintahan

Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan pemberdayaan masyarakat kampung berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. Bidang Pemerintahan Kampung dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pemerintahan Kampung mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program kegiatan pembangunan bidang pemerintahan kampung/kelurahan;
- b. Penyusunan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan tata pemerintahan kampung;
- c. Pembinaan dan survepsi terhadap penyelenggaraan tata pemerintahan dan tertib administrasi kampung;

- d. Perencanaan inventarisasi dan evaluasi permasalahan-permasalahan yang berkembang pada pelaksanaan pemerintahan kampung dan tertib administrasi kampung guna mencari solusi pemecahannya;
- e. Perencanaan dan mengatur pelaksanaan peran dalam pemilihan kepala kampung mulai dari pengesahan calon hingga mengusulkan pemenangnya kepada bupati untuk ditetapkan dengan keputusan bupati;
- f. Pemfasilitasian pembentukan badan permusyawaratan kampung;
- g. Pembinaan terhadap tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kampung dan memberikan juknis pelaporan pertanggungjawaban kepala kampung;
- h. Pembinaan terhadap pengelolaan administrasi keuangan kampung dan melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan administrasi keuangan kampung;
- i. Pemberian pembagian tugas, memimpin, memberi petunjuk dan pendayagunaan dalam pelaksanaan tugas sub bidang pemerintahan dan aparatur serta sub bidang pengembangan kekayaan kampung;
- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala badan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

7. Bidang Penataan Dan Kerjasama Kampung:

- a. Seksi Penataan Kampung;
- b. Seksi Kerjasama Kampung
- c. Seksi Pengembangan Ekonomi

Masing-masing sub bidang pada Bidang penataan kampung dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan dan kerjasama kampung.

Sub Bidang Penataan Kampung dan kerjasama mempunyai tugas melaksanakan persiapan perumusan pedoman fasilitasi Penataan Kampung kampung serta melaksanakan pembinaan terhadap aparat kampung.

Rincian tugas Sub Bidang Penataan Kampung adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana program pembangunan sub bidang tata pemerintahan dan administrasi kampung;
- b. menyiapkan dan menyusun pedoman/petunjuk teknis tentang penyelenggaraan tata pemerintahan dan tertib administrasi kampung;
- c. memantau dan mengawasi jalannya pelaksanaan pemilihan kepala kampung serta mengoreksi dan mengesahkan calon kepala kampung hasil pemilihan dengan keputusan bupati;
- d. menyiapkan dan menyusun laporan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sub bidang pemerintahan dan aparatur; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

8. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan

Sub Bidang pemberdayaan kelembagaan Kampung mempunyai tugas merumuskan dan melakukan pembinaan dalam rangka menggali dan mengembangkan potensi kekayaan kampung.

Rincian tugas Sub Bidang pemberdayaan kelembagaan Kampung adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana program kegiatan pembangunan sub bidang pengembangan potensi kampung;
- b. Mendistribusikan tugas-tugas kepada bawahan baik secara lisan maupun tulisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
- c. Merencanakan dan menyusun petunjuk teknis tentang tata cara pembentukan badan permusyawaratan kampung (bpk), tata cara dan tata tertib pembentukan dewan perwakilan kampung (dpk), pengembangan dan pelestarian adat istiadat serta lembaga adat, pembentukan dan penghapusan/penggabungan kampung dan kelurahan serta penetapan batas-batas kampung;
- d. Melaksanakan penyusunan program kampung dan kelurahan, pelaporan pertanggungjawaban kepala kampung dan kelurahan, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kampung serta pengelolaan administrasi keuangan kampung;
- e. Menyiapkan dan menyusun laporan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sub bidang pengembangan kekayaan kampung; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

C. Pembahasan

1. Evaluasi input perencanaan program respek pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Yahukimo

Program respek adalah merupakan program pemerintah Provinsi Papua. Adapun Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Yahukimo hanya sebagai pelaksana program respek di tingkat Kabupaten Yahukimo. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah Provinsi Papua pada tahun 2008

menjalankan program pemberdayaan masyarakat yang diharmonisasikan ke dalam PNPB Mandiri yang disebut PNPB RESPEK, dengan skema Pemerintah Daerah Papua menyediakan BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) sebesar Rp 100 juta per desa untuk 3.923 desa di 388 kecamatan, bersumber dana Otonomi Khusus, sementara Departemen Dalam Negeri menyediakan lebih dari 1.000 tenaga pendamping (fasilitator) melalui PNPB Mandiri.

Untuk mengetahui tingkat pengenalan, pemahaman, partisipasi serta persepsi masyarakat Papua dan Papua Barat terhadap Program PNPB RESPEK, PNPB RESPEK bekerjasama dengan BPS melakukan Survei Evaluasi PNPB RESPEK Tahun 2009 yang diintegrasikan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Juli 2009. Survei Evaluasi PNPB RESPEK 2009 yang diintegrasikan dalam Susenas terdiri dari komponen pengetahuan dan partisipasi rumah tangga dalam PNPB RESPEK.

Hasil wawancara Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Yahukimo menyatakan bahwa :

“Penggunaan dana Respek yang dilaksanakan oleh masyarakat kampung sesuai program respek. Selain itu program yang direncanakan memang untuk mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat”.(wawancara, Januari 2017).

Berdasarkan wawancara diatas PNPB RESPEK diharapkan dapat mencapai dua tujuan utama yaitu membangun infrastruktur yang dimanfaatkan dengan efektif dan menguatkan kelembagaan kampung. Upaya penguatan kelembagaan yang efektif umumnya membutuhkan cakupan skala yang relatif kecil dan dimulai pada lokasi-lokasi yang sudah menunjukkan potensi pemberdayaan. Memperkecil cakupan wilayah penerima dana PNPB RESPEK tidak dimungkinkan di Papua karena komitmen daerah untuk tetap memberikan dana otsus ke setiap kampung

dan upaya ini perlu didukung karena sering merupakan satu-satunya peluang bagi kampung untuk mempunyai dana pembangunan sendiri. Dalam kondisi cakupan skala yang besar dan dua tujuan besar yang ingin dicapai secara bersamaan, maka rekomendasi dapat dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama ditujukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan menguatkan kelembagaan kampung. Bagian kedua mengusulkan peningkatan kemanfaatan infrastruktur melalui peningkatan aspek fungsional dari infrastruktur basah baik dari sisi desain dan sisi pelaksana teknis. Bagian ketiga adalah usulan untuk membentuk sistem operasional dan pemeliharaan infrastruktur terbangun.

Pembangunan Kampung dengan program Respek awalnya mendapat keraguan dari masyarakat, karena sebelumnya ada yang mengatasnamakan dan mengambil data lalu pergi dan kunjung balik, namun berbeda dengan kondisi yang ada saat ini, justru masyarakat bisa menerima dan memberikan dampak positif bagi kemajuan pembangunan kampung, khususnya di Distrik Ubalih, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua.

Kemiskinan merupakan masalah yang multidemensi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan juga lokasi geografis. Berbagai program pemerintah dalam penganggulangan kemiskinan telah banyak yang dilakukan seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua tahun 2008 -2013. Variabel input terdiri atas: dana planning, dana training, dana transport, dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

Hasil wawancara Kepala Kampung dan Masyarakat Hereki Distrik Ubalih menyatakan bahwa :

“Saya kepala Kampung dan mewakili masyarakat Hereki distrik Ubalih sangat senang sekaligus berterima kasih kepada Bapak Barnabas Suebu yang sudah buat program respek kami sudah rasakan hasilnya sekarang dan harapan saya orang kecil ini, bahwa RESPEK harus tetap ada untuk kami”. (wawancara, Januari 2017).

Hal ini sebagai diungkapkan juga oleh koordinator Pendamping Respek Tingkat Kabupaten Yahukimo, Reynold Wally, yang menirukan ungkapan dari Kepala Kampung Hereki, Yohanis Kabak, dimana dijelaskan kedatangan para pendamping di kampung jangan hanya menipu dengan mengambil data di kampung kemudian mereka pergi dan tidak datang kembali untuk selamanya karena dulu ada yang seperti itu sampai sekarang tidak datang datang saja, namun hal ini justru menjadi postif dan masukan untuk bekerja lebih giat lagi bagi pendamping dalam mendukung pembangunan di kampung lewat program Respek.

Respek sendiri merupakan Kebijakan strategis Mantan Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, dimana sejak tahun 2007 yaitu dengan mengalokasikan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar 100 juta rupiah per masing-masing Kampung/Kelurahan dan Dana Operasional Kegiatan (DOK) sebesar 100 juta rupiah per masing-masing Distrik melalui suatu pendekatan pembangunan yang dikenal dengan nama “Rencana Strategi Pembangunan Kampung” atau disingkat RESPEK guna membangkitkan Gerakan Masyarakat Untuk Pembangunan Kampung (GMPK).

Hasil wawancara Koordinator Pendamping Respek Kabupaten Yahukimo, Reynold Wally menyatakan bahwa :

“Sebagai koordinator pendamping saya langsung turun Kampung untuk mensosialisasikan program Respek yang akan diturunkan pada setiap kampung yang dianggap berada pada tingkat kemiskinannya masih tinggi”. (wawancara, Januari 2017).

Hasil wawancara sebagai koordinator program respek pada saat turun kampung menjelaskan bahwa di sela sela kunjungan lapangan guna melihat secara langsung hasil kegiatan tahun 2011 yang di kerjakan masyarakat di Distrik Ubalih, dimana Pada bulan Oktober tahun 2011 kami melakukan musyawarah distrik dan pada saat itu pendamping distrik menjelaskan tentang Alokasi dana PNPM MANDIRI dan RESPEK , khusus untuk BLM PNPM MANDIRI PEDESAAN di Distrik Ubalih mendapat alokasi dan Rp. 600 juta dengan alokasi untuk 10 kampung yang ada , sehingga di adakanlah perengkingan tingkat distrik berdasarkan kemajuan dan hasil kerja masing masing kampung pada tahun 2010 dan 3 tiga kampunglah yang mendapatkannya yaitu Kampung Hereki, Kampung Wanam dan Kampung Membaham.

Hasil wawancara Sub Bagian Penyusunan Program Kabupaten Yahukimo, menyatakan bahwa :

“Program respek yang dilaksanakan distrik Ubalih dari hasil evaluasi input perencanaan program respek dan 10 kampung lainnya sebenarnya sudah menikmati program respek tersebut”. (wawancara, Januari 2017).

Hasil wawancara diatas terungkap bahwa sub bagian penyusunan program dari hasil evaluasi input program respek sudah dinikmati oleh kampung yang mendapatkan respek, dan hal ini juga dibenarkan oleh Ketua TPKD Distrik Ubalih, Gad Suhuniap yang mengaku bahwa pihaknya bangga pada 3 kampung ini, karena mereka mengusulkan kegiatan yang sebenarnya akan di nikmati oleh masyarakat di 10 kampung ini, bahkan beberapa distrik di sekitar Distrik Ubalih.

Gad Suhuniap mencontohkan Kampung Hereki dan Wanam, dimana masyarakat di dua kampung mengusulkan pembangunan jalan Tebing dan Jembatan Gantung.

Masyarakat Ubalih rata rata tinggal di puncak gunung dan selama ini kami sangat kesulitan karena kondisi wilayah kami yang sangat ekstrim.kami hanya menggunakan jembatan kayu bua dan mengandalkan tali rotan untuk penyebrangan dan melewati jalan yang curam ini sudah kami masyarakat ubalih alami bertahun tahun dan menjadi pergumulan kami selama ini,” ungkap Gad, sekaligus menambahkan bahwa jembatan tersebut telah di kerjakan dengan menggunakan dana PNPM MANDIRI T.A 2011.

Lain halnya dengan hasil wawancara pada kesempatan yang sama pendamping Distrik Ubalih, Frengky dan Yansen bergantian memberikan penjelasan menyatakan bahwa :

“Menyangkut program PNPM MANDIRI RESPEK di Distrik Ubalih, yang mana dijelaskan bahwa untuk program Tahun 2011 PNPM Mandiri Pedesaan yang bersumber dari APBN PUSAT masyarakat di tiga kampung merencanakan pembangunan Jalan tangga Tebing Coran , Jembatan gantung dan Peningkatan Kapasitas bagi 50 Orang”. (wawancara, Januari 2017).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa, khusus untuk kampung Hereki masyarakat telah mengerjakan pembangunan jembatan Gantung yang terletak di badan sungai Ubahak dengan panjang jembatan 27 Meter dengan lebar jembatan 1,5 Meter total anggaran sebesar Rp.200.000.000,- di kerjakan dalam waktu 45 Hari kerja, yang mana semua anggaran tersebut sudah mencakup keseluruhan kebutuhan seperti Alat, Bahan, Transportasi dan Upah pekerja bagi para masyarakat yang bekerja. Selain itu, juga Yansen menambahkan bahwa kesulitan utama masyarakat di Distrik Ubalih adalah transportasi, karena untuk mendatangkan barang barang ke distrik dan kampung TPKD dan TPKK harus

mencarter pesawat dan harga carteran pesawat sangat mahal , dalam hal ini, satu kali terbang untuk pesawat AMMA Pilatus dengan kapasitas 900 KG TPKK dan TPKD mengeluarkan dana transportasi Rp. 18 juta – 20 juta. “Ini benar benar gila, belum lagi mereka harus membayar porter (Pemikul barang) kami hanya mendampingi dan mengarahkan sambil terus mengajak TPKD dan TPKK agar dalam bekerja selalu utamakan kebutuhan umum masyarakat karena ini sudah resiko dari pekerjaan ini.

Sejak tahun 2007, Pemerintah Provinsi Papua telah menggulirkan program Rencana Strategis Pembangunan kampung (Respek). Program tersebut digunakan untuk mengentaskan kemiskinan. Lewat program ini, setiap kampung di wilayah Papua mendapatkan bantuan dana sebesar RP 100 juta yang dapat dibangun untuk membangun infrastruktur dan kegiatan perekonomian kampung. Salah satu kelompok masyarakat yang merasakan manfaat dari adanya program tersebut adalah masyarakat Adat Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua. Dana tersebut digunakan untuk berbagai perbaikan kampung dan menggerakkan perekonomian mikro.

Wawancara dengan Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Yahukimo menyatakan bahwa :

“Sebagai ketua lembaga adat pihaknya mendukung program tersebut. Secara kontekstual, program tersebut dari hasil evaluasi program respek merupakan penjabaran dari empat strategi dasar dalam konsepsi “Papua Baru” yang dicanangkan oleh Gubernur Papua sebelumnya, Barnabas Suebu”. (wawancara, Februari2017).

Ketau lembaga adat berpandangan bahwa, konsep Papua Baru tersebut yakni : pembinaan aparatur dan kelembagaan, pembangunan infrastruktur, penciptaan kesejahteraan serta perasaan aman dan damai. Program Respek tersebut

memberikan perubahan dan manfaat langsung kepada masyarakat yang berada di kampung-kampung di hampir seluruh wilayah Tanah Papua. namun harus diakui, program Respek tersebut tentunya bukan berjalan tanpa hambatan dari hasil evaluasi input perencanaan program respek tersebut.

Lain halnya dengan wawancara dengan Kepala Suku Besar menyatakan bahwa :

“Sebagai kepala suku dalam mengevaluasi input program respek menilai bahwa, program Respek ini belum mendorong kemajuan kampung. Hal ini ditandai oleh masih banyaknya infrastruktur yang mencakup pengerjaan jalan dan jembatan di daerah-daerah terisolasi”. (wawancara, Februari 2017).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa, program respek ini terbilang masih program baru oleh sebab itu, program tersebut tentunya butuh perbaikan-perbaikan demi kesejahteraan masyarakat Papua dimasa yang akan datang. Meski demikian, adanya program ini disambut baik oleh masyarakat Papua.

Hasil wawancara dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa input perencanaan program respek yang diprogram pemerintah propinsi maupun Kabupaten Yahukimo sangat menunjang kesejahteraan masyarakat kampung di Kabupaten Yahukimo. Meskipun terdapat daerah dari hasil evaluasi pelaksanaan program respek ada kampung merasakan daerahnya seolah terisolasi dengan adanya program respek di kampung tertentu. Terisolasi maksudnya adalah adanya penyendirian pengasingan pemisahan pemencilan tersekat, tersaku, terpisah, terpencil, dan terasing dari satu kampung ke kampung lain.

2. Evaluasi proses perencanaan program respek pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Yahukimo

Program ini memfasilitasi proses perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat masyarakat yang berujung pada pemanfaatan bantuan langsung masyarakat (BLM) untuk mendanai kegiatan pembangunan yang diprioritaskan oleh masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah Provinsi Papua dan Papua Barat pada tahun 2008 menjalankan program pemberdayaan masyarakat yang diharmonisasikan ke dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) yang disebut PNPM RESPEK, dengan skema Pemerintah Daerah Papua menyediakan BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) sebesar Rp 100 juta per desa untuk 3.923 desa di 388 kecamatan, bersumber dana Otonomi Khusus, sementara Departemen Dalam Negeri menyediakan lebih dari 1.000 tenaga pendamping (fasilitator) melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Mandiri.

Banyak faktor yang melatarbelakangi adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), Rencana Strategis Pembangunan Kampung (RESPEK) di Papua dan Papua Barat, di antaranya kondisi geografis wilayah Propinsi Papua dan Papua Barat yang merupakan wilayah pegunungan yang kaya akan sumber daya alamnya namun mempunyai keterbatasan fasilitas infrastruktur, sumber daya manusia yang terbatas, serta hasil Kajian Sintese Kapasitas Pembangunan Papua yang menunjukkan bahwa:

1. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Papua terutama yang berada di kampung-kampung tidak memperlihatkan perubahan yang berarti, selama kurang lebih

50 tahun pembangunan di daerah ini, termasuk dalam lima tahun pelaksanaan Otsus.

2. Lebih dari 40% keluarga di wilayah Papua masih hidup di bawah garis kemiskinan
3. Sepertiga anak-anak Papua tidak sekolah
4. Mayoritas desa belum memiliki pusat kesehatan, dokter ataupun bidan
5. Tingkat kematian ibu dan bayi di Papua lebih tinggi dari pada rata-rata tingkat kematian ibu dan bayi skala nasional
6. Papua merupakan wilayah yang paling tinggi tingkat infeksi HIV/AIDS di Indonesia.

Salah satu upaya pemerintah daerah Papua dan Papua Barat untuk mengatasi keadaan ini adalah dengan menjalankan sebuah Program Pemberdayaan Masyarakat, yaitu RESPEK. Program RESPEK (Rencana Strategis Pembangunan Kampung) diluncurkan oleh Gubernur terpilih pertama Provinsi Papua dan Papua Barat pada tahun 2007 dengan tujuan mendorong pembangunan kampung dalam peningkatan bidang:

1. Makanan dan nutrisi;
2. Pendidikan dasar;
3. Kesehatan;
4. Pengembangan ekonomi lokal; dan
5. Sarana-prasarana desa termasuk transportasi, air bersih, listrik, telekomunikasi dan perumahan.

Dalam program RESPEK ini, masyarakat berkesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan kebutuhan dan desain kegiatan

pembangunan di wilayah mereka dengan didampingi fasilitator. Untuk mengetahui tingkat pengenalan, pemahaman, partisipasi serta persepsi masyarakat Papua dan Papua Barat terhadap Program PNPM RESPEK, PNPM RESPEK bekerjasama dengan BPS melakukan Survei Evaluasi PNPM RESPEK Tahun 2009 yang diintegrasikan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Juli 2009. Survei Evaluasi PNPM RESPEK 2009 yang diintegrasikan dalam Susenas terdiri dari komponen pengetahuan dan partisipasi rumah tangga dalam PNPM RESPEK.

Hasil wawancara Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Yahukimo menyatakan bahwa :

“Proses perencanaan program sudah sesuai dengan input perencanaan program yang telah disusun sebelumnya. Dana Respek memang dipakai sesuai dengan input perencanaan sebelumnya”.(wawancara, Mei 2017)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa, PNPM Respek di Kabupaten Yahukimo dapat berjalan seperti yang diharapkan program respek, meskipun dalam pelaksanaan respek di kampung-kampung terkadang belum mampu menggali dana swadaya masyarakat dan menggulirkan dana untuk mendorong perekonomian atau usaha masyarakat. Program respek kampung lebih banyak ditujukan untuk mengentaskan keterbelakangan masyarakat dalam rangka menanggulangi kemiskinan, karena seluruh dana program respek diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas masyarakat. program respek kampung yang dilakukan di Kabupaten Yahukimo terdiri atas: PNPM Respek (2008-2010) dan PNPM Mandiri kampung (2011-2013).

PNPM Mandiri Perdesaan yang dilakukan di tingkat distrik di wilayah Kabupaten Yahukimo dari tahun 2008-2013 sebagian besar dilaksanakan kurang

efisien. Tiga distrik yang dipandang cukup baik dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan adalah: Distrik Sobaham, Distrik Ninia dan Distrik Nipsan.

PNPM RESPEK, adalah bagian dari program kerjasama antara pemerintah daerah (RESPEK/Rencana Strategis Pembangunan Kampung yang bersumber dari dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat), yang dimulai tahun 2008. Pemerintah pusat (PNPM) memberikan asistensi untuk pemberdayaan masyarakat, sementara dana pemerintah daerah (propinsi) berupa pemberian dana untuk setiap kampung sebesar Rp. 100 juta. Dibawah ini nampak partisipasi dan antusias masyarakat dalam penggunaan dana respek dalam upaya mengatasi kemiskinan dengan pemberdayaan masyarakat dan memanfaatkan hasil bumi di Kabupaten Yahukimo.

Seperti halnya PNPM Mandiri Pedesaan, PNPM RESPEK menggunakan pendekatan “pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat (*Community Driven Development*)” yang menekankan partisipasi komunitas dalam pengelolaan program. Program ini menggunakan mekanisme perencanaan bertahap berdasarkan kebutuhan masyarakat (partisipasi) dan juga menekankan aspek transparansi dan akuntabilitas. Training dan asistensi diberikan oleh fasilitator untuk membangun kapasitas kelembagaan lokal.

Wawancara dengan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung kabupaten Yahukimo mengatakan bahwa PNPM RESPEK merupakan bagian dari monitoring program yang terdapat 2 (dua) hal yang menjadi fokus :

“*pertama*, menangkap dan menilai pengalaman penerima manfaat dalam kaitannya dengan pelaksanaan PNPM RESPEK (pengetahuan tentang

program, keterlibatan dalam program dan dampak) dan *kedua*, menangkap serta menganalisa tantangan sosio-politik dan budaya dalam konteks pelaksanaan program”. (wawancara, Februari 2017).

Hasil wawancara diatas diharapkan dapat memberikan perhatian khusus pada penelaahan struktur pemerintahan di tingkat komunitas, mekanisme pelaksanaan program dan model partisipatif dengan memperhatikan aspek gender, dan dinamika sosial-politik dan budaya masyarakat yang mempengaruhi pelaksanaan PNPM RESPEK.

Dengan menggunakan pendekatan “*beneficiary assessment*” (*mengukur/menilai program berdasarkan penilaian penerima manfaat/komunitas*) dan metode etnografi, secara garis besar bertujuan untuk: (1) Menangkap pengalaman (beragam) penerima manfaat PNPM RESPEK dalam melaksanakan program di lokasi mereka sekaligus berbagai tantangan budaya, social dan politik yang berpengaruh terhadap dampak, pelaksanaan dan praktek partisipatif program, (2) Memahami interaksi antara isu-isu pada konteks local dan model pelaksanaan PNPM / RESPEK, sehingga temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk perencanaan program dan fasilitasi di masa yang akan datang yang lebih sesuai dengan konteks lokal, (3). Dan lebih luas lagi, penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan berbagai pengalaman yang mewakili keragaman latar sosial-politik dan budaya yang tidak terbatas pada program PNPM RESPEK, juga dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan pembangunan secara umum.

Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Yahukimo, menekankan pada pembangunan berbasis kampung (Respek). Dalam program ini

pemerintah kabupaten Yahukimo menekankan pada tiga isu penting dalam pembangunan, yaitu keberpihakan, pemberdayaan dan kemandirian. Keberpihakan direncanakan karena orang asli Papua tidak menang bersaing secara terbuka dengan orang non Papua (pendatang), karena kualitas sumber daya manusia orang asli Papua yang masih rendah. Keberpihakan ini ditandai dengan dana Respek (Rencana Strategis Pengembangan Kampung) senilai 100 juta ke setiap kampung. Penggunaan uang tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yaitu harus ada perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sebagai tanggungjawab penggunaan dana tersebut.

Respek memang memiliki orientasi untuk memberdayakan masyarakat Papua yang tinggal di kampung, namun pelaksanaan belum menyentuh aspek pemberdayaan yang menjadi tujuan utama program tersebut. Hal ini disebabkan oleh (1) Sebagian dana Respek telah dicairkan pemerintah provinsi ke seluruh kampung, namun sampai saat ini masyarakat kampung belum memiliki rencana pembangunan dari pengalokasian dana Respek tersebut. (2) Respek diharapkan dapat mendorong masyarakat dalam membangun perekonomiannya, namun kecenderungan dana Respek hanya untuk dibagi-bagi saja. Di sisi lain dari Laporan dana Respek hanya menghambur-hamburkan uang. Hal ini terdapat enam program pokok dalam program respek yaitu gizi dan makanan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, infrastruktur dan pemerintahan kampung. Namun tidak mengetinya masyarakat dan belum adanya pendampingan dalam perencanaan dan penggunaan dana tersebut, maka yang dilakukan oleh masyarakat adalah membagi-bagi dana itu. Hal ini dikarenakan oleh; *pertama*, masyarakat kampung belum mampu untuk merencanakan penggunaan dana respek tersebut. *Kedua*, fasilitator

tidak memahami persoalan yang dihadapi oleh kampung-kampung yang ada di Papua. *Ketiga*, pendampingan sangat urgen dalam membantu masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan Respek belum memadai. Hal ini mengakibatkan Respek belum jalan optimal, padahal dalam tataran konsep sudah sangat baik, namun dalam tataran implementasi bermasalah.

Respek merupakan salah satu program yang dicanangkan pada tahun (2006-2011). Kendatipun diklaim sebagai sebuah strategi pemberdayaan masyarakat, Respek masih bertumpu pada inisiatif pemerintah. Karena itu, bila Respek tidak dipahami dan dilaksanakan dengan baik, Respek berpotensi menciptakan empat bentuk akibat pembangunan bagi masyarakat Kabupaten Yahukimo yaitu :

Pertama, sikap ketergantungan. Sumber pembiayaan utama Respek adalah dana transfer pemerintah Provinsi Papua ke rekening masyarakat di kampung-kampung. Dana sebesar Rp 100 juta per kampung itu dialokasikan setiap tahun. Juga, berkerja sama dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri, dana APBN pun ditambahkan ke dalam Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Dana yang diberikan bisa mencapai Rp 200-300 juta per kampung. Dengan dana PNPM Respek-Mandiri, fasilitas kampung cepat direalisasikan secara murah. Namun, tanpa sadar cara ini menggiring masyarakat ke dalam situasi ketergantungan pada bantuan (dana) pemerintah.

Akhirnya tercipta suatu kebiasaan masyarakat bahwa tanpa kerja keras pun, mereka tetap mendapatkan uang dari pemerintah. Kebiasaan bekerja keras akan makin punah oleh budaya harap gampang. Masyarakat kampung menjadi penerima hadiah atau gula-gula manis dari pemerintah. Masyarakat kampung akan

memperoleh bantuan pembangunan sampai “dunia kiamat”. Selain itu, masyarakat meragukan ungkapan ini, mereka mengatakan ungkapan itu hanyalah sebatas di mulut atau bahasa politis. Bisa diterjemahkan oleh mereka sebagai bantuan itu akan diberikan selamanya. Dalam jangka panjang, Respek hanya akan berujung pada situasi ketidakberdayaan dan melulu bergantung pada belas kasihan pemerintah.

Kedua, pemaksaan kerja. Penyaluran dana Respek terhadap masyarakat bukan diberikan secara gratis. Masyarakat diharuskan untuk bekerja sesuai dengan tuntutan yang diberlakukan oleh pemerintah. Bagi keluarga atau kampung yang mau menerima dana Respek diharuskan untuk bekerja. Program Respek seperti ini sering tidak kena konteks, karena tidak sesuai dengan pola kerja orang setempat. Kalau tidak sesuai dengan konteks maka hasilnya pun tidak maksimal, misalnya kolam. Apakah dalam kolam itu ada ikan atau tidak, bagi pemerintah itu tidak menjadi persoalan yang penting secara fisik kolam itu ada.

Ketiga, Penyalagunaan Uang. Walaupun Respek bertujuan untuk menyejahterahkan rakyat, tetapi dana yang diberikan digunakan untuk minuman keras (Miras), main judi dan lainnya. Dengan Respek secara umum boleh dikatakan menimbulkan banyak persoalan baru dalam hidup masyarakat. Dalam pengelolaan Respek saja tidak maksimal dilaksanakan masyarakat. Uang Respek kebanyakan digunakan untuk membayar maskawin dan meyelesaikan masalah-masalah. Sebab terjadi demikian, karena tidak ada control yang intensif dari pihak yang berwenang. Karena itu, masyarakat tidak megelola uang itu dengan baik pula. Masyarakat gunakan tidak sesuai dengan visi Respek yang dicanangkan. Mungkin sebenarnya tujuan dari Respek sangat bagus di atas kertas, namun

kenyataannya tidak sejalan. Tetapi pemerintah mengharuskan untuk membuat laporan, sesuai dengan pengelolaan uang di lapangan.

Keempat, Kadang masyarakat membuat laporan yang sebenarnya tidak benar. Ini berarti masyarakat menipu pemerintah dan pemerintah menipu rakyat. Kalau realitas demikian adanya, maka boleh dikatakan memang realitas menunjukkan bahwa masyarakat sangat belum siap menerima perubahan yang terjadi. Di satu sisi, menjadi sumber pembiayaan untuk meningkatkan konflik. Dana yang disalurkan pemerintah kabupaten yahukimo ke kampung-kampung, di satu taraf hidup masyarakat, tapi di sisi lain, potensial meledak konflik dalam masyarakat dan benturan-benturan kewenangan pada tingkatan-tingkatan pemerintahan. Ini dapat terjadi ketika penyalurannya dirasakan tidak adil kepada masyarakat. Potensi ketidakadilan program Respek memang telah diantisipasi melalui mekanisme musyawarah di tingkat kampung. Kerap kali juga mekanisme ini dimanipulasi oleh para elite kampung, baik dalam pemerintahan formal maupun adat. Hal ini diperburuk oleh rendahnya tingkat pemahaman, informasi yang tidak utuh. Bila hal ini tidak diatasi, bukan tidak mungkin dana Respek bisa menciptakan konflik atau memperlebar konflik yang mungkin telah ada.

Kelima, politik. Sepintas program Respek tampak sebagai program pembangunan biasa, tapi bila diteliti maka merupakan bagian dari politik pemerintah mengatasi gejolak politik di Tanah Papua.

Status otonomi khusus yang diterima Provinsi Papua melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 berorientasi politik “pembungkaman” aspirasi Papua merdeka. Hal ini diberlakukan untuk menghindarkan masyarakat Papua dari membicarakan hal-hal substansial dan multidimensional yang melilit mereka.

Kendatipun banyak hal yang berusaha didekati Undang-Undang No. 21 Tahun 2001, seperti isu identitas, sejarah, sosial-budaya, ekonomi, politik dan hak asasi manusia, ternyata lebih ditonjolkan pendekatan moneter: triliunan rupiah dikucurkan ke Papua. Program Respek bisa menjadi instrumen untuk meraih dukungan masyarakat guna mempertahankan kekuasaan. Pengucuran dana ke kampung-kampung tampak pro-rakyat, namun menjadi investasi politik yang besar. Karena itu, otoritas kekuasaan yang sedang berjalan harus dipertahankan demi tetap jalannya aliran dana.

Dari hasil wawancara dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa, program respek yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Yahukimo pada prinsipnya disambut baik oleh masyarakat di kampung-kampung, Hanya yang menjadi masalah adalah terkadang ada masyarakat kampung-kampung menyalahgunakan program respek ini yang ditandai dengan adanya masyarakat penerima dana respek justru bermalas-malasan dalam melaksanakan aktifitasnya, disebabkan karena adanya program respek. Hal inilah yang terjadi baik masyarakat distrik maupun di kampung.

3. Evaluasi output perencanaan program respek pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Yahukimo

Dampak program respek yang dirasakan masyarakat kampung di Kabupaten Yahukimo pada tahun 2008. Program Respek baru dilaksanakan akhir 2007 setelah turun bertemu dengan masyarakat kampung di 34 titik menyampaikan bahwa akan mengucurkan dana sebesar Rp 100 juta ke setiap kampung untuk mendorong percepatan pembangunan kampung.

Setelah itu, dana tidak langsung digulirkan. Sekitar empat bulan, tim mempersiapkan infrastrukturnya. Seperti menyiapkan pendamping kabupaten dan distrik, membuka jaringan Bank Papua ke kampung-kampung untuk menyalurkan dana. Karena Bank Papua yang dipercaya pemerintah untuk salurkan dana Respek. Selain itu, dilakukan juga koordinasi antarinstansi teknis tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta memberikan pembekalan bagi para kepala kampung dan lainnya.

Wawancara Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Yahukimo mengatakan bahwa :

“Sebetulnya masa persiapan ini yang membuat dana Respek tahap pertama tahun 2007 tidak terdistrusi secara merata pada saat yang sama ke semua kampung. Sehingga ada sebagian kampung yang baru menerima dana Respek pada awal tahun 2008”. (wawancara, Februari 2017)

Wawancara dengan Kepala Sub bagian Penyusunan program mengatakan bahwa :

“Sebelum turun kampung lebih awal harus diberikan buku panduan respek pada setiap wilayah yang mendapatkan dana respek, namu buku panduan ini yang akan diberikan terkadang mengalami keterlambatan yang menyebabkan pendamping, kepala kampung, atau lembaga swadaya masyarakat” (wawancara, Februari 2017)

Hasil wawancara terungkap bahwa masyarakat selama Turun kampung para pendamping, kepala kampung, kepala distrik, kelompok perempuan, lembaga swadaya masyarakat di setiap wilayah akan diberikan buku panduan Respek. Namun terkadang buku panduan program respek belum tiba di kampung-kampung. Sebagian yang sudah dikirim dari Provinsi tersimpan di Kantor Bupati dan Distrik. Sebagian besar aparat kampung dan distrik belum memahami prosedur pengelolaan dana Respek. Terjadi tumpang-tindih penggunaan dana

dalam mengelola dana Respek, sehingga buku panduan program respek sangat diperlukan masyarakat.

Ada program-program pembangunan yang tidak terkait dengan Respek tapi dilaksanakan dengan dana Respek. Seperti pembangunan jalan, jembatan, rumah warga. Batasan program yang bisa menggunakan dana Respek juga kurang jelas. Seharusnya, dana Respek digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif yang mendorong perubahan dan peningkatan pendapatan masyarakat kampung.

Ternyata, dana Respek tahap pertama lebih banyak dihabiskan untuk membiayai infrastruktur. Kalau begini, kemana dana infrastruktur yang dikelola pemerintah provinsi dan kabupaten? Kebutuhan mana yang prioritas di setiap kampung juga berbeda. Ada yang bilang jalan, jembatan, perumahan dan pendidikan.

Ada pemahaman di sebagian masyarakat bahwa, dana Respek itu diberikan dari dana otonomi khusus, sehingga dibagikan saja kepada setiap orang Papua secara cuma-cuma. Mungkin ini juga yang menyebabkan sebagian kampung yang terima dana Respek pada Desember 2007 dibagikan saja ke setiap keluarga untuk keperluan perayaan natal dan tahun baru.

Para kepala kampung minta dana operasional dalam menunjang kelancaran pelaksanaan Respek. Sebagian kepala kampung memangkas dana Respek sebesar Rp 10 juta untuk biaya operasional aparat kampung. Selama sosialisasi pemberian Rp 100 juta ke kampung-kampung, para kepala kampung yang lebih menjadi tertuduh akan melakukan korupsi. Menimbulkan rasa ketakutan dalam mengelola dana. Hal itu, menimbulkan pendapat bahwa dana

sebaiknya dikembalikan saja ke pemerintah daripada "kita salah kelola dituduh korupsi dan masuk penjara".

Dampak lainnya bahwa, tidak semua wilayah memiliki pendamping. Itu membuat seorang pendamping harus berjalan melayani masyarakat yang bukan menjadi wilayah pelayanannya. Sarana dan prasarana penunjang bagi pendamping juga tidak tersedia. Hal ini membuat para pendamping menggunakan biaya sendiri untuk mengurus berbagai keperluan yang terkait dengan pendampingan. Mereka minta sarana komunikasi agar mempermudah pelaporan. Permintaan ini dari pendamping di distrik kabupaten Yahukimo.

Dana Rp 100 juta menimbulkan semangat masyarakat kampung untuk membangun kampung. Uang ini juga membuat sebagian orang yang telah lama merantau ke kota untuk pulang membangun kampung asalnya. Setiap saat di kampung-kampung ada dinamika seperti rapat-rapat untuk membicarakan rencana pembangunan kampung. Masyarakat kampung juga mulai terlihat menjadi pekerja dan pimpinan proyek pembangunan di kampung, mobilitas penduduk dari kampung ke kota untuk membelanjakan kebutuhan pembangunan kampung juga meningkat. Kondisi yang sebelumnya tidak pernah terjadi dalam sejarah kehidupan masyarakat kampung.

Tak satupun aparat kampung yang melaporkan penggunaan dana secara utuh dan terperinci. Mereka hanya menjawab sudah terima dana kemudian sudah digunakan akan tetapi mereka bingung menguraikannya. Penjelasannya hanya seputar sudah bagi untuk pendidikan, sekian, kesehatan sekian, jalan sekian dengan nada ragu. Selain itu, dampak dari Turkam ini juga membuat para bupati

bersama instansinya bekerja maraton membangun jalan-jalan penghubung yang akan dilewati. Pemerintah setempat membangun jalan bagus, lebar dan tidak berliku-liku atau berlubang.

Kondisi jalan sangat buruk, para pengendara kendaraan roda empat dan dua kerap mengelauh melintasi jalan-jalan itu, tapi saat ada rencana gubernur dan wagub mau Turkam, jalan pun disulap jadi mulus. Bukan hanya jalan saja yang bagus, tapi jembatan dan gorong-gorong juga bagus. Rupanya, kepala wilayah setingkat presiden, wakil presiden dan gubernur harus lebih sering datang ke daerah-daerah terpencil, akan mempercepat pembangunan infrastruktur. Di Yahukimo, seorang kepala kampung minta dana Respek Rp 100 juta tidak cukup untuk membangun kampung yang sangat terpencil, karena itu ia minta gubernur memberikan dana ke setiap kampung sebesar satu miliar rupiah.

Beberapa kondisi tersebut di atas pertanda masih banyak yang harus dibenahi pada Respek tahap kedua pada 2008 ini. Waktu pelaksanaan program Respek tahap pertama yang relatif singkat dengan banyak kelemahan itu tidak mungkin untuk dievaluasi atau menilai keberhasilan. Kalau evaluasi proses dan tahapan pelaksanaan itu mungkin, tapi untuk mengukur keberhasilan apakah kondisi kehidupan masyarakat sudah mencapai taraf yang maksimal itu tidak mungkin. Masih membutuhkan waktu 25 sampai 50 tahun kedepan untuk mengukur apa yang dilakukan saat ini.

Wawancara dengan Kepala bidang pemerintahan mengatakan bahwa :

“sebagai kepala bidang pemerintahan program respek yang dilaksanakan di Kabupaten Yahukimo pada dasarnya kita harus memulai dengan meletakkan pondasi pembangunan”. (wawancara, Februari 2017)

Hasil wawancara terungkap bahwa, apa yang kita kerjakan saat ini adalah pondasi pembangunan yang sedang kita letakkan. Pembangunan kampung lewat Rp 100 juta adalah program yang akan terus dilaksanakan sampai hari kiamat. Karena itu, siapapun dia yang menjadi bupati maupun gubernur Papua, dia tetap melaksanakan pondasi dasar yang kita sudah letakkan ini mulai tahun 2007 .

Karena itu, untuk bisa mempercepat kemajuan pembangunan di kampung yang harus dilakukan adalah memperbanyak pemekaran distrik, bukan pemekaran kabupaten. Pemerintah merasa bahwa ada yang salah selama ini, yang harus diperbaiki. Sistem proyek membuat rakyat jadi penonton pembangunan. Negara lain bisa maju karena pembangunan dimulai dari manusia. Dana Rp 100 juta ini yang disebut pembangunan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat.

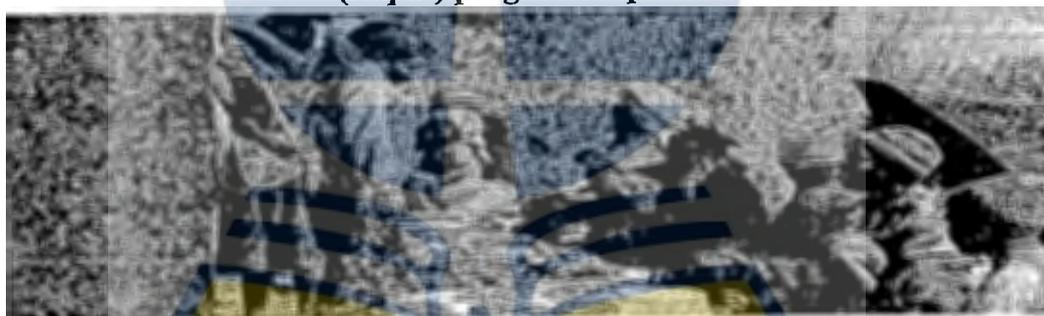
Hasil wawancara dan pembahasan diatas menunjukkan bahwa program respek yang dilaksanakan di kabupaten Yahukimo belum dapat dikatakan berhasil diakibatkan pemahaman masyarakat kampung belum siap menerima dana respek dengan merinci program yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat kampung. Hal ini terjadi karena sumber daya manusia masyarakat kampung rata-rata tergolong rendah, dibandingkan dengan daerah lain di luar papua secara umum.

Hasil wawancara Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Yahukimo menyatakan bahwa :

“Input proses dan utput perencanaan sudah dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Termasuk penggunaan dana Respek sudah dipakai sesuai dengan peruntukannya dan hasilnya juga sesuai dengan yang diharapkan” (wawancara, Januari 2017)

Hasil wawancara diatas menunjukan bahwa, penggunaan dana program respek dipergunakan sesuai dengan peruntukannya termasuk pemberdayaan masyarakat dengan mengajak bekerjasama/gotong royong dalam melaksanakan perbaikan fasilitas jalan dengan memakai dana respek yang pada akhirnya transfortasi dari kampung ke kampung lainnya dapat dilewati dengan darat dan bahkan dari distrik ke distrik lainnya lebih cepat bagi masyarakat melakukan perdagangan dapat dilihat aktivitas masyarakat dengan kegiatan berikut :

Gambar 4.11
Aktivitas masyarakat di Pasar Tradisional yang merupakan hasil
(output) program respek



program respek berhasil sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Karena dapat dirasakan langsung mafaatnya bagi masyarakat, sehingga secara langsung dapat meningkatkan pendapatan masyarakat kampung. Hal inilah yang menjadi dampak bagi masyarakat dalam pelaksanaan program respek di kampung-kampung di kabupaten Yahukimo.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan tentang Evaluasi Perencanaan Program Respek pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dalam Mengurangi Kemiskinan di Kabupaten Yahukimo, yang telah dilaksanakan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Evaluasi input perencanaan program respek dalam mengurangi kemiskinan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Yahukimo dilihat dari dana planning, dana training, dana transport, dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Dalam hal ini dana planning berjalan baik dengan anggaran Rp. 100 juta per setiap kampung, dana training belum berjalan dengan baik disebabkan masyarakat penerima dana program respek belum bisa membuat perencanaan anggaran training dengan baik, dana transport belum berjalan sebagaimana mestinya disebabkan jalanan berpariasi ada jalannya baik tetapi sebaliknya ada yang rusak dan sulit dilewati kendaraan roda empat maupun roda dua. Sedangkan bantuan langsung masyarakat (BLM) dapat berjalan sebagaimana mestinya, langsung diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
2. Evaluasi proses perencanaan program respek dalam mengurangi kemiskinan di Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Yahukimo dilihat dari tidak mengetinya masyarakat dan belum adanya pendampingan dalam perencanaan dan penggunaan dana tersebut, maka yang dilakukan oleh masyarakat adalah membagi-bagi dana itu. Hal ini dikarenakan oleh;

pertama, masyarakat kampung belum mampu untuk merencanakan penggunaan dana respek tersebut. *Kedua*, fasilitator tidak memahami persoalan yang dihadapi oleh kampung-kampung yang ada di kabupaten Yahukimo. *Ketiga*, pendampingan sangat urgen dalam membantu masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan Respek belum memadai. Hal ini mengakibatkan Respek belum jalan optimal, padahal dalam tataran konsep sudah sangat baik, namun dalam tataran implementasi masih bermasalah.

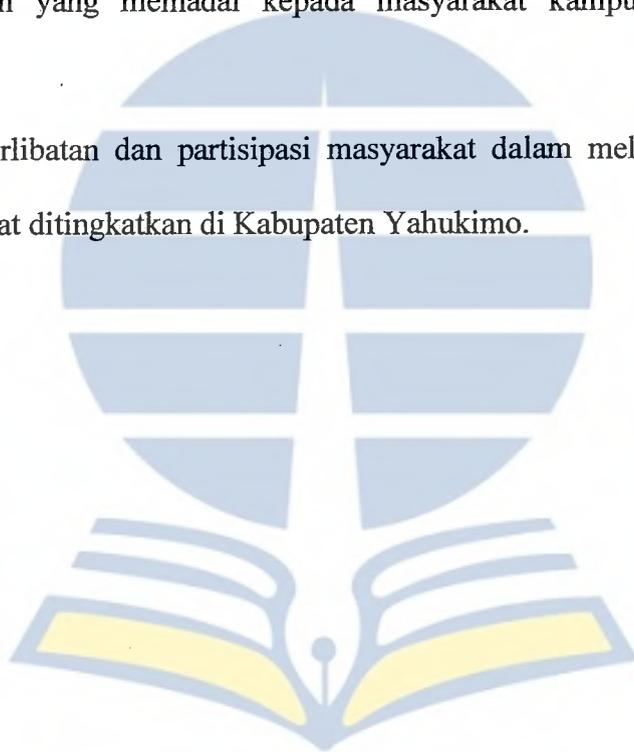
3. Evaluasi output perencanaan program respek dalam mengurangi kemiskinan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Yahukimo dilihat dari Program Respek yang dilaksanakan di Kabupaten Yahukimo belum dapat dikatakan berhasil diakibatkan pemahaman masyarakat kampung belum siap menerima dana respek dengan merinci program yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat kampung lebih baik. Hal ini terjadi karena sumber daya manusia masyarakat kampung rata-rata tergolong rendah, dibandingkan dengan daerah lain di luar papua secara umum.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Yahukimo serta setelah mengambil kesimpulan maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Agar dana anggaran untuk training bagi masyarakat kampung yang akan menerima dana respek, lebih awal harus diadakan sosialisasi dan pelatihan.

2. Agar dana resppek yang dikucurkan langsung ke setiap kampung yang mendapatkan dana resppek memanfaatkan dana resppek secara berkesinambungan.
3. Agar dana resppek dapat dipergunakan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah yaitu dapat menggunakan atau memanfaatkan dana resppek sesuai dengan peruntukannya di Kabupaten Yahukimo.
4. Agar tenaga pendamping program resppek mampu memberikan penjelasan dan pemahaman yang memadai kepada masyarakat kampung penerima dana resppek.
5. Agar keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program resppek dapat ditingkatkan di Kabupaten Yahukimo.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S.(2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Anne, Booth. (2000). *Upaya-Upaya Untuk Mendesentralisasi Kebijaksanaan Perpajakan. Masalah Kemampuan Perpajakan, usaha Perpajakan dan Perimbangan Keuangan, Hubungan Pusat – Daerah dalam Pembangunan (Rangkuman Collin Mac Andrews dan IcksulAmal)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Badjuri & Yuwono. (2005), *Kebijakan Publik, Konsep dan Strategi*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- D., Riant Nugroho. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Media Komputindo, Jakarta.
- _____, (2014). *Kebijakan Publik Negara-negara Berkembang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2010). *Papua Dalam Angka Tahun 2010*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Yahukimo. (2014). *Yahukimo Dalam Angka Tahun 2014*.
- Bappenas, (2008). *Rencana Kerja Pemerintah, lampiran buku II peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan*. Jakarta. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Budiani, Ni Wayan. (2007). *Efektifitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar*. Jurnal Ekonomi dan Sosial. Vol.2 (1). 49 – 57.
- Chalid, P. (2006). *Teori dan isu pembangunan*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah. (2002). *Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah*. Jakarta: Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah
- Dickson. (2014). *10 Negara Termiskin di Dunia*. Diunduh pada 20 September 2016, diperoleh dari <http://ilmupengetahuanumum.com/10-negara-termiskin-di-dunia-pdb-per-kapita/>

- Dunn, W. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Edisi Kedua. Jogjakarta: Penerbit Universitas Gajah Mada,
- Danim, Sudarwan. (2012). *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Frank, A.G. (1984). *Sosiologi pembangunan*. Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial
- Fakih, Mansur. 2008. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: INSISTPress.
- Gema Nias Barat. (2010). *Kriteria Dan Batasan Orang Miskin di Indonesia*. Diunduh 18 September 2016, dari situs World Wide Web : <https://gemaniastbarat.wordpress.com/2010/01/17/kriteria-dan-batasan-orang-miskin-di-indonesia/>
- Ginanjart Kartasasmita. (1997). *Kemiskinan* ;Jakarta: Balai Pustaka.
- Hidayat, L. R. (2014). *Faktor Faktor yang Memengaruhi Kemiskinan*. Diunduh 18 September 2016, dari situs World Wide Web : <http://laelyrakhmawati.wordpress.com/2014/04/21/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-kemiskinan/>
- Handoko, T. Hani. (2010). *Manajemen Personalia & Sumber daya Manusia*. BPFE-Yogyakarta.
- Irawan, P. (2006). *Metodologi penelitian administrasi*. Jakarta: Penertbit Universitas Terbuka.
- Ismanto, I.G.N. (1995). *Kemiskinan di Indonesia dan Program IDT*. Center for Strategic and International Studies: Jakarta.
- Istianda, M. (2007). *Studi mandiri*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- Jones, C.O. (1996). *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Kammeier, H.D. (2002). *Linking decentralization to urban development*. New York: United Nation Human Settlements Programme, UN-HABITA.
- Kismartini, dkk. (2007). *Analisis kebijakan publik*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka. Leach, L., et. al. 1994. *The changing organisation and management of local government*, London: Macmillan Press LTD.
- Kuncoro, Mudrajad. (2010). *Otonomi & Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, dtrategi, dan Peluang*, Jakarta: Erlangga.
- Lexy J Moleong. (1992). *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Moekijat. (1995). *Analisis kebijaksanaan publik*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.

- Moh. Nazir. Ph. D, (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia
- Mustopadidjaya, A.R. (1988). *Perkembangan Penerapan Studi Kebijakan*. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Muhammad Idrus. (2007). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga.
- Maipita, I. (2013). *Penyebab dan Dampak Kemiskinan*. Diunduh pada 18 September 2016, dari situs World Wide Web : http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=305856:penyebab-dan-dampak-kemiskinan&catid=25:artikel&Itemid=44
- Ndraha, T. (1997). *Budaya Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta Nugroho, R.G. 2006. *Kebijakan publik untuk negara-negara berkembang, model-model perumusan, implementasi dan evaluasi*. Jakarta. Percetakan PT. Gramedia.
- Nugroho, A.T. (2013). *Penyebab Kemiskinan di Indonesia serta Dampak yang Ditimbulkan*. Diunduh 18 September 2016, dari situs World Wide Web : <http://alifa-paadanya.blogspot.com/2013/04/penyebab-kemiskinan-di-indonesia-serta.htm>
- Nugroho, D. Riant. (2010). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex MediaKomputindo.
- Pasandaran, E. (1994). *Hasil penelitian upaya penanggulangan kemiskinan di Nusa tenggara Timur Kabupaten Ende dan Timor Tengah Utara*. Jakarta: Puslitbangnak.
- Pratiwi, S. (2012). *Dampak Kemiskinan*. Diunduh 18 September 2016, dari situs World Wide Web : <http://saefakipratiwi.wordpress.com/2012/03/08/dampak-kemiskinan/>
- S. Nasution, M.A. (2004). *Metode Research*, Bumi Aksara, Jakarta
- Purnomo, Herdaru. (2014). *Ini Provinsi dengan Jumlah Penduduk Miskin Terbanyak*. Diunduh 21 September 2016, dari situs World Wide Web : <http://finance.detik.com/read/2014/04/04/113721/2545349/4/ini-provinsi-dengan-jumlah-penduduk-miskin-terbanyak>
- Remi, S.S, dkk. (2002). *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia (Suatu Analisis Awal)*. Edisi Indonesia Inggris. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sayagyo, P. (1985). *Tehnologi Pertanian dan Peluang Kerja Wanita di Pedesaan Suatu Studi Kasus Padi Sawah*, Yogyakarta: BPFE-UGM.

- Setiawan, D. (2010). *Kemiskinan: Latar Belakang, Dampak dan Pemecahan*. Diunduh pada 18 September 2016, dari situs World Wide Web: <http://dasesetiawan999.blogspot.com/2010/10/kemiskinan-latar-belakang-dampak-dan.html>
- Sudjana. (2010). *Tehnik Analisis Data Kualitatif*. Bandung. Penerbit Tarsito.
- _____. (2012). *Metode dan Tehnik Kegiatan Belajar Partisipatif*. Bandung Theme
- Subarsono. (2005). *Analisis kebijakan publik konsep, teori dan aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiyono, (2015). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Soetomo. (2009). *Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Putra Pelajar.
- Soetomo. (2008). *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sukmadinata, N.N. (2011). *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Sugiyono. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sudarmo. (2010). *Gaya Kepemimpinan Perempuan Bagi Efektivitas Organisasi*. , Diunduh pada 18 September 2016, dari situs World Wide Web: <http://sudarmo.staff.fisip.uns.ac.id/files/2016/05>.
- Sukelele, D.D. (2003). *Pemberdayaan masyarakat miskin di era Otonomi Daerah*. Bekasi: Yayasan Kurnia.
- Tangkilisan, H.N.G. (2003). *Evaluasi kebijakn publik, penjelasan, analisis & transformasi pikiran Nagel*. Yogyakarta. Penerbit Balairung & Co.
- Tangkilisan, H.N.G. (2004). *Kebijakan publik untuk pemimpin berwawasan internasional*. Yogyakarta. Penerbit Balairung & Co.
- Tarigan, A. (2002). *Konsentrasi kebijakan publik. derektorat kerjasama pembangunan sektoral dan daerah*. Jakarta: Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan.
- Ulber Silalahi. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Wahab, S.A. (2004). *Analisis kebijaksanaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Edisi kedua. Jakarta. Bumi Aksara.

Winarmo, (2008), *Kebijakan Public Teori dan Proses*, Med Press, Yogyakarta.

Notoatmodjo, Soekidjo. (2012). "*Metodologi Penelitian*" Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.

Zuber, A. (2011). *Kemiskinan Masyarakat Pedesaan: Studi Kasus di Desa Sanggah, Sukoharjo*. Jurnal Sosiologi Dilema, 27(2), 95-110.

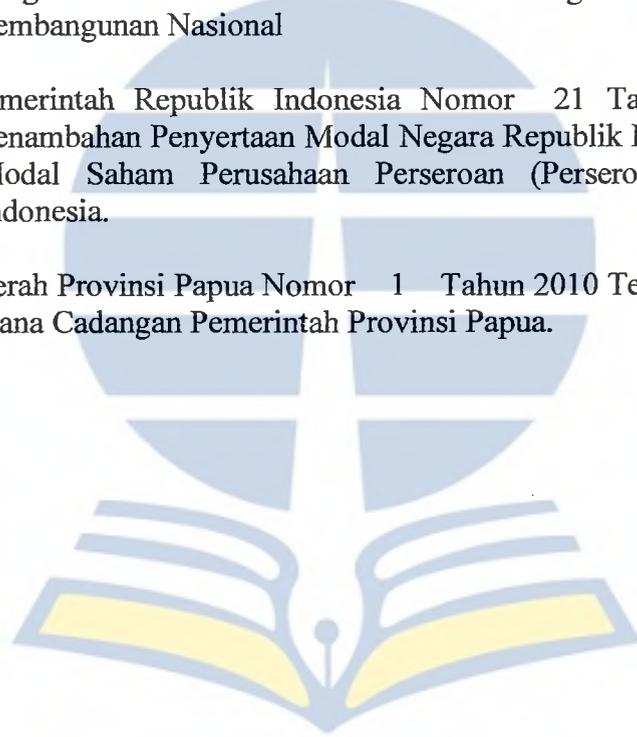
Dokumen – Dokumen :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia.

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Provinsi Papua.



PERSETUJUAN PROPOSAL PENELITIAN

1. Judul Penelitian : Evaluasi Perencanaan Program Respek
Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung
Dalam Mengurangi Kemiskinan
Di Kabupaten Yahukimo
2. Identitas Peneliti :

N a m a : Zadrak Awan Maradona
NIM : 500661183
UPBJJ : Jayapura
Alamat Rumah : Jl. Poros Dekai – Logpon KM.4
Perumahan BAPPEDA No. A8
Kota Dekai – Kabupaten Yahukimo –Papua
Telephone/Fax : 081353243358
E-mail : zmaradona@gmail.com
3. Pembimbing I :

N a m a : DR. Muhammad Sawir, S.Sos.,M.Si
NIDN : 0909076801
Pangkat/Golongan : Lektor/IIIc
Alamat Kantor : Makassar
Telephone : 082293037467
E-mail : muhammadsawir76@yahoo.com

Dekai, 18 November 2016

Peneliti



Zadrak Awan Maradona

NIM. 500661183

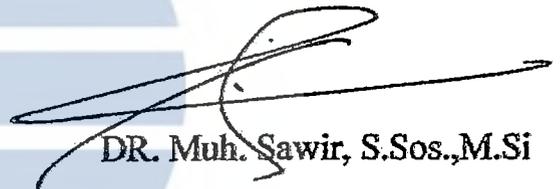
Pembimbing II



Made Yudhi Setiani, S.IP.,M.Si.,Ph.D

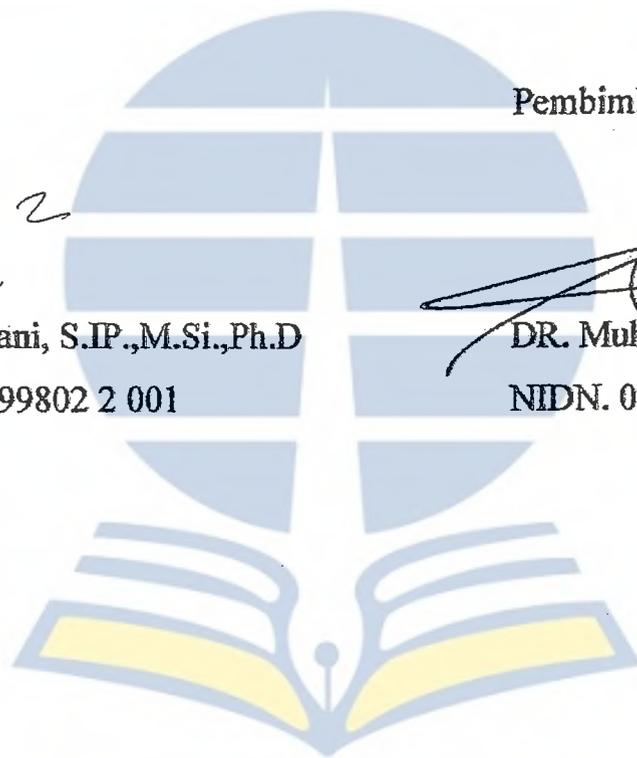
NIP. 19710219 199802 2 001

Pembimbing I



DR. Muh. Sawir, S.Sos.,M.Si

NIDN. 0909076801



UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR LAYAK UJI

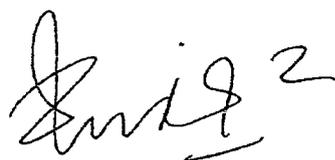
Yang bertandatangan di bawah ini, Saya selaku Pembimbing TAPM dari Mahasiswa :

Nama/NIM : Zadrak Awan Maradona / 500661183
Judul TAPM : Evaluasi Perencanaan Program Respek
Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung
Dalam Mengurangi Kemiskinan
Di Kabupaten Yahukimo

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa TAPM dari mahasiswa yang bersangkutan sudah selesai sekitar 85% sehingga dinyatakan sudah layak uji untuk Ujian Sidang Tugas Akhir Program Magister (TAPM).

Demikian keterangan ini dibuat untuk menjadikan periksa.

Pembimbing II



Made Yudhi Setiani, S.IP.,M.Si.,Ph.D
NIP. 19710219 199802 2 001

Jayapura, 22 Mei 2017

Pembimbing I



DR. Muh. Sawir, S.Sos.,M.Si
NIDN. 0909076801

LEMBAR PERSETUJUAN ARTIKEL

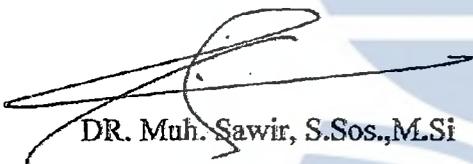
Judul Artikel : Evaluasi Perencanaan Program Respek
Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung
Dalam Mengurangi Kemiskinan
Di Kabupaten Yahukimo

Penulis Artikel

Nama : Zadrak Awan Maradona
NIM : 500661183
Program Studi : Pascasarjana Program Studi Administrasi Publik
Hari / Tanggal : Senin / 22 Mei 2017

Menyetujui :

Pembimbing I



DR. Muh. Sawir, S.Sos., M.Si

NIDN. 0909076801



PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG
 Jl. Kurima – Komplek Perkantoran PEMDA - Dekai

Sumohai, 08 Mei 2017

Nomor : 070/001/KET.IP/BPMK/2017
 Lampiran : -
 Perihal : Keterangan Ijin Penelitian

K e p a d a,
Yth. Kepala UPBJJ-UT Jayapura
 Di Jayapura

Berdasarkan Surat Kepala UPBJJ-UT Jayapura Nomor :
 064/UN31.52/LL/2017 tanggal 26 Januari 2017 perihal tentang Ijin
 Penelitian, maka bersama ini kami menerangkan bahwa :

N a m a : Zadrak Awan Maradona
 NIM : 500661183
 Program Studi : S2 Magister Administrasi Publik (MAP)
 Universitas Terbuka
 UPBJJ-UT : Jayapura

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan Penelitian di
 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kab. Yahukimo
 dalam rangka penulisan tesisnya yang berjudul: "Evaluasi Perencanaan
 Program Respek Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dalam
 Mengurangi Kemiskinan di Kabupaten Yahukimo".

Demikian Penyampaian kami untuk diketahui, atas kerjasamanya
 disampaikan terimah kasih.

KEPALA BPMK
KABUPATEN YAHUKIMO,

IN. EDY SABARA
PEMBINA TK.I
NIP. 19630916 199103 1 010